



Katalog BPS: 2302004



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2015



BADAN PUSAT STATISTIK



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2015



INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA INDONESIA AGUSTUS 2015

ISSN: 2088-5679

No. Publikasi: 04120.1504

Katalog BPS: 2032004

Ukuran Buku: 21 cm x 29 cm

Jumlah Halaman: xvii + 98 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Ketenagakerjaan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

<http://www.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) selama periode Februari 2011-Agustus 2014 dilaksanakan secara triwulanan, dan sejak Februari 2015 dilaksanakan secara semesteran. Survei ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dan diharapkan dapat memonitor dinamika ketenagakerjaan secara teratur dan berkesinambungan. Sakernas Februari menghasilkan angka estimasi sampai dengan level provinsi, sedangkan Sakernas Agustus mampu menyajikan angka estimasi hingga tingkat kabupaten/kota.

Publikasi ini menyajikan series *Key Indicators of the Labour Market* (KILM) Agustus 2014, Februari, dan Agustus 2015. Indikator-indikator yang ditampilkan mengacu pada KILM yang direkomendasikan ILO, dengan harapan bisa dijadikan sebagai acuan mengenai kondisi pasar tenaga kerja di Indonesia. Dari 20 KILM yang direkomendasikan ILO (*International Labour Organization*), baru 13 KILM yang dapat ditampilkan pengukurannya melalui data Sakernas. Beberapa indikator KILM menurut provinsi dan tabel pendukung dalam indikator KILM yang ditetapkan, disajikan pada lampiran publikasi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini, disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Kritik dan saran dari pengguna sangat diharapkan demi kesempurnaan publikasi edisi berikutnya.

Jakarta, November 2015
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia

Dr. Suryamin

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)

AK	Angkatan Kerja
BAK	Bukan Angkatan Kerja
BPS	Badan Pusat Statistik
EPR	<i>Employment-to-Population Ratio</i>
ICLS	<i>The International Conference of Labour Statisticians</i>
ILO	<i>International Labour Organization</i>
ISCED	<i>International Standard Classification of Education</i>
ISIC	<i>International Standard Industrial Classification</i>
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KILM	<i>Key Indicators of the Labour Market</i>
MDG's	<i>Millenium Development Goals</i>
OECD	<i>Organisation for Economic Co-Operation and Development</i>
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SP	Sensus Penduduk
STP	Setengah Penganggur
Supas	Survei Penduduk Antar Sensus
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPAK	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (AKRONIM)	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN	1
1.2. SAKERNAS DAN KILM	2
1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN.....	4
1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM.....	6
BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA	9
KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	9
KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (<i>EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO- EPR</i>)	12
KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	15
KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA	18
KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU	20
KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA	24
KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL.....	27
BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN	31
KILM 8. PENGANGGURAN	31
KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA	33
KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN	36
KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (<i>UNDEREMPLOYMENT</i>).....	41
KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN	45
BAB 4 INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	47
KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF	47
PENJELASAN TEKNIS.....	51
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015	15
Tabel 2.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin, 2014–2015	18
Tabel 3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014–2015	31
Tabel 4.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014–2015	35
Tabel 5.	Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015	37
Tabel 6.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	38
Tabel 7.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014-2015.....	41
Tabel 8.	Indikator Setengah Penganggur, 2014-2015	42
Tabel 9.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	44
Tabel 10.	Indikator Ketidakaktifan (persen), 2014-2015.....	45
Tabel 11.	Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015	48

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2014-2015.....	9
Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2014-2015	9
Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015	10
Grafik 4. TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015	11
Grafik 5. Employment to Population Ratio, 2014-2015.....	12
Grafik 6. Employment to Population Ratio Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015	12
Grafik 7. Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, 2014-2015	13
Grafik 8. Employment to Population Ratio Menurut Kelompok Umur, Februari 2015 dan Agustus 2015.....	14
Grafik 9. Employment to Population Ratio Menurut Provinsi, Februari 2015 dan Agustus 2015.....	14
Grafik 10. Persentase Pekerja Rentan, 2014-2015.....	16
Grafik 11. Persentase Pekerja Rentan Menurut Jenis Kelamin, Agustus 2015.....	16
Grafik 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari 2015 dan Agustus 2015	17
Grafik 13. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, Februari 2015 dan Agustus 2015.....	19
Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015.....	20
Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015.....	20
Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015	21
Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015.....	22
Grafik 18. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015	22
Grafik 19. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015	23
Grafik 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014-2015	24

Grafik 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2015.....	24
Grafik 22. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja dan Daerah Tempat Tinggal, Agustus 2015.....	25
Grafik 23. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2015	26
Grafik 24. Persentase Penduduk Bekerja Formal/informal, 2014-2015.....	27
Grafik 25. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan jenis Kelamin, 2014-2015	28
Grafik 26. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015	28
Grafik 27. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Provinsi, Agustus 2015.....	29
Grafik 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2015 dan Februari 2015	32
Grafik 29. TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2014-2015	33
Grafik 30. TPT Penduduk Umur Muda menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015	33
Grafik 31. TPT Penduduk Umur Muda menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015.....	34
Grafik 32. Share Penganggur Umur Muda (persen), 2014-2015	35
Grafik 33. TPT menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015	36
Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, 2014-2015.....	40
Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	43
Grafik 36. Tingkat Ketidaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2015.....	46
Grafik 37. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur, Februari 2015 dan Agustus 2015.....	49
Grafik 38. Perbandingan Angkatan Kerja menurut Tingkat Pendidikan.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015.....	69
Lampiran 2.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015	70
Lampiran 3.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015.....	71
Lampiran 4.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015	72
Lampiran 5.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015.....	73
Lampiran 6.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014–2015	74
Lampiran 7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014–2015.....	75
Lampiran 8.	Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015	76
Lampiran 9.	Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014–2015	77
Lampiran 10.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015.....	78
Lampiran 11.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014–2015	80
Lampiran 12.	Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2014–2015.....	81
Lampiran 13.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2014–2015	82
Lampiran 14.	Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014-2015	83

Lampiran 15. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Sektor Formal/Informal, 2014-2015.....	86
Lampiran 16. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014-2015.....	87
Lampiran 17. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015.....	88
Lampiran 18. Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	89
Lampiran 19. Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	90
Lampiran 20. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014-2015.....	91
Lampiran 21. Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014-2015.....	92
Lampiran 22. Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015.....	93
Lampiran 23. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014-2015.....	94
Lampiran 24. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014-2015.....	95
Lampiran 25. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah), 2014-2015.....	96
Lampiran 26. Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014-2015.....	97
Lampiran 27. Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama.....	98

RINGKASAN EKSEKUTIF

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 122,4 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 5,9 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 (128,3 juta orang) dan naik sebanyak 0,5 juta orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 (121,9 juta orang).

Pada periode Februari 2015-Agustus 2015 menurunnya jumlah angkatan kerja seiring dengan menurunnya TPAK yaitu dari 69,50 persen pada Februari 2015 menjadi 65,76 persen Agustus 2015. Berbeda dengan yang terjadi pada periode Agustus 2014-Agustus 2015, peningkatan angkatan kerja justru diiringi penurunan TPAK dari 66,60 persen pada Agustus 2014 menjadi 65,76 pada Agustus 2015.

Secara nasional angka EPR pada Agustus 2015 adalah sebesar 61,70. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 62 orang yang bekerja pada Agustus 2015. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Februari 2014 maupun Agustus 2014, dimana masing-masing menurun sebesar 3,76 poin dan 0,94 poin.

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2015 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2015 dan Agustus 2014). Persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (47,31 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,70 persen) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (13,99 persen)

Pada Agustus 2015 memperlihatkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia mempunyai pola yang sama dengan keadaan Februari 2015 maupun Agustus 2014, yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,28 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 32,88 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,84 persen.

Tingkat pekerja paruh waktu pada Agustus 2015 mencapai 21,40 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 21

orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami sedikit kenaikan bila dibanding Februari 2015 yaitu sebesar 0,19 persen poin, namun mengalami penurunan sebesar 1,36 persen poin bila dibanding Agustus 2014. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 31,81 persen dan 15,25 persen.

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 21,40 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 21 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami sedikit kenaikan bila dibanding Februari 2015 yaitu sebesar 0,19 persen poin, namun mengalami penurunan sebesar 1,36 persen poin bila dibanding Agustus 2014.

Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa dari 114,82 juta orang yang bekerja, sebanyak 51,72 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (59,38 juta orang). Pada periode Agustus 2014, serta Februari dan Agustus 2015 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada Agustus 2014 sebesar 53,24 persen, turun menjadi 51,85 persen pada Februari 2015, dan kembali turun pada Agustus 2015 menjadi 51,72 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Agustus 2014 mencapai 46,76 persen, naik menjadi 48,15 persen pada Februari 2015, dan naik pada Agustus 2015 hingga mencapai 48,28 persen.

TPT Agustus 2015 mencapai 6,18 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia cenderung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 dan Februari 2015. TPT Agustus 2015 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,37 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2015 (5,81 persen), dan 0,24 persen poin dibandingkan Agustus 2014 (5,94 persen).

TPT penduduk pada kelompok umur muda pada Agustus 2015 mencapai 22,59 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 23 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 4,30 persen poin bila dibandingkan

dengan hasil Sakernas Februari 2015 dan naik sebesar 0,39 persen poin apabila dibandingkan Agustus 2014.

Secara umum, pada Agustus 2015 TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 11,16 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,25 persen.

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Agustus 2015, mencapai 9,74 juta orang, yang terdiri dari 6,08 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,66 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2015, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,50 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,24 juta orang.

Tingkat ketidakaktifan di Indonesia pada Agustus 2015 mencapai 34,24 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 34 orang. Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2015 meningkat jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 maupun Agustus 2014, dengan peningkatan masing-masing sebesar 3,74 persen poin dan 0,84 persen poin. Sejalan dengan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan, sebanyak 7,42 juta orang dari Februari 2015 (56,30 juta orang) ke Agustus 2015 (63,72 juta orang). Pada Agustus 2015, secara nasional kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2015. Angkatan kerja pada Agustus 2015 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 57,11 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 28,19 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 11,07 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,63 persen.

<http://www.bps.go.id>

BAB 1

PENDAHULUAN

Data ketenagakerjaan merupakan aspek penting untuk menggambarkan indikator pasar tenaga kerja di Indonesia. Salah satu sumber penyajian indikator ini berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan, agar para pengambil keputusan dapat lebih cepat dalam mengambil kebijakan untuk mengatasi dan memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan khususnya di Indonesia. BPS sejak Triwulan I Februari 2011 menyusun publikasi yang merujuk pada publikasi Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organization-ILO*), yaitu Indikator Pasar Tenaga Kerja (*Key Indicators of the Labour Market-KILM*). ILO telah meluncurkan KILM pada tahun 1999 untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada unsur utama dari pasar tenaga kerja dunia. Edisi KILM Indonesia ini merujuk pada KILM yang diterbitkan ILO pada tahun 2005.

1.1. SAKERNAS DAN ANALISIS KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan yang dikumpulkan oleh BPS melalui sensus dan survei antara lain: Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (Supas), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas). Dari survei-survei tersebut, hanya Sakernas yang dirancang khusus untuk mengumpulkan data yang dapat menggambarkan keadaan umum ketenagakerjaan antar periode pencacahan.

Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Secara khusus, untuk memperoleh informasi data jumlah penduduk yang bekerja, pengangguran dan penduduk yang pernah berhenti/pindah bekerja serta perkembangannya di tingkat kabupaten/kota, provinsi, maupun nasional.

Kegiatan pengumpulan data ketenagakerjaan pertama kali dilaksanakan tahun 1976. Sampai dengan saat ini, Sakernas mengalami berbagai perubahan, baik dalam periode pencacahan maupun cakupan sampel wilayah dan rumah tangga. Tahun 1986 sampai dengan 1993 Sakernas dilaksanakan secara triwulanan, tahun 1994 sampai dengan 2001 secara tahunan setiap bulan

Agustus, sedangkan tahun 2002 sampai dengan 2004 selain secara tahunan juga dilaksanakan secara triwulanan. Mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, Sakernas dilakukan secara semesteran.

Dengan semakin mendesaknya tuntutan data ketenagakerjaan, baik variasi, kontinuitas, kemutakhiran, dan peningkatan akurasi data yang dihasilkan, maka pengumpulan data Sakernas mulai tahun 2011 hingga tahun 2014 dilakukan kembali secara triwulanan yaitu bulan Februari (Triwulan I), Mei (Triwulan II), Agustus (Triwulan III), dan November (Triwulan IV), yang penyajian datanya dirancang sampai tingkat provinsi. Namun demikian, untuk pelaksanaan Sakernas Triwulan III (bulan Agustus) selain sampel triwulanan juga terdapat sampel tambahan, hal ini dilakukan untuk kepentingan angka estimasi penyajian data sampai tingkat kabupaten/kota. Pada November 2014 karena adanya berbagai alasan Sakernas tidak dilaksanakan. Pada tahun 2015 ini, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran (dua kali setahun) di seluruh wilayah Republik Indonesia. Jumlah sampel Sakernas pada Agustus sekitar 200.000 rumah tangga.

Dari setiap rumah tangga terpilih dikumpulkan keterangan mengenai keadaan umum setiap anggota rumah tangga, yang mencakup nama, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan umur. Khusus untuk anggota rumah tangga yang berumur 10 tahun ke atas, akan ditanyakan keterangan mengenai status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, dan pengalaman kerja. Sebagai catatan, rumah tangga korps diplomatik, rumah tangga yang tinggal di blok sensus khusus, dan rumah tangga khusus yang berada di blok sensus biasa tidak dipilih dalam sampel.

1.2. SAKERNAS DAN KILM

Dengan berbagai macam variabel yang dikumpulkan pada Sakernas, dapat disusun serangkaian indikator kunci yang merujuk pada publikasi ILO, yaitu KILM. Tetapi yang perlu menjadi catatan adalah, pada saat melakukan interpretasi data hasil Sakernas dengan data ketenagakerjaan dari sumber lain (SP, Supas, dan Susenas), perlu memperhatikan beberapa hal, karena data-data tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung.

Beberapa faktor perlu dipertimbangkan oleh para pengguna data dalam menginterpretasi dan menganalisis data ketenagakerjaan yang tersedia. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tersebut meliputi:

- 1) Tujuan Survei

Sakernas merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan. Sedangkan SP maupun SUPAS bertujuan untuk mengetahui sifat demografi secara umum. Dengan demikian, informasi yang dikumpulkan dalam SP dan SUPAS lebih banyak dan beragam, antara lain meliputi data pendidikan, migrasi, Keluarga Berencana, dan ketenagakerjaan. Begitu pula informasi yang dikumpulkan melalui Susenas lebih beragam sifatnya, seperti data pengeluaran atau konsumsi, ketenagakerjaan, kesehatan, dan perumahan. Perbedaan tujuan survei ini menyebabkan kualitas data ketenagakerjaan antar berbagai survei tersebut relatif berbeda.

2) Ukuran Sampel

Ukuran sampel dalam Sakernas berbeda dengan ukuran sampel dalam SP, SUPAS, maupun Susenas. Perbedaan ini menyebabkan *sampling error* yang dikandung oleh angka perkiraan dari masing-masing sumber data juga berbeda. Semakin kecil ukuran sampel, maka akan semakin besar *sampling error*-nya.

3) Faktor Pengali/Penimbang

Data ketenagakerjaan sejak Februari 2014 hingga Agustus 2015 menggunakan penimbang hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035.

4) Kualitas Petugas Lapangan

Sampai dengan Semester II (Agustus) 2006, petugas Sakernas hanya terdiri dari pencacah dan pengawas/pemeriksa. Mulai Sakernas Semester I (Februari) 2007 hingga Sakernas Semester II (Agustus) 2010, pencacahan dilakukan secara tim, dalam 1 (satu) tim terdiri dari 2 (dua) pencacah dan 1 (satu) koordinator tim. Petugas-petugas tersebut pada umumnya adalah pegawai BPS yang ada di kecamatan (Koordinator Statistik Kecamatan-KSK) dan BPS Kabupaten/Kota setempat. Sebagian besar dari mereka umumnya telah mempunyai pengalaman dalam berbagai survei maupun sensus serta lebih menguasai medan/lapangan. Sejak 2011 hingga saat ini, petugas Sakernas tidak lagi secara tim, tetapi terdiri dari pencacah dan pengawas, dimana seorang pengawas membawahi 2-3 orang pencacah.

5) Perencanaan Kuesioner

Cara menyusun pertanyaan mengenai ketenagakerjaan dalam kuesioner dapat berpengaruh terhadap hasil survei maupun sensus. Ini meliputi bentuk kalimat/pertanyaan yang tertulis, urutan pertanyaan, pemilihan kata-kata yang tepat dalam pertanyaan, banyaknya pertanyaan, maupun jenis keterangan yang ditanyakan. Dalam Sakernas, telah diusahakan bentuknya

ringkas/ sederhana, mudah dimengerti, serta pertanyaan pokoknya tidak berubah-ubah.

6) Waktu Pelaksanaan/Pencacahan

Waktu pelaksanaan lapangan antara Sakernas, Susenas, SP, dan Supas berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan perbedaan hasil yang diperoleh karena pengaruh musiman.

Penyusunan indikator pasar tenaga kerja (KILM) pada awalnya dirancang dengan dua tujuan utama, yaitu:

- 1) Menyajikan indikator inti pasar tenaga kerja;
- 2) Meningkatkan ketersediaan indikator-indikator ketenagakerjaan, untuk memantau perkembangan pasar tenaga kerja terkini. Indikator-indikator ini merupakan hasil kolaborasi yang melibatkan ILO bersama para ahli dari Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (*Organisation for Economic Co-operation and Development-OECD*) dan beberapa perwakilan nasional dari Departemen Tenaga Kerja dan kantor statistik berbagai negara.

1.3. PERAN KILM DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

Identifikasi dan kuantifikasi *inefisiensi* dalam pasar tenaga kerja, seperti *underutilization* tenaga kerja dan defisit pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan langkah pertama dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk yang bekerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pandangan luas dunia kerja menuntut pengumpulan data yang lengkap, pengorganisasian, dan analisis informasi pasar tenaga kerja. Dalam konteks ini, KILM dapat berfungsi sebagai alat dalam memantau dan menilai banyak hal, yang terkait dengan fungsi pasar tenaga kerja. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana KILM dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.

Beberapa peran KILM dalam analisis pasar tenaga kerja antara lain:

- 1) Mempromosikan Agenda ILO: Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*).

Salah satu tujuan agenda ILO mempromosikan pekerjaan yang layak adalah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan produktif, dalam kondisi kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Menerapkan konsep "layak" untuk segala bentuk

kegiatan ekonomi merupakan sesuatu yang multitafsir. Persepsi mengenai upah yang layak dapat berbeda secara signifikan dari satu orang ke orang lain. Selain pekerjaan yang layak, permasalahan yang muncul dalam dunia ketenagakerjaan adalah kurangnya kesempatan kerja. Kurangnya kesempatan kerja selain bisa diidentifikasi menggunakan pendekatan indikator pengangguran (KILM 8 dan KILM 9), juga bisa menggunakan indikator yang lebih rinci yaitu tingkat ketidakaktifan (KILM 13). Untuk mengetahui kualitas dan jenis pekerjaan dapat dilakukan pendekatan, misalnya, dengan mengidentifikasi individu yang masuk dalam kelompok pekerja rentan (*vulnerable employment*), yaitu penduduk bekerja berdasarkan status dan sektor (KILM 3 dan KILM 4), jam kerja yang berlebih/*exceeds working hours* (KILM 6), penduduk bekerja di sektor informal (KILM 7), dan setengah penganggur (KILM 12).

2) Pemantauan Pencapaian Tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs).

Tujuan utama kebijakan nasional serta strategi nasional pembangunan sebagai bagian dari upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah meningkatnya jumlah pekerja penuh (*full employment*), penduduk bekerja yang produktif, dan penyediaan pekerjaan yang layak (*decent work*). Pekerjaan yang layak dan produktif merupakan isu sentral untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan. MDGs pertama memasukkan target baru 1b (yang disepakati pada tahun 2008) yaitu "mencapai pekerja penuh dan layak bagi semua, termasuk perempuan dan orang-orang muda". Empat indikator yang dipilih untuk memantau kemajuan menuju sasaran 1b dalam MDGs tersedia dalam KILM, yaitu rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*), proporsi penduduk bekerja yang hidup di bawah garis kemiskinan, tingkat pekerja rentan (*vulnerable employment*), dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja, sesuai dengan indikator KILM 2, KILM 3, KILM 18, dan KILM 20.

3) Memantau kesetaraan gender di pasar tenaga kerja.

Wanita menghadapi tantangan khusus dalam mencapai pekerjaan yang layak. Sebagian besar indikator KILM dipisahkan menurut jenis kelamin, yang memungkinkan untuk melakukan perbandingan kesempatan kerja laki-laki dan perempuan.

4) Mengkaji tenaga kerja di era globalisasi.

Globalisasi memiliki potensi manfaat bagi semua, namun sampai saat ini hal tersebut tidak mencakup orang banyak. Oleh karena itu, perlu satu cara untuk

menghadapi era globalisasi dengan tetap mendorong penciptaan kesempatan kerja yang layak untuk semua. Salah satu cara untuk melakukannya adalah membuat tenaga kerja menjadi tujuan sentral dari kebijakan ekonomi makro dan sosial. Indikator KILM dapat bermanfaat dalam hal ini, dengan memonitor dinamika ketenagakerjaan yang terkait dengan globalisasi. Misalnya, adanya penelitian yang menunjukkan bahwa kehilangan pekerjaan/penciptaan serta perubahan upah dan produktivitas dipengaruhi oleh globalisasi. Jika indikator mencerminkan konsekuensi negatif dari globalisasi, maka pembuat kebijakan memiliki pilihan untuk mengubah kebijakan ekonomi makro sehingga dapat meminimalkan biaya penyesuaian (*adjustment cost*) dan mendistribusikan keuntungan dari globalisasi secara lebih adil.

1.4. ANALISIS PASAR TENAGA KERJA MENGGUNAKAN KILM

Semakin banyak negara yang mempublikasikan angka pengangguran nasional dan data ketenagakerjaan agregat. Namun, pengguna harus bijaksana menggunakan statistik ini dalam rangka melihat dinamika pasar tenaga kerja. Salah satu keuntungan menggunakan tingkat pengangguran agregat, misalnya, relatif lebih mudahnya dalam hal pengumpulan dan komparasi antardaerah. Akan tetapi, melihat angka pengangguran saja dengan mengabaikan unsur-unsur lain dari pasar tenaga kerja yang lain merupakan suatu kekeliruan. Penting untuk menyadari bahwa pengangguran “hanya” merupakan salah satu aspek dalam indikator ketenagakerjaan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam analisis pasar kerja, adalah menentukan rincian status tenaga kerja dalam populasi.

Penduduk umur kerja dapat didekomposisi menjadi orang-orang yang tidak aktif secara ekonomi (di luar tenaga kerja/bukan angkatan kerja, KILM 13); bekerja (KILM 2), atau tidak bekerja dan mencari pekerjaan (menganggur, KILM 8). Semakin besar penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran atau bukan angkatan kerja atau keduanya, menunjukkan *underutilized* yang besar dari angkatan kerja yang potensial. Pemerintah yang menghadapi situasi ini semestinya berusaha untuk menganalisis alasan untuk tidak aktif, yang pada gilirannya bisa menentukan pilihan kebijakan yang penting untuk mengubah situasi.

Jika mayoritas penduduk yang aktif secara ekonomi terdiri dari perempuan yang tidak bekerja karena mereka memiliki tanggung jawab rumah tangga,

pemerintah mungkin dapat mendorong lingkungan yang bisa memfasilitasi partisipasi ekonomi perempuan, misalnya melalui pembentukan pusat-pusat penitipan anak atau jam kerja yang fleksibel bagi perempuan. Program untuk menggalakkan pekerjaan pada penyandang cacat juga dapat membantu menurunkan tingkat ketidakaktifan, jika cacat adalah alasan umum untuk tidak aktif. Hal yang lebih sulit adalah mengembalikan orang yang telah meninggalkan pasar kerja ke dalam angkatan kerja karena alasan "putus asa"/*discourage worker*, yaitu karena mereka merasa bahwa tidak tersedia pekerjaan yang sesuai bagi mereka, dan mereka tidak memiliki kualifikasi yang tepat, atau karena mereka tidak tahu ke mana harus mencari pekerjaan.

Pengangguran juga harus dianalisis menurut jenis kelamin (KILM 8), umur (KILM 9), lamanya menganggur (KILM 10), dan tingkat pendidikan (KILM 11), untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari komposisi pengangguran, sehingga bisa menentukan kebijakan pengangguran yang tepat.

Karakteristik lain dari pengangguran yang tidak ditampilkan dalam KILM, diantaranya latar belakang sosial-ekonomi, pengalaman kerja, juga penting untuk dianalisis apabila data karakteristik tersebut tersedia, sehingga dapat menentukan kelompok mana yang menghadapi kesulitan tertentu. Paradoksnya, tingkat pengangguran yang rendah mungkin menyamarkan tingkat kemiskinan dalam suatu negara (KILM 20), sedangkan tingkat pengangguran tinggi dapat terjadi di negara-negara dengan perkembangan ekonomi yang signifikan dengan insiden kemiskinan rendah.

Di negara-negara berkembang dengan ketersediaan perlindungan sosial yang baik atau bila terdapat berbagai jaminan sosial atau dukungan yang tersedia, maka bagi penduduk bekerja lebih dapat meluangkan waktu untuk mencari pekerjaan yang lebih diinginkan. Oleh karena itu, masalah di banyak negara berkembang bukanlah tingkat pengangguran yang tinggi, melainkan kurangnya kesempatan kerja yang layak dan produktif bagi mereka yang bekerja.

Hal tersebut membawa kita pada kebutuhan untuk membedah jumlah total lapangan kerja serta untuk menilai kesejahteraan penduduk yang bekerja, di bawah suatu konsep bahwa tidak semua pekerjaan adalah "pekerjaan yang layak". Jika penduduk yang bekerja terdiri dari sebagian besar bekerja sendiri atau pekerja keluarga (lihat KILM 3), lalu, dibandingkan dengan total penduduk yang bekerja (KILM 2), apakah indikator ini akan kehilangan nilainya sebagai ukuran normatif? Apakah orang-orang ini bekerja? Ya, menurut definisi internasional.

Apakah mereka dalam pekerjaan yang layak? Mungkin tidak. Meskipun secara teknis bekerja, beberapa penduduk bekerja yang berusaha sendiri atau pekerja keluarga akan bertahan dengan pekerjaan mereka saat ini sehingga batas antara bekerja dan menganggur sangat tipis. Hal ini terlihat ketika terbuka lowongan untuk pekerjaan yang bergaji (buruh/karyawan/pegawai) di ekonomi formal, rombongan tenaga kerja ini akan berlomba-lomba untuk mengajukan lamaran.

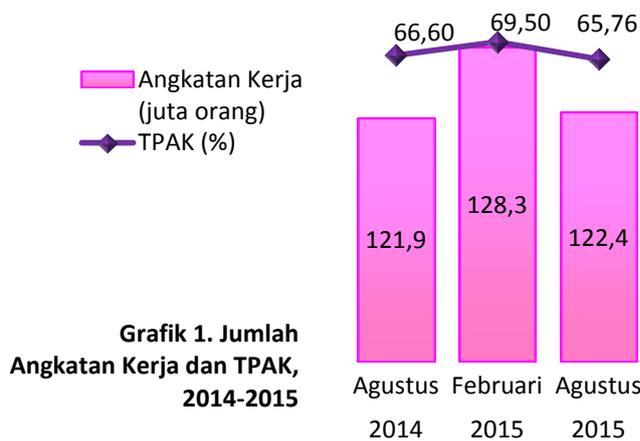
Identifikasi lebih lanjut harus dilakukan, untuk menentukan apakah penduduk yang bekerja tersebut umumnya miskin (KILM 20), terlibat dalam kegiatan pertanian tradisional (KILM 4), menjual barang-barang di pasar informal tanpa keamanan kerja (KILM 7), jam kerja yang berlebihan (KILM 6), atau ingin memperoleh pekerjaan tambahan (KILM 12).

<http://www.bps.go.id>

BAB 2 PARTISIPASI DAN INDIKATOR TENAGA KERJA

KILM 1. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

“ Jumlah angkatan kerja dan TPAK menurun ”

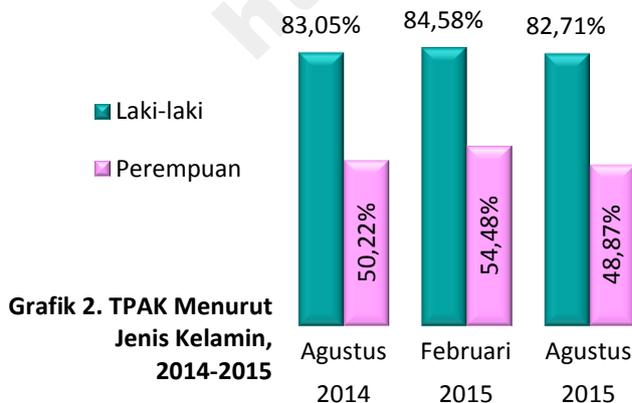


Grafik 1. Jumlah Angkatan Kerja dan TPAK, 2014-2015

Jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 122,4 juta orang. Jumlah tersebut turun sebanyak 5,9 juta orang apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 (128,3 juta orang) dan naik sebanyak 0,5 juta orang jika dibandingkan keadaan Agustus 2014 (121,9 juta orang), lihat

Lampiran 3. Pada periode Februari 2015-Agustus 2015 menurunnya jumlah angkatan kerja seiring dengan menurunnya TPAK yaitu dari 69,50 persen pada Februari 2015 menjadi 65,76 persen Agustus 2015. Berbeda dengan yang terjadi pada periode Agustus 2014-Agustus 2015, peningkatan angkatan kerja justru diiringi penurunan TPAK dari 66,60 persen pada Agustus 2014 menjadi 65,76 pada Agustus 2015.

“TPAK laki-laki masih lebih tinggi dari TPAK perempuan”



Grafik 2. TPAK Menurut Jenis Kelamin, 2014-2015

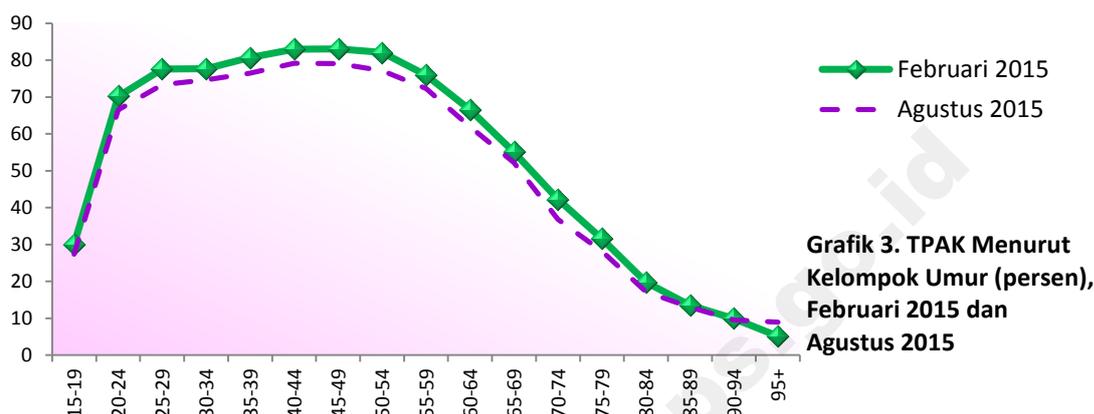
Di Indonesia, biasanya TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Gambaran tersebut juga terlihat pada keadaan Agustus 2015, dimana TPAK laki-laki mencapai 82,71 persen sementara pada perempuan hanya 48,87 persen.

Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 83 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan, hanya sekitar 49 orang yang termasuk angkatan kerja. Pola yang

sama juga terjadi pada periode Februari 2015 maupun Agustus 2014, dimana TPAK laki-laki lebih tinggi sekitar 30 persen dibanding TPAK perempuan.

“ TPAK Agustus 2015 hampir selalu lebih rendah dari Februari 2015 pada tiap kelompok umur ”

Secara total TPAK Agustus 2015 lebih tinggi dari pada TPAK Februari 2015, hal yang sama juga terjadi pada hampir semua kelompok umur, kecuali kelompok umur 95 tahun ke atas.

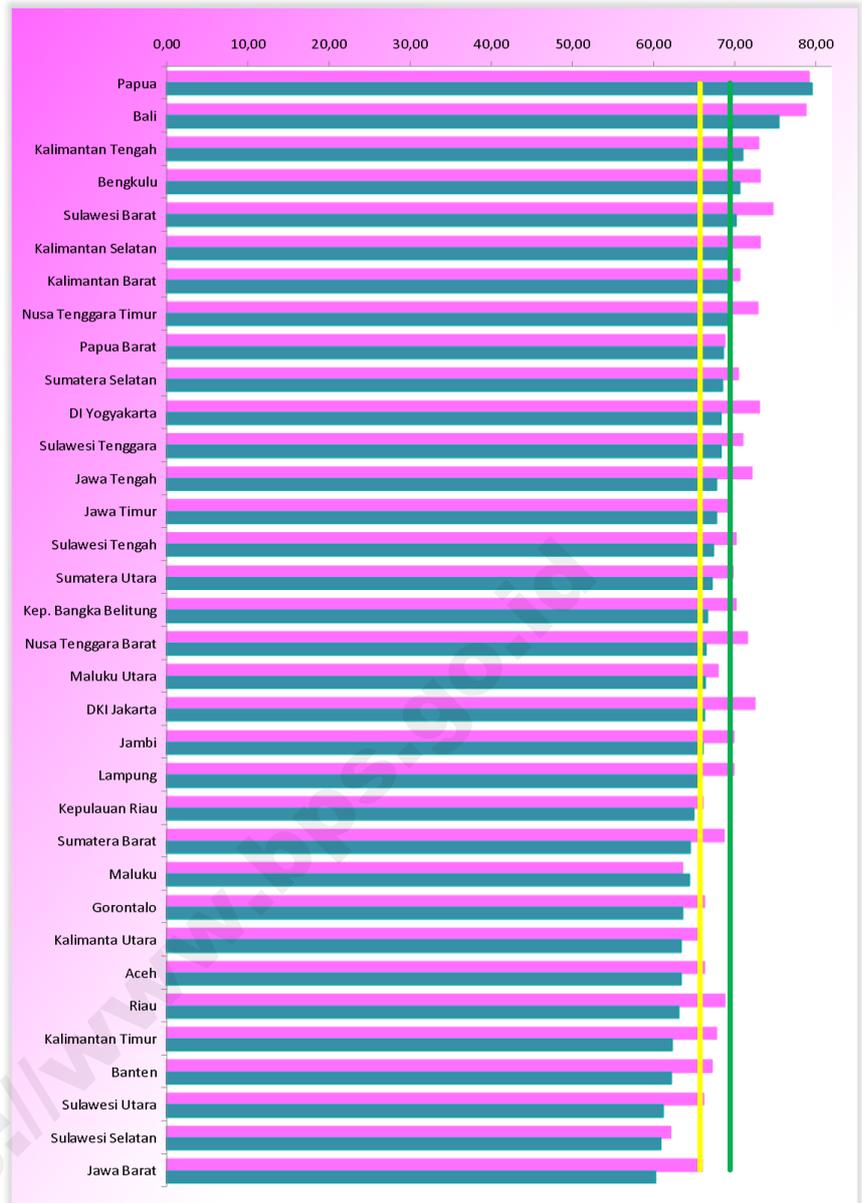


Grafik 3. TPAK Menurut Kelompok Umur (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015

“Papua, Bali dan Kalimantan Tengah memiliki TPAK tertinggi”

TPAK menurut provinsi berdasarkan Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa provinsi dengan TPAK tertinggi berturut-turut adalah Provinsi Papua (79,57 persen), Provinsi Bali (75,51 persen) dan Provinsi Kalimantan Tengah (71,11 persen). Angka TPAK ketiga provinsi tersebut lebih tinggi dari angka TPAK nasional sebesar 65,76 persen. Sedangkan pada Sakernas Februari 2015 ketiga provinsi yang memiliki TPAK tertinggi adalah Provinsi Papua dengan TPAK sebesar 79,26 persen, Provinsi Bali dengan TPAK sebesar 78,86 persen dan Provinsi Sulawesi Barat dengan TPAK sebesar 74,74 persen.

Urutan provinsi dengan TPAK terendah pada Sakernas Agustus 2015 ini diduduki oleh Provinsi Jawa Barat (60,34 persen), Provinsi Sulawesi Selatan (60,94 Persen), dan Provinsi Sulawesi utara (61,28 Persen). Sedangkan tiga urutan provinsi dengan TPAK terendah pada Sakernas Februari 2015 berturut-turut diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (62,23 persen), Provinsi Maluku (63,71 persen), dan Provinsi Kalimantan Utara (65,70 persen) (Lihat Lampiran 7).



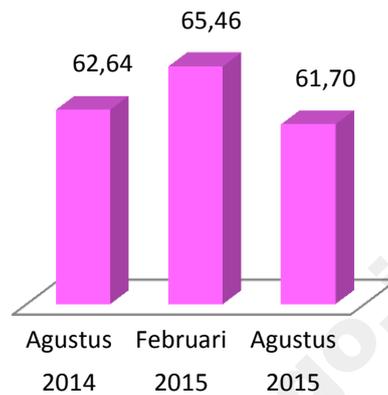
Grafik 4. TPAK Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015



KILM 2. RASIO PENDUDUK BEKERJA TERHADAP JUMLAH PENDUDUK (*EMPLOYMENT TO POPULATION RATIO-EPR*)

“Rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk pada Agustus 2015 adalah sebesar 61,70”

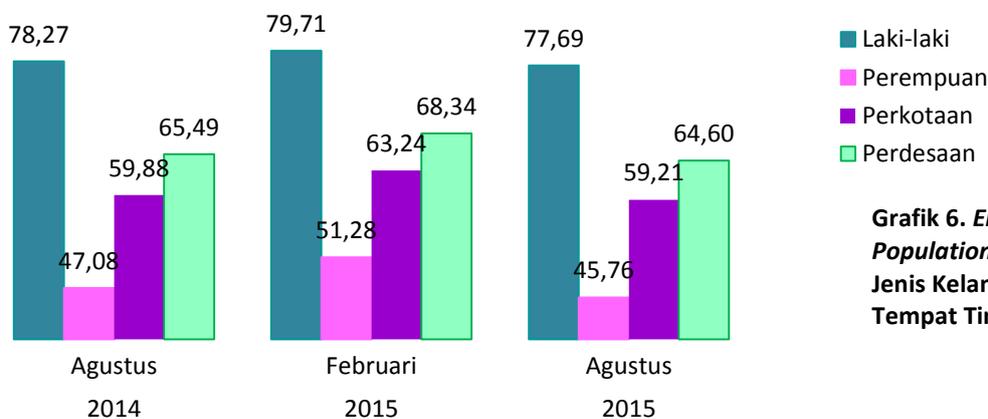
Salah satu indikator penting dalam pasar kerja adalah EPR, secara nasional angka EPR pada Agustus 2015 adalah sebesar 61,70. Berdasarkan angka tersebut bisa diinterpretasikan bahwa dari 100 orang penduduk umur 15 tahun ke atas, terdapat sekitar 62 orang yang bekerja pada Agustus 2015. EPR ini mengalami penurunan jika dibandingkan keadaan Februari 2014 maupun Agustus 2014, dimana masing-masing menurun sebesar 3,76 poin dan 0,94 poin.



Grafik 5. *Employment to Population Ratio, 2014-2015*

“EPR laki-laki lebih tinggi dari EPR perempuan dan EPR di perdesaan lebih tinggi dari EPR di perkotaan”

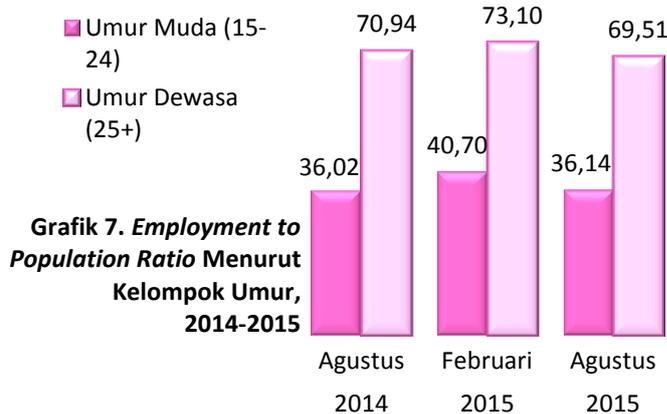
Pada periode Agustus 2014, Februari 2015, maupun Agustus 2015 dilihat berdasarkan jenis kelamin EPR laki-laki lebih tinggi sekitar 1,5 kali dibandingkan EPR perempuan. Sebagai contoh pada Agustus 2015, EPR laki-laki pada periode ini adalah sebesar 77,69 sedangkan EPR perempuan hanya sebesar 45,76. Berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2015 EPR daerah perkotaan (59,21) lebih rendah dibanding EPR daerah perdesaan (64,60). Begitu pula untuk periode Agustus 2014 dan Februari 2015, dimana wilayah perkotaan



Grafik 6. *Employment to Population Ratio Menurut Jenis Kelamin dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015*

EPR-nya selalu lebih rendah dibanding wilayah perdesaan. EPR daerah perkotaan periode Februari 2015–Agustus 2015 mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 4,03 poin sedangkan untuk wilayah perdesaan juga mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 3,74 poin.

“EPR kelompok umur muda lebih rendah dari EPR kelompok umur dewasa”

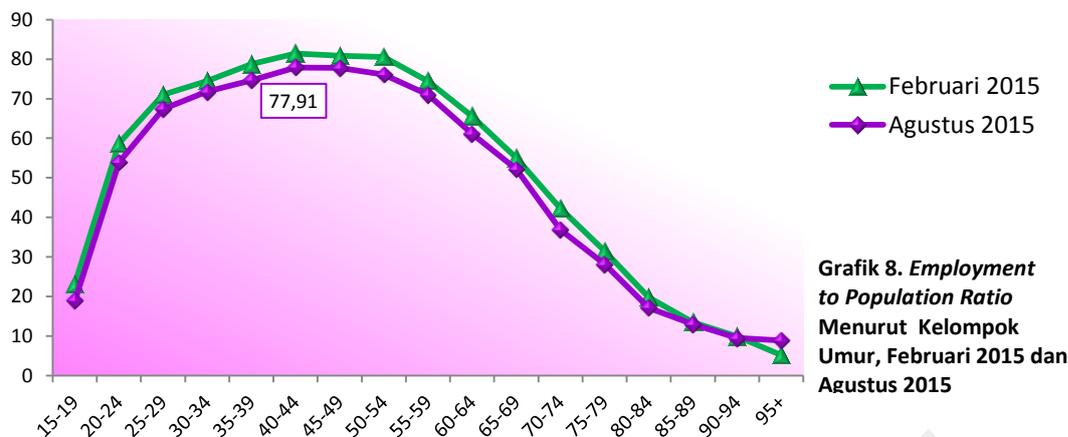


Grafik 7, memperlihatkan bahwa EPR penduduk kelompok umur muda selalu lebih rendah dari penduduk kelompok umur dewasa baik pada Agustus 2014, Februari 2015 maupun Agustus 2015. EPR penduduk kelompok umur muda lebih rendah sekitar 30 persen dari penduduk kelompok umur dewasa. EPR penduduk kelompok umur muda (kelompok umur 15–24 tahun), pada

periode Februari 2015–Agustus 2015 menurun sebesar 4,56 poin dari 40,70 menjadi 36,14. Berbeda dengan periode Agustus 2014–Agustus 2015, dimana EPR penduduk kelompok umur muda mengalami peningkatan yaitu naik sebesar 0,12 poin. Sedangkan EPR untuk penduduk kelompok dewasa (umur 25 tahun ke atas), pada periode Februari 2015–Agustus 2015 mengalami penurunan yaitu menurun sebesar 3,59 poin, dari 73,10 menjadi 69,51. Begitu pula untuk periode Agustus 2014–Agustus 2015 EPR pada kelompok umur dewasa juga mengalami penurunan, yaitu menurun sebesar 1,43 poin dari angka 70,94.

“EPR tertinggi pada kelompok umur 40-44 tahun”

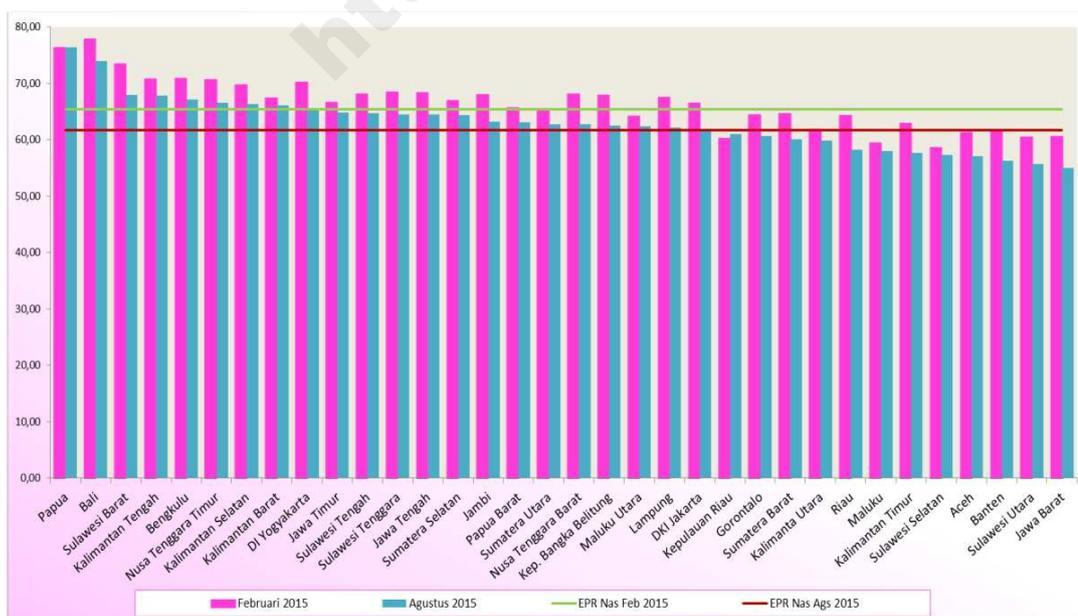
Pola EPR berdasarkan kelompok umur yang terlihat pada Grafik 8 mirip dengan pola TPAK pada Grafik 1. Hal ini menunjukkan dominasi jumlah penduduk bekerja pada komponen penduduk usia kerja. Dari Grafik 8 terlihat bahwa puncak EPR untuk keadaan Februari 2015 ini berada pada kelompok umur 40–44 tahun dengan EPR 77,91. Grafik EPR periode Agustus 2015 dan Februari 2015 terlihat berhimpitan hampir pada semua kelompok umur, dengan nilai EPR Februari 2015 yang lebih tinggi pada hampir semua kelompok umur kecuali kelompok umur 95 tahun ke atas.



Grafik 8. *Employment to Population Ratio* Menurut Kelompok Umur, Februari 2015 dan Agustus 2015

“EPR tertinggi di Provinsi Papua, Bali dan Sulawesi Barat”

Grafik 9 dan Lampiran 9, menunjukkan provinsi-provinsi dengan EPR tertinggi pada Agustus 2015, yaitu Provinsi Papua (76,40), Provinsi Bali (74,01) dan Provinsi Sulawesi Barat (67,91). Posisi ini hampir mirip jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 dimana provinsi dengan EPR tertinggi diduduki oleh Provinsi Bali (77,78), Provinsi Papua (76,31), dan Provinsi Sulawesi Barat (73,39). Sementara itu, provinsi dengan EPR terendah pada periode Agustus 2015 adalah Provinsi Jawa Barat (55,08), Provinsi Sulawesi Utara (55,75), dan Provinsi Banten (56,30). Sedangkan pada keadaan Februari 2015 posisi ini diduduki oleh Provinsi Sulawesi Selatan (58,61), Provinsi Maluku (59,43), dan Provinsi Kepulauan Riau (60,18).



Grafik 9. *Employment to Population Ratio* Menurut Provinsi, Februari 2015 dan Agustus 2015

KILM 3. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

“Mayoritas pekerja di Indonesia berstatus berusaha”

Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama pada Agustus 2015 ini distribusinya tidak begitu berbeda jika dibandingkan dengan keadaan pada periode sebelumnya (Februari 2015 dan Agustus 2014). Berdasarkan Tabel 1, persentase terbesar penduduk bekerja diduduki oleh penduduk dengan status berusaha (47,31 persen), diikuti dengan penduduk bekerja dengan upah/gaji (38,70 persen) dan urutan terakhir adalah penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga (13,99 persen).

Tabel 1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2014–2015

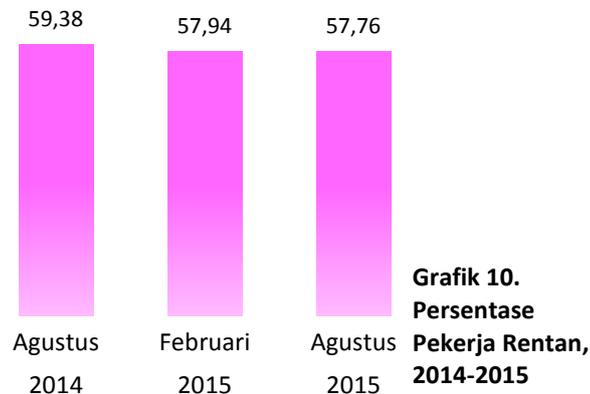
Status Pekerjaan Utama (1)	2014	2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Total	100,00	100,00	100,00
Penduduk bekerja dengan upah/gaji (buruh/karyawan/pegawai)	36,97	38,58	38,70
Berusaha	48,37	46,78	47,31
Pengusaha	3,65	3,48	3,54
Berusaha sendiri + berusaha dibantu buruh tidak tetap	34,69	33,47	32,85
Pekerja bebas	10,03	9,83	10,92
Pekerja keluarga	14,66	14,64	13,99

Pada Tabel 1, pada Februari 2015-Agustus 2015 penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami peningkatan sebesar 0,53 persen poin, untuk status buruh/karyawan/pegawai mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen poin, sedangkan penduduk bekerja dengan status pekerja keluarga mengalami penurunan sebesar 0,65 persen poin.

Jika dibandingkan dengan periode setahun yang lalu (Agustus 2014), penduduk bekerja dengan status berusaha mengalami penurunan sebesar 1,06 persen poin, buruh/karyawan/pegawai meningkat sebesar 1,73 persen poin, dan pekerja keluarga menurun sebesar 0,67 persen poin.

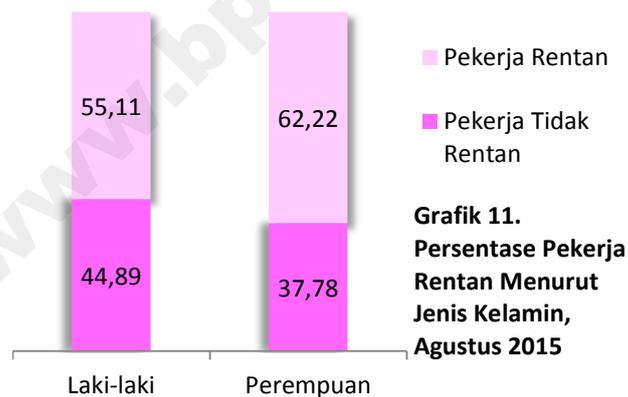
“Terjadi penurunan persentase pekerja rentan”

Khusus untuk pekerja rentan/*vulnerable employment* mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas dan pekerja keluarga. Pada Agustus 2015 pekerja rentan mencapai 57,76 persen, hal ini dapat dikatakan bahwa dari 100 orang penduduk yang bekerja terdapat sekitar 58 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014, maupun Februari 2015 persentase pekerja rentan terus mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,62 persen poin dan 0,18 persen poin.



“Sebagian besar perempuan masuk kategori pekerja rentan”

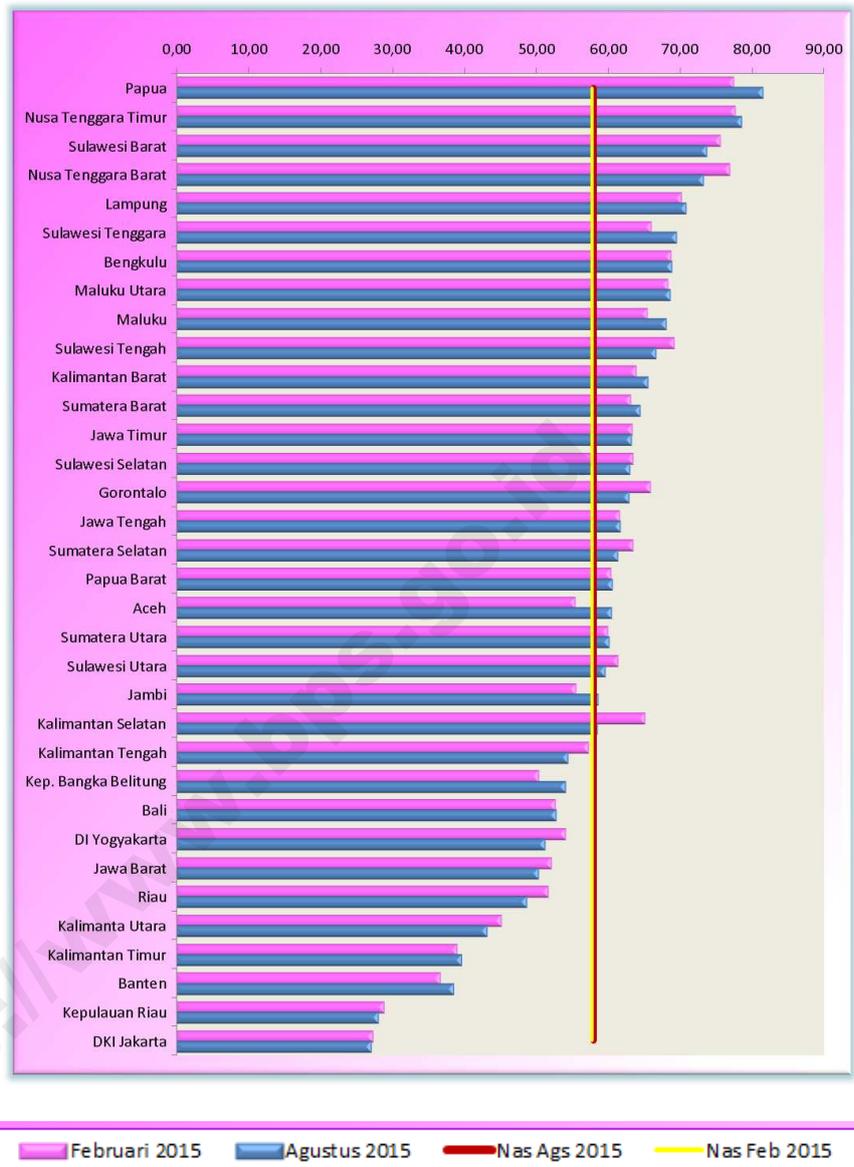
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, pada pekerja perempuan, proporsi pekerja rentan sebesar 62,22 persen, yang berarti hampir dua per tiga pekerja perempuan masuk kategori rentan. Sementara pada laki-laki, proporsi pekerja rentan sebesar 55,11 persen.



“Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi”

Provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi pada Agustus 2015, yaitu Provinsi Papua (81,49), Provinsi Nusa Tenggara Timur (78,60), dan Provinsi Sulawesi Barat (73,68). Jika dibandingkan dengan Februari 2015, provinsi dengan persentase pekerja rentan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur (77,70), Provinsi Papua (77,43), dan Provinsi Nusa Tenggara Barat (76,86). Sebaliknya provinsi dengan persentase pekerja rentan terendah pada Agustus 2015 diduduki oleh Provinsi DKI (27,04), Provinsi Kepulauan Riau (28,10) dan Provinsi Banten (38,54). Posisi provinsi dengan persentase pekerja rentan terendah ini, masih

tetap sama jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 (Grafik 12 dan Lampiran 10).



Grafik 12. Persentase Pekerja Rentan Menurut Provinsi, Februari 2015 dan Agustus 2015

KILM 4. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT LAPANGAN USAHA

“Mayoritas penduduk bekerja di sektor jasa-jasa”

Kondisi lapangan pekerjaan utama di Indonesia pada Agustus 2015 masih mempunyai pola yang sama dengan keadaan Februari 2015 maupun Agustus 2014, yaitu didominasi oleh sektor jasa-jasa dengan persentase penduduk bekerja pada sektor jasa-jasa sebesar 45,28 persen. Selanjutnya adalah sektor pertanian sebesar 32,88 persen, dan sektor manufaktur sebesar 21,84 persen.

Tabel 2. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2014–2015

Lapangan Pekerjaan Utama	2014		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
Total	100,00	100,00	100,00	100,00
Pertanian	34,00	33,20	32,88	32,88
Manufaktur	21,16	21,37	21,84	21,84
Pertambangan	1,25	1,18	1,15	1,15
Industri	13,31	13,56	13,29	13,29
Listrik, Gas dan Air	0,25	0,26	0,25	0,25
Bangunan	6,35	6,38	7,15	7,15
Jasa-jasa	44,84	45,43	45,28	45,28
Perdagangan	21,66	22,05	22,37	22,37
Transportasi	4,46	4,30	4,45	4,45
Keuangan	2,65	3,02	2,84	2,84
Jasa Kemasyarakatan	16,07	16,06	15,62	15,62

Apabila dilihat lebih lanjut, penyumbang terbesar dari sektor jasa-jasa adalah sektor perdagangan (22,37 persen) dan sektor jasa kemasyarakatan (15,62 persen). Sedangkan untuk sektor manufaktur penyumbang terbesarnya adalah sektor industri (13,29 persen) dan sektor bangunan (7,15 persen).

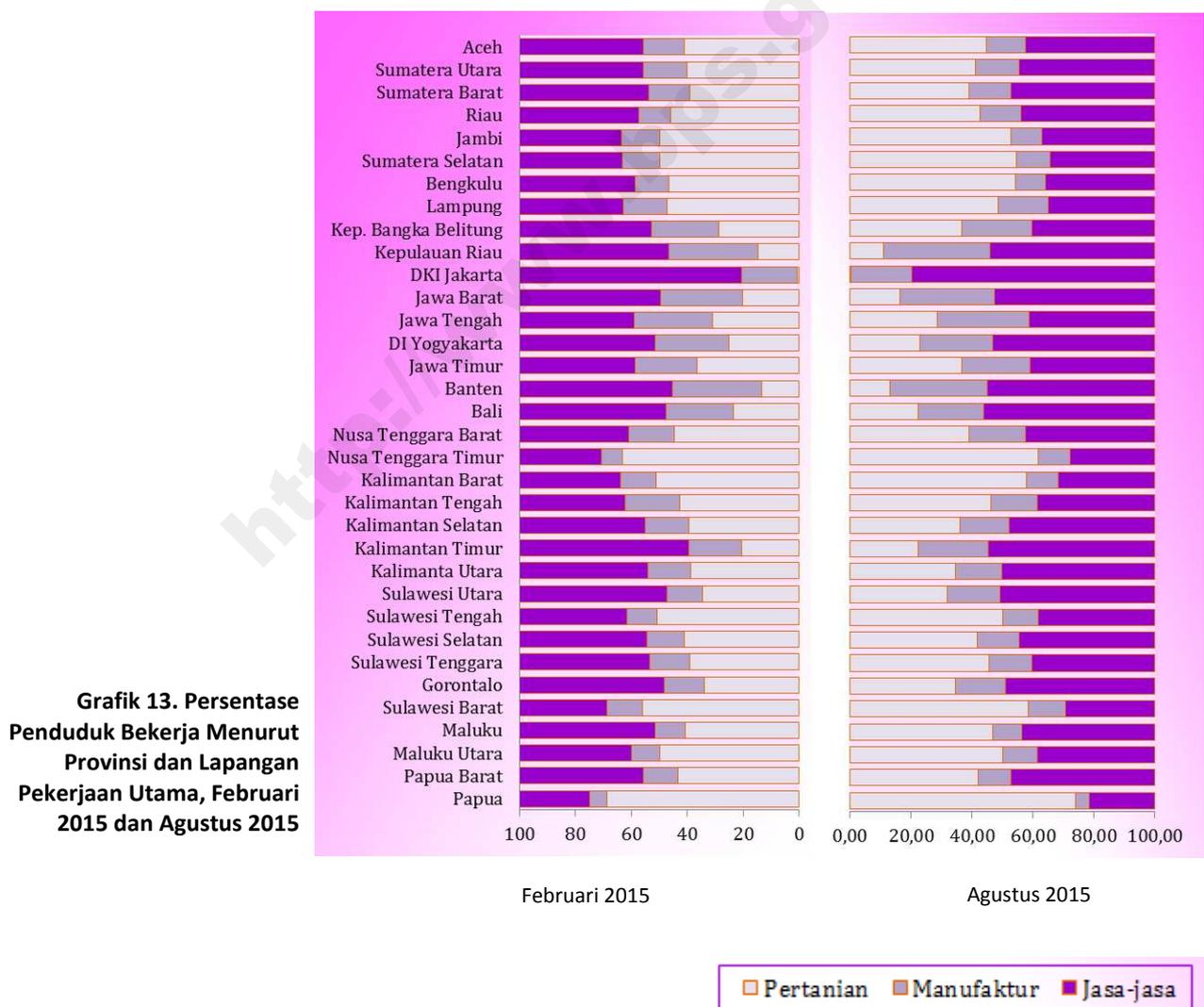
Jika dilihat pada periode Februari 2015-Agustus 2015, sektor jasa-jasa mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin, sektor manufaktur mengalami kenaikan sebesar 0,47 persen poin, sedangkan sektor pertanian juga mengalami penurunan sebesar 0,32 persen poin.

Sedangkan pada periode Sakernas Agustus 2014-Agustus 2015, sektor pertanian mengalami penurunan sebesar 1,12 persen poin, sedangkan sektor manufaktur dan sektor jasa-jasa mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,68 persen poin dan 0,44 persen poin.

“Pada Februari 2015 dan Agustus 2015, provinsi dengan persentase tertinggi yang penduduknya bekerja di sektor pertanian adalah Papua”

Komposisi sektoral Sakernas Agustus 2015 menurut provinsi menunjukkan bahwa provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor pertanian adalah Provinsi Papua (73,93 persen), provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor manufaktur adalah Provinsi Kepulauan Riau (35,00 persen) dan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor jasa-jasa adalah Provinsi DKI Jakarta (79,68 persen).

Kondisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 dimana pada sektor pertanian Provinsi Papua masih mendominasi yaitu 68,76 persen, sektor manufaktur oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 32,03 persen, dan sektor jasa-jasa oleh Provinsi DKI Jakarta sebesar 79,58 persen, lihat Grafik 13 dan Lampiran 11.

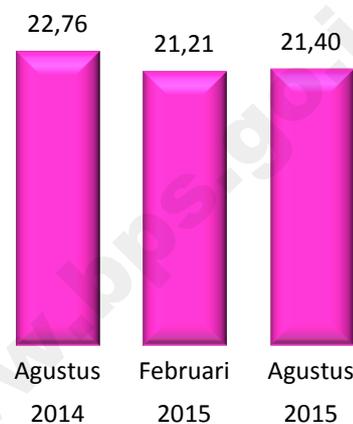


KILM 5. PEKERJA PARUH WAKTU

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang bekerja, serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja perusahaan. Mengukur tingkat dan tren jam kerja di masyarakat untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup, maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi. Indikator pekerja paruh waktu terfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari *full time*, sebagai persentase dari total penduduk bekerja.

“ Tingkat pekerja paruh waktu 21,40 persen ”

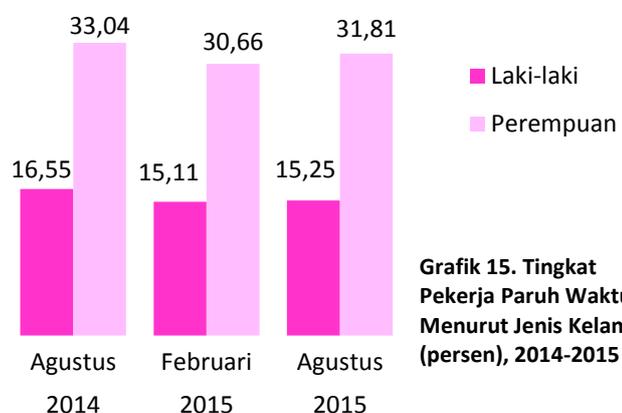
Pada Agustus 2015, tingkat pekerja paruh waktu mencapai 21,40 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa dari 100 orang yang bekerja, terdapat sekitar 21 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Tingkat pekerja paruh waktu ini mengalami sedikit kenaikan bila dibanding Februari 2015 yaitu sebesar 0,19 persen poin, namun mengalami penurunan sebesar 1,36 persen poin bila dibanding Agustus 2014.



Grafik 14. Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015

“ Tingkat pekerja paruh waktu perempuan lebih tinggi dari pada tingkat pekerja paruh waktu laki-laki ”

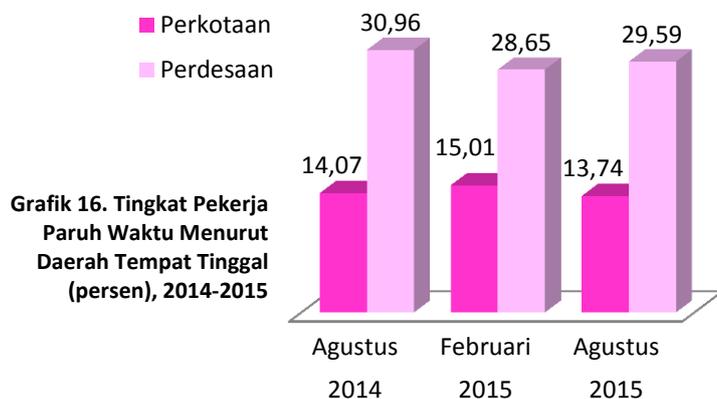
Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa tingkat pekerja paruh waktu perempuan mencapai hampir dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan tingkat pekerja paruh waktu laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 31,81 persen dan 15,25 persen. Sejalan dengan tingkat pekerja paruh waktu secara nasional, apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2015, tingkat pekerja paruh waktu perempuan pada Agustus 2015



Grafik 15. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015

mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen poin, sementara bila dibanding keadaan Agustus 2014 mengalami penurunan sebesar 1,23 persen poin.

“ Tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan mengalami penurunan, sementara di perdesaan terjadi sebaliknya ”



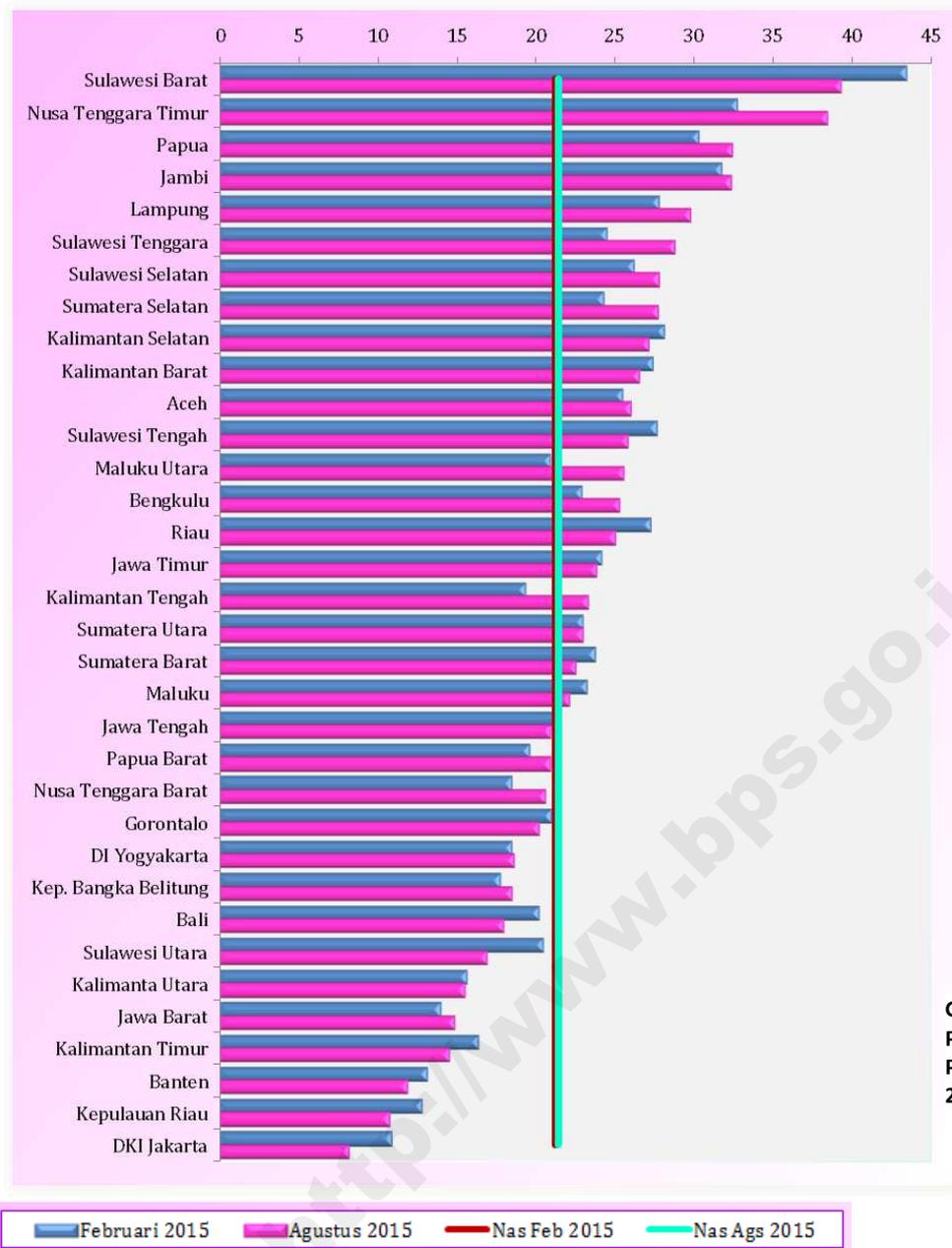
Grafik 16. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015

Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerah, tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan pada Agustus 2015, sebesar 13,74 persen sementara di perdesaan mencapai 29,59 persen. Jika dibandingkan periode Februari 2015 maupun Agustus 2014 terjadi penurunan tingkat pekerja paruh waktu di perkotaan yaitu masing-masing sebesar 1,27 dan 0,33 persen poin. Sedangkan di perdesaan mengalami kenaikan bila

dibandingkan Februari 2015 (naik 0,94 persen poin), namun turun jika dibanding Agustus 2014 (turun 1,37 persen poin).

“ Provinsi Sulawesi Barat memiliki tingkat pekerja paruh waktu tertinggi ”

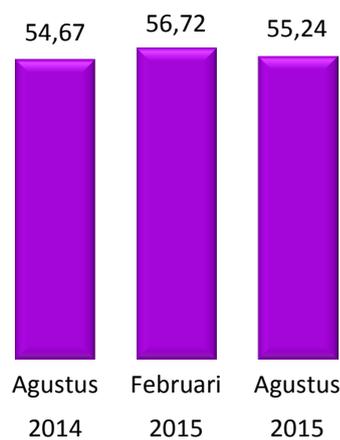
Merujuk hasil Sakernas Agustus 2015 (Grafik 17; Lampiran 12), tingkat pekerja paruh waktu tertinggi diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (39,29 persen), posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (38,40 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Papua (32,38 persen). Sementara berdasarkan Sakernas Februari 2015 posisi tertinggi juga diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (43,42 persen), posisi kedua diduduki oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (32,73 persen), dan posisi ketiga diduduki oleh Provinsi Jambi (31,71 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Agustus 2015 adalah Provinsi DKI Jakarta (8,18 persen), Kepulauan Riau (10,74 persen) dan Banten (11,88 persen). Ketiga provinsi tersebut juga menjadi provinsi dengan tingkat pekerja paruh waktu terendah pada Februari 2015.



Grafik 17. Tingkat Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015

“ Share perempuan pada pekerja paruh waktu sebesar 55,24 persen ”

Share perempuan pada pekerja paruh waktu berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 55,24 persen, atau dapat diartikan bahwa dari 100 pekerja paruh waktu, sekitar 55 orang diantaranya adalah perempuan. Share perempuan pada pekerja paruh waktu periode Agustus 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan



Grafik 18. Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen), 2014-2015

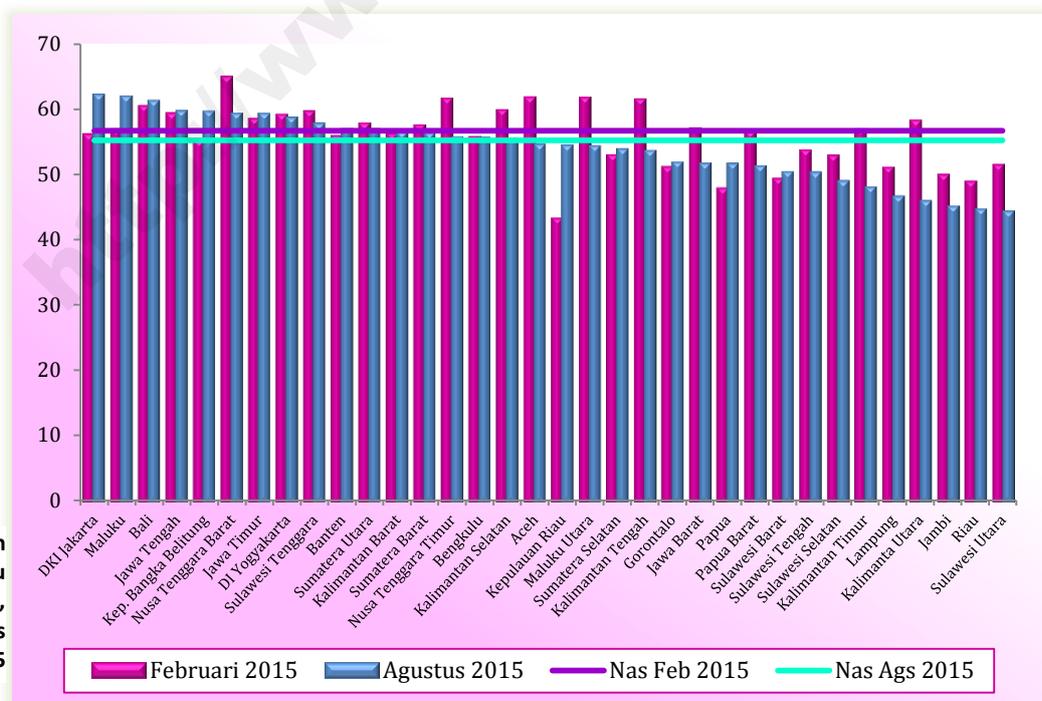
dengan keadaan Februari 2015 sebesar 1,48 persen poin dan mengalami kenaikan dari keadaan Agustus 2014 sebesar 0,57 persen poin.

“ DKI Jakarta adalah provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi ”

Grafik 19 dan Lampiran 12 menunjukkan *share* perempuan terhadap pekerja paruh waktu menurut provinsi. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa provinsi dengan *share* perempuan pada pekerja paruh waktu tertinggi pada Agustus 2015 terdapat di Provinsi DKI Jakarta (62,15 persen), Provinsi Maluku (61,90 persen) dan Bali (61,23 persen). Sedangkan pada periode Februari 2015 terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (64,80 persen), Provinsi Aceh (61,65 persen) dan Maluku Utara (61,63 persen).

Sebaliknya provinsi dengan *share* perempuan terhadap pekerja paruh waktu terendah berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 secara berturut-turut adalah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 44,25 persen, Provinsi Riau sebesar 44,61 persen, dan Provinsi Jambi sebesar 45,07 persen. Sementara pada Februari 2015 posisi ini secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau sebesar 43,17 persen, Provinsi Papua sebesar 47,73 persen, dan Provinsi Riau sebesar 48,79 persen.

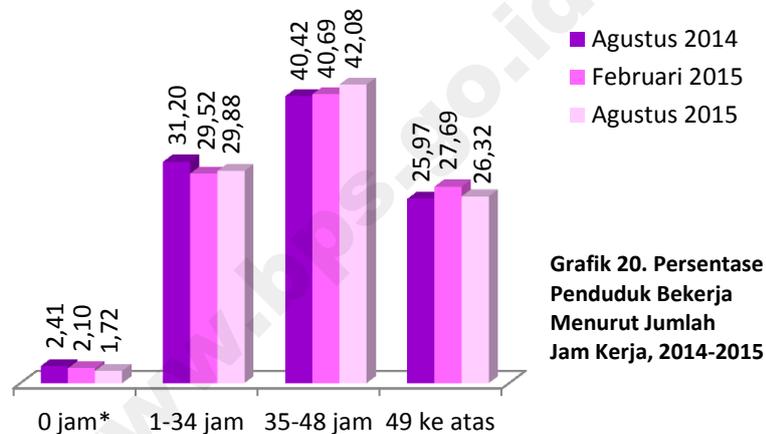
Grafik 19. *Share* Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi (persen), Februari 2015 dan Agustus 2015



KILM 6. PENDUDUK YANG BEKERJA MENURUT JUMLAH JAM KERJA

“ Mayoritas penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu”

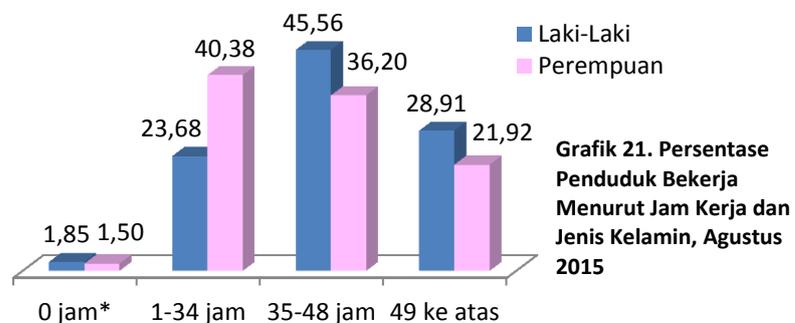
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, sebagian besar penduduk bekerja di atas 35 jam per minggu, yang mencapai hampir dua pertiga dari total penduduk yang bekerja. Sementara itu penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu mencapai 31,60 persen dan mengalami penurunan baik jika dibandingkan dengan Februari 2015 (31,62 persen) dan Agustus 2014 (33,61 persen), masing-masing sebesar 0,02 persen poin dan 2,01 persen poin. Secara nasional, persentase tertinggi penduduk bekerja pada Agustus 2015 berdasarkan jam kerja terdapat pada kelompok jam kerja 40–48 jam per minggu yaitu mencapai 32,22 persen. Selain itu masih banyak pula penduduk yang bekerja di atas 48 jam per minggu yaitu sekitar 26,32 persen (lihat Lampiran 13).



Grafik 20. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja, 2014-2015

“ Penduduk perempuan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu daripada laki-laki ”

Dapat dicermati pula pada Grafik 21, pada Agustus 2015 secara umum menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk perempuan yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk laki-laki. Persentase penduduk perempuan yang jam kerjanya di bawah 35 jam per minggu mencapai 41,88 persen, sementara persentase pada laki-laki dengan kategori jam kerja yang sama hanya sebesar 25,53 persen.



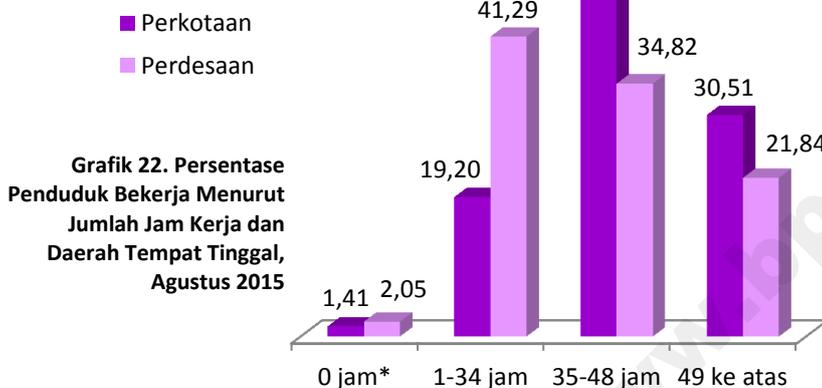
Grafik 21. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Jam Kerja dan Jenis Kelamin, Agustus 2015

Sedangkan untuk jam kerja di atas 48 jam per minggu persentase laki-laki cenderung lebih tinggi dibandingkan persentase perempuan yang bekerja pada kategori yang sama. Sakernas Agustus 2015 menunjukkan persentase penduduk perempuan yang bekerja di atas 48 jam per minggu sebesar 21,92 persen, sementara persentase penduduk laki-laki mencapai 28,91 persen.

“ Penduduk perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan”

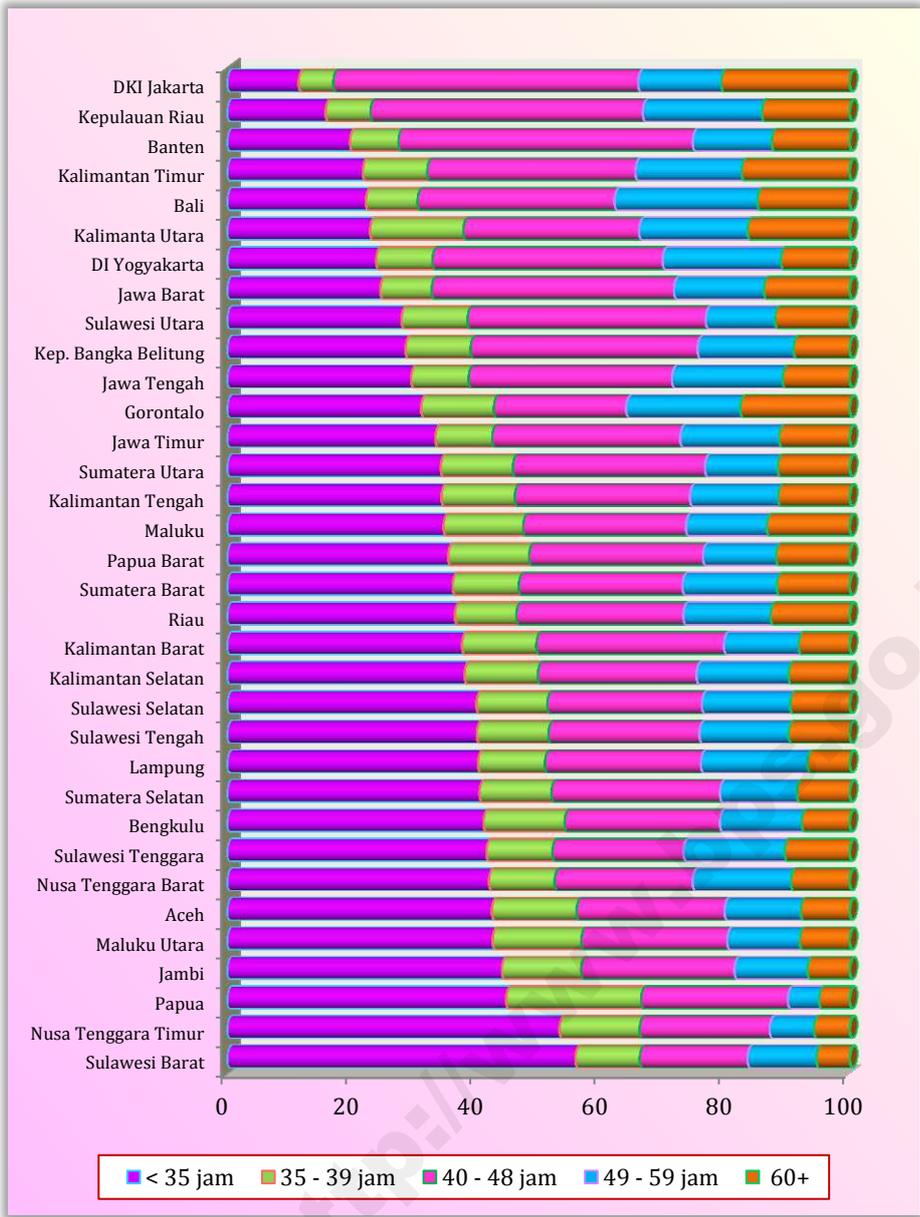
Apabila diamati lebih lanjut, terdapat perbedaan karakteristik menurut jam kerja antara penduduk yang bekerja di perdesaan dan di perkotaan. Penduduk di

perdesaan lebih banyak yang bekerja di bawah 35 jam per minggu dibanding penduduk perkotaan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, persentase penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam per minggu) di daerah perdesaan mencapai 43,34 persen sementara di perkotaan hanya sebesar 20,61 persen.



“Provinsi dengan persentase penduduk yang bekerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Barat”

Berdasarkan Sakernas Agustus 2015 seperti yang terlihat pada Grafik 23 dan Lampiran 14, menunjukkan bahwa tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja dengan jam kerja di bawah 35 jam per minggu tertinggi yaitu Provinsi Sulawesi Barat (55,96 persen), Nusa Tenggara Timur (53,41 persen), dan Papua (44,84 persen). Sebaliknya tiga provinsi dengan persentase penduduk bekerja di bawah 35 jam seminggu yang terendah, yaitu Provinsi DKI Jakarta (11,50 persen), Kepulauan Riau (15,84 persen), dan Banten (19,75 persen).



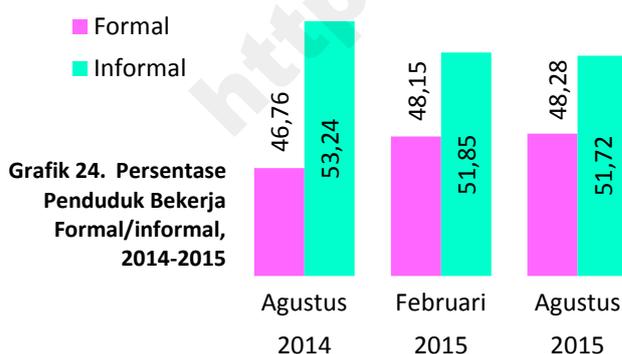
Grafik 23. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, Agustus 2015

KILM 7. PENDUDUK YANG BEKERJA DI SEKTOR INFORMAL

Sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. ICLS ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri dari semua orang yang selama periode acuan tertentu bekerja setidaknya di satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan tersebut baik merupakan pekerjaan utama maupun sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

“Mayoritas penduduk di Indonesia bekerja di sektor informal yaitu 51,72 persen”

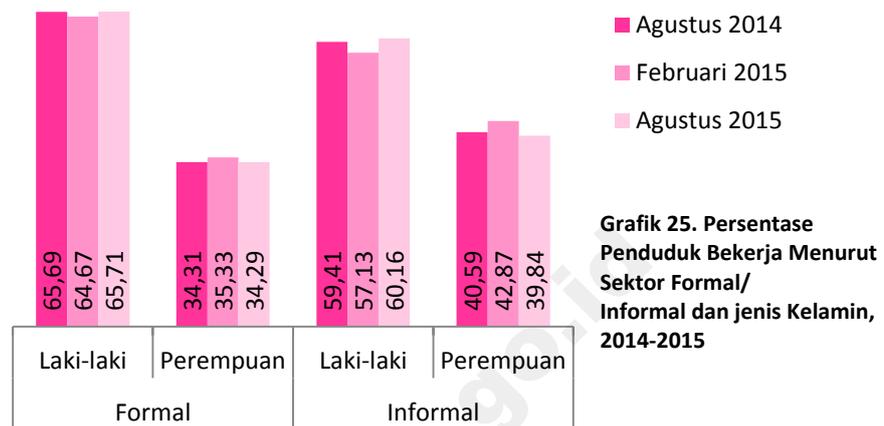
Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa dari 114,82 juta orang yang bekerja, sebanyak 51,72 persen merupakan penduduk yang bekerja di sektor informal (59,38 juta orang). Pada periode Agustus 2014, serta Februari dan Agustus 2015 tampak adanya penurunan persentase penduduk bekerja di sektor informal, sesuai dengan usaha pemerintah untuk terus menumbuhkan pekerjaan di sektor formal. Persentase penduduk bekerja di sektor informal pada



Agustus 2014 sebesar 53,24 persen, turun menjadi 51,85 persen pada Februari 2015, dan kembali turun pada Agustus 2015 menjadi 51,72 persen. Sedangkan persentase sektor formal pada Agustus 2014 mencapai 46,76 persen, naik menjadi 48,15 persen pada Februari 2015, dan naik pada Agustus 2015 hingga mencapai 48,28 persen.

“Sektor formal masih didominasi laki-laki”

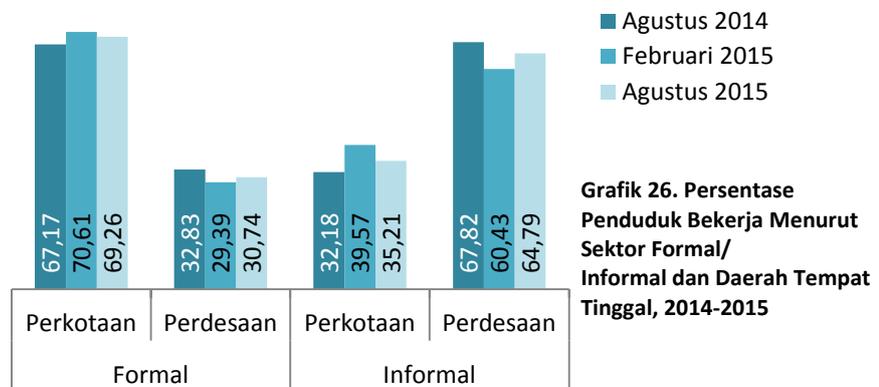
Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa sektor formal masih didominasi kaum laki-laki, yang mencapai 65,71 persen (hampir dua pertiga bagian), sedangkan pada Februari 2015 dan Agustus 2014 masing-masing mencapai 64,67 persen dan 65,69 persen. Sementara pada sektor informal kaum laki-laki juga mendominasi tetapi dengan perbedaan yang tidak terlalu besar. Pada Agustus 2015 persentase penduduk informal yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 60,16 persen sedangkan perempuan sebesar 39,84 persen.



Grafik 25. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan jenis Kelamin, 2014-2015

“Pekerja di sektor informal lebih banyak tinggal di daerah perdesaan ”

Berdasarkan Sakernas Agustus 2015 seperti yang tampak pada Grafik 26 menunjukkan bahwa penduduk bekerja pada sektor formal yang tinggal di perkotaan mencapai 69,26 persen. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 yang mencapai 70,61 persen (turun 1,35 persen poin), akan tetapi jika dibandingkan Agustus 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,09 persen poin. Di sisi lain, persentase penduduk yang bekerja pada sektor informal yang lebih mendominasi adalah daerah perdesaan, dan mengalami penurunan bila dibanding keadaan setahun yang lalu, yaitu dari 67,82 persen pada Agustus 2014 turun menjadi 64,79 persen pada Agustus 2015.

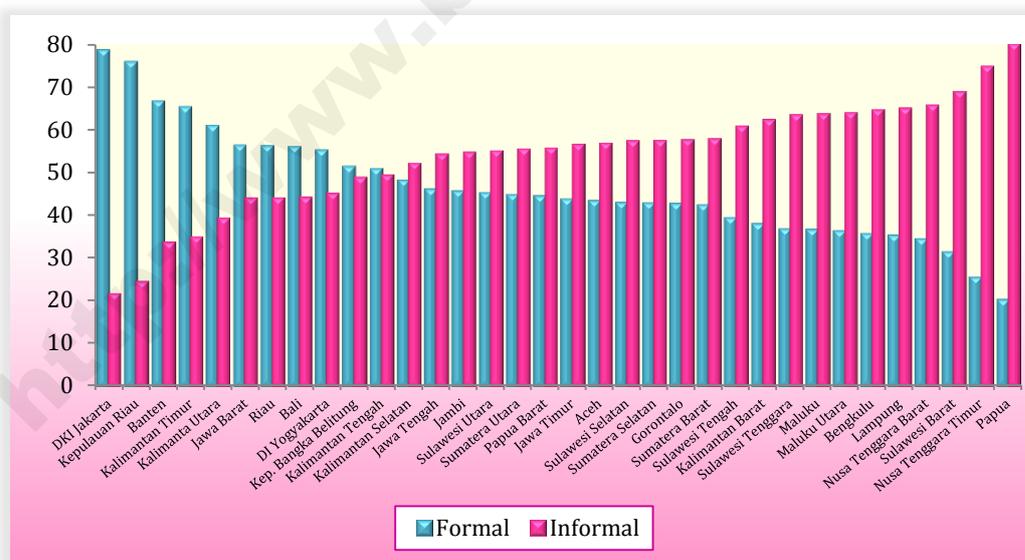


Grafik 26. Persentase Penduduk Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Daerah Tempat Tinggal, 2014-2015

“Provinsi Papua merupakan provinsi dengan persentase tertinggi penduduk bekerja di sektor informal ”

Apabila diamati berdasarkan perbedaan wilayah per provinsi, ternyata provinsi yang mendominasi sektor formal lebih banyak berada di wilayah barat Indonesia (lihat Grafik 27 dan Lampiran 15). Lima peringkat pertama provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor formal, tiga diantaranya berada di wilayah barat Indonesia, yaitu Provinsi DKI Jakarta (78,51 persen), Kepulauan Riau (75,77 persen), dan Banten (66,54 persen), sementara provinsi yang tidak terletak di wilayah barat Indonesia adalah Kalimantan Timur (65,23 persen) dan Kalimantan Utara (60,86 persen). Sementara itu di sisi lain, lima provinsi dengan persentase tertinggi penduduk yang bekerja di sektor informal secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Papua (79,96 persen), Nusa Tenggara Timur (74,70 persen), Sulawesi Barat (68,78 persen), Nusa Tenggara Barat (65,67 persen), dan Lampung (64,90 persen).

Grafik 27. Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Sektor Formal/ Informal dan Provinsi, Agustus 2015



BAB 3 INDIKATOR PENGANGGURAN

KILM 8. PENGANGGURAN

“Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia sebesar 6,18 persen ”

Seperti yang terlihat pada Tabel 3, TPT berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 mencapai 6,18 persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja di Indonesia, terdapat sebanyak 6 orang yang masuk kategori penganggur. Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa TPT di Indonesia cenderung mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 dan Februari. Seperti yang tampak pada Tabel 3, TPT Agustus 2015 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,37 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2015 (5,81 persen), dan 0,24 persen poin dibandingkan Agustus 2014 (5,94 persen).

Tabel 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen), 2014–2015

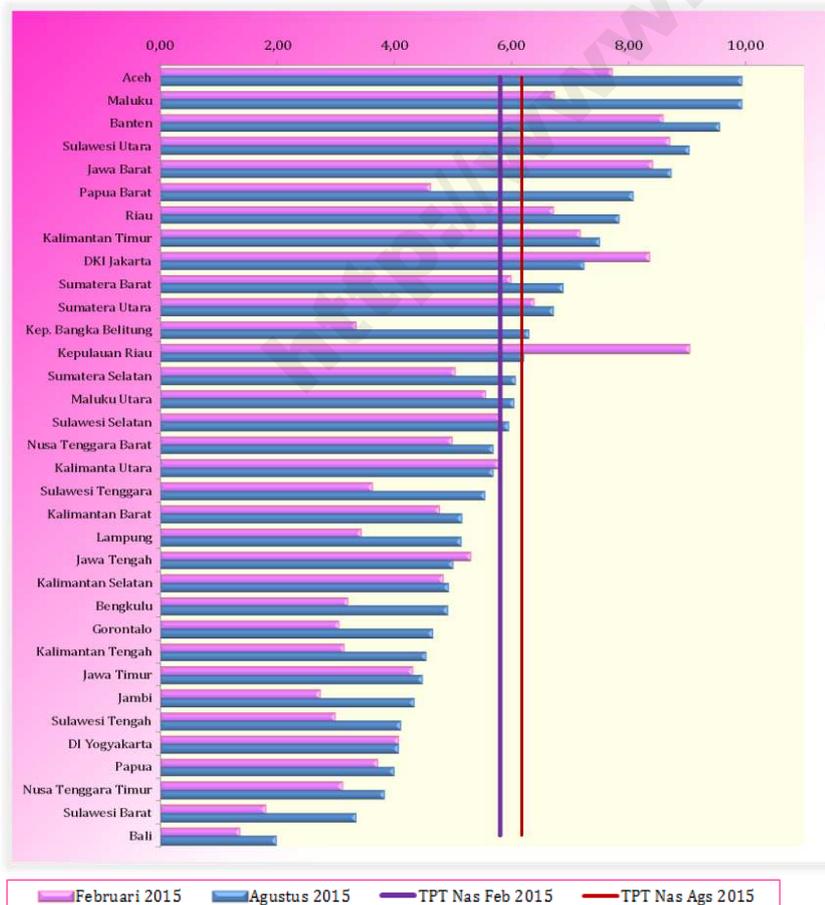
TPT	2014		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	
Total	5,94	5,81	6,18	6,18
Laki-laki	5,75	5,76	6,07	6,07
Perempuan	6,26	5,89	6,37	6,37
Perkotaan	7,12	7,02	7,31	7,31
Perdesaan	4,81	4,32	4,93	4,93

Seiring peningkatan TPT secara nasional baik bila dibandingkan dengan Sakernas Februari 2015 maupun Agustus 2014, TPT berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan adanya peningkatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Sebagai gambaran, TPT perempuan pada periode Agustus 2015 dibandingkan Februari 2015 dan Agustus 2014 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,48 persen poin dan 0,11 persen poin. Sementara pada kelompok laki-laki terdapat kenaikan masing-masing sebesar 0,31 persen poin dan 0,32 persen poin. Adanya kenaikan TPT juga ditunjukkan berdasarkan perbedaan wilayah tempat tinggal pada periode yang sama. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, kenaikan TPT di daerah perkotaan mencapai 0,29 persen poin bila dibanding

Februari 2015, dan naik sebesar 0,19 persen poin bila dibanding kondisi setahun yang lalu (Agustus 2014). Begitu pula TPT di daerah perdesaan apabila dibandingkan dengan periode yang sama juga mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,61 persen poin dan 0,12 persen poin.

“TPT tertinggi ada di Provinsi Aceh, Maluku, dan Banten”

Hasil Sakernas Agustus 2015 menunjukkan bahwa TPT tertinggi menurut provinsi secara berturut-turut diduduki oleh Provinsi Aceh (9,93 persen), Provinsi Maluku (9,93 persen), dan Provinsi Banten (9,55 persen). Sementara hasil Sakernas Februari 2015, posisi ini diduduki oleh Provinsi Kepulauan Riau (9,05 persen), Provinsi Sulawesi Utara (8,69 persen), dan Provinsi Banten (8,58 persen). Sebaliknya, provinsi dengan TPT terendah pada Agustus 2015 diduduki oleh Provinsi Bali (1,99 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (3,35 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Nusa Tenggara Timur (3,83 persen). Sedangkan pada Februari 2015 peringkat ini diduduki oleh Provinsi Bali (1,37 persen), kemudian posisi kedua diduduki oleh Provinsi Sulawesi Barat (1,81 persen), dan posisi ketiga diduduki Provinsi Jambi (2,73 persen). Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik 28 dan Lampiran 16.



Grafik 28. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi (persen), Agustus 2015 dan Februari 2015

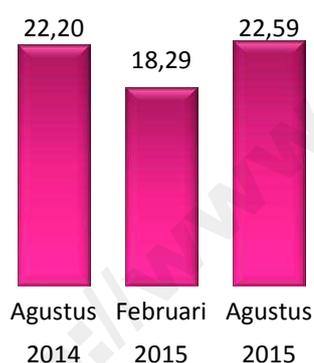
KILM 9. PENGANGGURAN PADA KELOMPOK UMUR MUDA

Penganggur pada kelompok umur muda merupakan masalah kebijakan yang penting bagi banyak negara yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas. Indikator pengangguran kaum muda disajikan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tingkat pengangguran kaum muda;
- 2) Tingkat pengangguran kaum muda sebagai persentase dari tingkat pengangguran dewasa;
- 3) *Share* pengangguran kaum muda terhadap total penganggur;
- 4) Pengangguran kaum muda sebagai proporsi dari populasi kaum muda.

"TPT kelompok umur muda masih cukup tinggi"

Grafik 29. TPT Penduduk Umur Muda (persen), 2014-2015

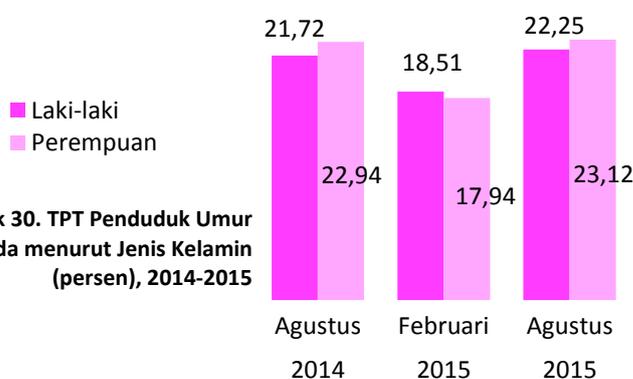


Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 TPT penduduk pada kelompok umur muda mencapai 22,59 persen, yang dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk berumur 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, terdapat sekitar 23 orang yang menganggur. Angka tersebut naik sebesar 4,30 persen poin bila dibandingkan dengan hasil Sakernas

Februari 2015 dan naik sebesar 0,39 persen poin apabila dibandingkan Agustus 2014 (Grafik 29).

"TPT kelompok umur muda lebih tinggi pada perempuan dibanding laki-laki"

Grafik 30. TPT Penduduk Umur Muda menurut Jenis Kelamin (persen), 2014-2015



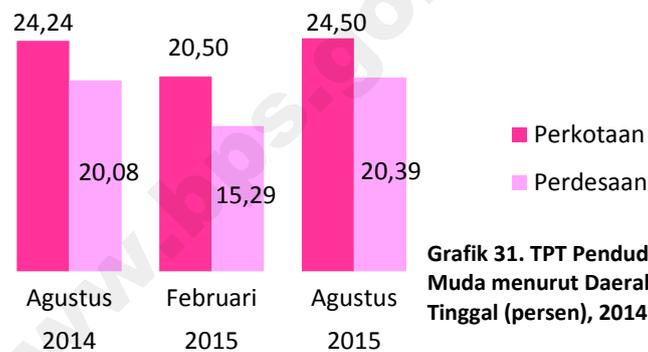
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, pada periode Agustus baik 2014 maupun 2015, TPT penduduk umur muda pada perempuan cenderung lebih tinggi daripada laki-laki. Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada laki-laki umur 15–24 tahun lebih banyak yang tidak terserap pada pasar tenaga kerja daripada perempuan di umur yang sama. Akan tetapi, pada

Februari 2015, TPT penduduk umur muda laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Mengamati lebih lanjut TPT penduduk umur muda berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa keadaan TPT umur muda pada Agustus 2015 mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 maupun Agustus 2014. Jika dibandingkan dengan Februari 2015, peningkatan TPT pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. TPT umur muda perempuan mengalami peningkatan sebesar 5,18 persen poin, sedangkan laki-laki hanya sebesar 3,74 persen poin.

“TPT kelompok umur muda lebih tinggi di wilayah perkotaan dibanding perdesaan”

Sementara itu, bila ditinjau berdasarkan klasifikasi daerah tempat tinggal, pada kelompok umur muda memperlihatkan bahwa pola TPT daerah perkotaan lebih tinggi daripada di daerah perdesaan. Seperti pada Agustus 2015, TPT daerah perkotaan mencapai 24,50 persen, sementara di daerah perdesaan sebesar 20,39 persen. Hal tersebut bisa diartikan bahwa dari 100 penduduk usia 15–24 tahun yang termasuk angkatan kerja, untuk daerah perkotaan terdapat sekitar 24 orang yang menganggur, sementara untuk daerah perdesaan sekitar 20 orang.



Grafik 31. TPT Penduduk Umur Muda menurut Daerah Tempat Tinggal (persen), 2014-2015

“TPT kelompok umur muda hampir delapan kali lipat lebih tinggi daripada TPT dewasa”

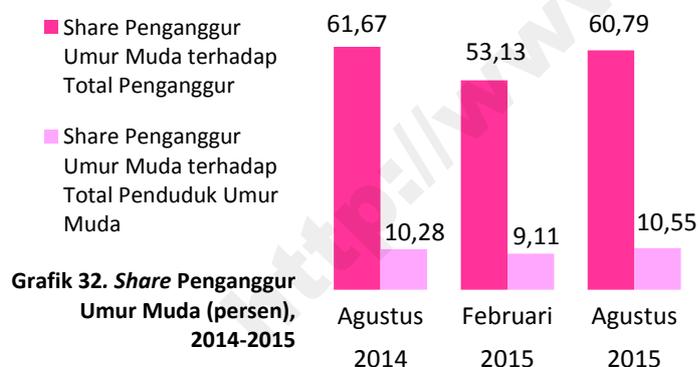
Rasio TPT umur muda terhadap TPT dewasa pada Agustus 2015 sebesar 7,78 yang dapat diartikan bahwa TPT umur muda delapan kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT dewasa. Sejalan dengan peningkatan TPT umur muda pada Agustus 2015 bila dibandingkan dengan Februari 2015, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa juga mengalami peningkatan sebesar 2,20 poin, sementara jika dibandingkan dengan Agustus 2014 rasio tersebut terlihat turun sebesar 0,35 poin. Apabila dibedakan menurut jenis kelamin, pada periode Agustus baik 2014 maupun 2015, rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk

dewasa pada perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki. Sementara pada Februari 2015 kondisi terbalik yaitu rasionya lebih tinggi pada laki-laki. Menurut kategori kota-desa maka rasio ini cenderung lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan di daerah perkotaan baik pada Agustus 2014 maupun pada tahun 2015. Sebagai contoh, pada Agustus 2015 rasio TPT umur muda terhadap TPT penduduk dewasa di perkotaan sebesar 6,48 sementara di perdesaan mencapai 10,41.

Tabel 4. Indikator Pengangguran Umur Muda di Indonesia, 2014–2015

Indikator	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	8,13	5,58	7,78
Laki-laki	8,10	5,84	7,51
Perempuan	8,16	5,21	8,24
Perkotaan	6,77	4,95	6,48
Perdesaan	10,47	6,87	10,41

“Share penganggur umur muda terhadap total penganggur 60,79 persen sementara *share* penganggur terhadap total penduduk umur muda 10,55 persen”



Share penganggur umur muda terhadap total penganggur berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 cukup tinggi yaitu 60,79 persen. Angka ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2015, dari 100 orang penganggur terdapat sejumlah 61 orang penganggur yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Seperti yang terlihat

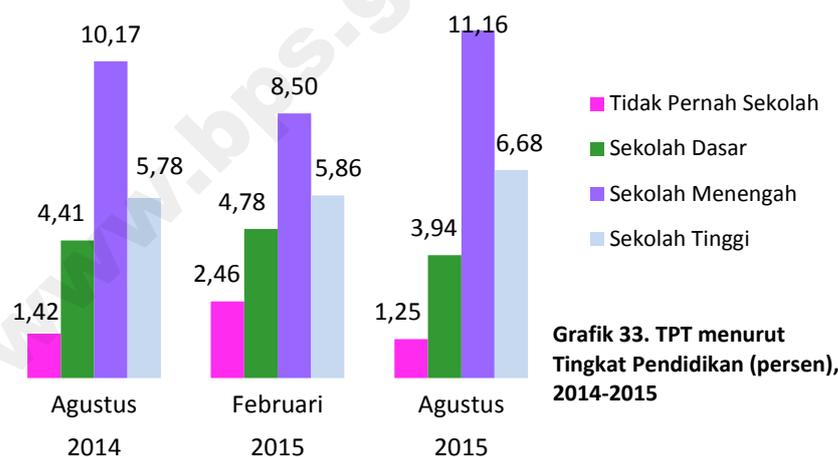
pada Grafik 32, angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,66 persen poin bila dibandingkan dengan Februari 2015 (53,13 persen). Namun mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan Agustus 2014 yaitu sebesar 0,88 persen poin. Sementara itu, *share* penganggur umur muda terhadap total penduduk umur muda pada Agustus 2015 sebesar 10,55 persen, hal ini dapat diartikan bahwa pada Agustus 2015 dari 100 penduduk umur muda hampir 11 orang diantaranya merupakan penganggur yang berumur 15 sampai 24 tahun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan angka Februari 2015 (9,11 persen) maupun jika dibandingkan dengan angka Agustus 2014 (10,28 persen).

KILM 11. PENGANGGURAN DAN PENDIDIKAN

Indikator ini bertujuan untuk melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk yang bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi yang diberikan dapat memiliki implikasi penting bagi penduduk yang bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah berada pada risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Selain itu, apabila *share* pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi.

“TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada Sekolah Menengah”

Secara umum, berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan terdapat pada pendidikan sekolah menengah yaitu sebesar 11,16 persen, sementara yang terendah justru pada kelompok tidak pernah sekolah atau tidak pernah mengenyam bangku sekolah dengan TPT sebesar 1,25 persen.



Grafik 33. TPT menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015

“Dibanding kondisi Februari 2015 terjadi peningkatan TPT terutama pada pendidikan Sekolah Menengah”

Sejalan dengan TPT nasional yang cenderung mengalami peningkatan selama periode Februari 2015-Agustus 2015, peningkatan TPT menurut pendidikan terlihat terutama pada pendidikan Sekolah Menengah yaitu sebesar 2,66 persen poin. Penurunan TPT terjadi pada tidak pernah sekolah dan pendidikan dasar yaitu masing-masing sebesar 1,21 persen poin dan 0,84 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT periode Agustus 2015 pada tingkat pendidikan sekolah menengah dibandingkan dengan Februari 2015 tampak lebih nyata terjadi pada perempuan. Peningkatan TPT sekolah menengah pada perempuan sebesar 3,94 persen poin, sedangkan pada laki-laki hanya sebesar

2,06 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi peningkatan TPT Sekolah Menengah baik di daerah perdesaan maupun perkotaan masing-masing sebesar 3,96 persen poin dan 2,09 persen poin.

Tabel 5. Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan (persen), 2014-2015

Tingkat Pendidikan (1)	2014	2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Total	5,94	5,81	6,18
Tidak Pernah Sekolah	1,42	2,46	1,25
Laki-laki	1,74	1,89	1,67
Perempuan	1,19	2,85	0,93
Perkotaan	3,06	4,44	2,46
Perdesaan	0,97	1,54	0,86
Sekolah Dasar	4,41	4,78	3,94
Laki-laki	4,45	4,87	4,09
Perempuan	4,33	4,65	3,68
Perkotaan	5,50	6,23	4,74
Perdesaan	3,74	3,56	3,38
Sekolah Menengah	10,17	8,50	11,16
Laki-laki	8,99	8,08	10,14
Perempuan	12,65	9,37	13,31
Perkotaan	9,84	8,89	10,98
Perdesaan	10,89	7,60	11,56
Sekolah Tinggi	5,78	5,86	6,68
Laki-laki	5,26	5,01	6,14
Perempuan	6,38	6,80	7,30
Perkotaan	5,84	5,70	6,46
Perdesaan	5,59	6,43	7,46

“Dibanding kondisi Agustus 2014 terjadi peningkatan TPT pada sekolah menengah dan sekolah tinggi”

Sementara itu jika dibandingkan dengan keadaan setahun sebelumnya peningkatan TPT terjadi pada tingkat pendidikan sekolah menengah dan sekolah tinggi yaitu masing-masing sebesar 0,99 persen poin dan 0,90 persen poin.

Berdasarkan jenis kelamin, peningkatan TPT Agustus 2015 pada tingkat pendidikan sekolah menengah dibandingkan dengan Agustus 2014 tampak lebih nyata terjadi pada laki-laki yang mengalami peningkatan sebesar 1,15 persen poin, sedangkan pada perempuan hanya sebesar 0,66 persen poin. Begitu pula berdasarkan klasifikasi kota-desa terjadi peningkatan TPT pada pendidikan sekolah menengah baik di daerah perkotaan maupun perdesaan masing-masing sebesar 1,14 persen poin dan 0,67 persen poin.

“Pada periode Agustus 2014 maupun 2015 persentase penganggur tertinggi terdapat pada tingkat sekolah menengah”

Sementara itu, mengamati komposisi penganggur berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang terlihat pada Tabel 6, memberikan gambaran mengenai tenaga kerja yang tersedia yang tidak terserap berdasarkan tingkat keahlian atau pendidikan mereka. Pada Agustus baik 2015 maupun 2014 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah menengah, sementara pada Februari 2015 menunjukkan bahwa persentase penganggur tertinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar.

Tabel 6. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Tingkat Pendidikan (1)	2014	2015	
	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Tidak Pernah Sekolah	1,03	1,67	0,73
Laki-laki	0,90	0,86	0,69
Perempuan	1,24	2,89	0,80
Perkotaan	0,82	1,43	0,57
Perdesaan	1,34	2,14	1,00
Sekolah Dasar	43,98	47,94	36,38
Laki-laki	46,24	49,16	38,77
Perempuan	40,55	46,09	32,53
Perkotaan	35,48	42,84	28,87
Perdesaan	56,13	58,16	48,56
Sekolah Menengah	45,48	39,39	50,92
Laki-laki	45,21	41,77	50,99
Perempuan	45,90	35,81	50,79
Perkotaan	51,33	43,30	55,97
Perdesaan	37,13	31,57	42,71
Sekolah Tinggi	9,51	11,00	11,97
Laki-laki	7,65	8,21	9,54
Perempuan	12,31	15,21	15,87
Perkotaan	12,37	12,43	14,59
Perdesaan	5,40	8,13	7,72

Pada Agustus 2015, persentase penganggur pada tingkat pendidikan sekolah menengah mencapai 50,92 persen, atau mengalami kenaikan sebesar 11,53 persen poin jika dibandingkan Februari 2015 (39,39 persen), dan naik sebesar 5,44 persen poin bila dibandingkan dengan Agustus 2014 (45,48 persen).

Selama periode Februari 2015 - Agustus 2015, penurunan persentase penganggur berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tingkat pendidikan sekolah dasar dan tidak pernah sekolah dengan penurunan masing-masing sebesar 11,56 persen poin dan 0,94 persen poin. Penurunan persentase penganggur pada

tingkat sekolah dasar dan tidak pernah sekolah terjadi baik menurut jenis kelamin maupun daerah tempat tinggal.

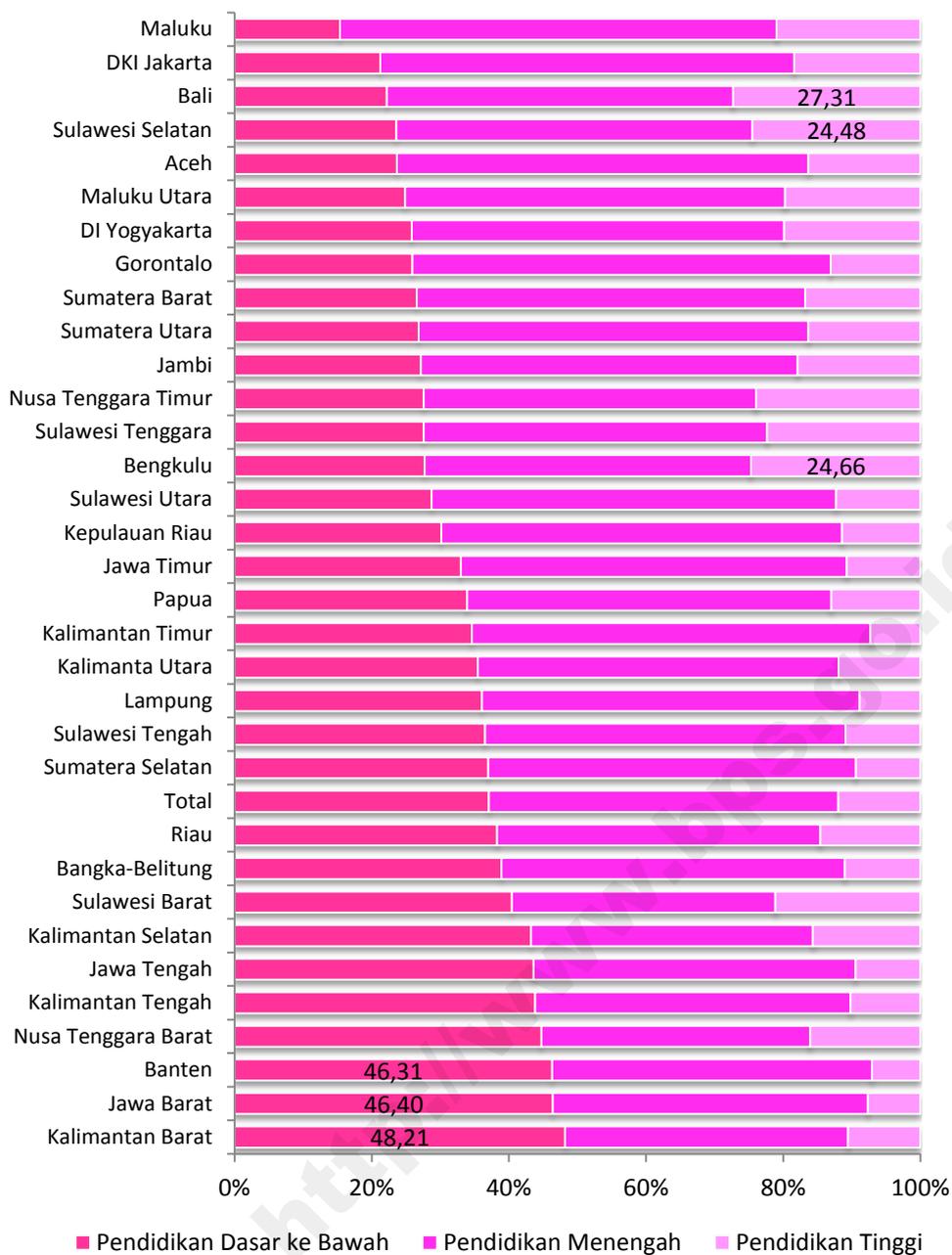
“Presentase penganggur berpendidikan sekolah tinggi pada perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki”

Mengamati lebih lanjut Tabel 6, baik pada keadaan Agustus 2014, maupun tahun 2015 persentase perempuan yang menganggur dengan pendidikan sekolah tinggi lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang menganggur pada tingkat pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Agustus 2015, diantara seluruh penganggur perempuan, yang berpendidikan sekolah tinggi mencapai 15,87 persen, sementara diantara seluruh penganggur laki-laki, yang berpendidikan sekolah tinggi sebesar 9,54 persen.

Apabila dilihat berdasarkan klasifikasi perbedaan wilayah, pada Agustus 2014 dan tahun 2015, persentase penduduk perdesaan yang menganggur dengan jenjang pendidikan tidak pernah bersekolah dan sekolah dasar lebih tinggi daripada persentase penduduk perkotaan pada jenjang pendidikan yang sama. Seperti yang tampak pada Tabel 6, persentase pada Agustus 2015 penduduk perdesaan yang menganggur dengan pendidikan tidak pernah sekolah dan sekolah dasar berturut-turut sebesar 1,00 persen dan 48,56 persen, sementara pada perkotaan hanya mencapai 0,57 persen dan 28,87 persen.

“Kalimantan Barat, Jawa Barat dan Banten adalah tiga provinsi dengan presentase pengangguran berpendidikan rendah paling tinggi”

Grafik 34 menunjukkan urutan provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan rendah pada Agustus 2015, yaitu Provinsi Kalimantan Barat (48,21 persen), Provinsi Jawa Barat (46,40 persen) dan Provinsi Banten (46,31 persen). Sedangkan tiga provinsi dengan persentase pengangguran yang didominasi oleh mereka yang berpendidikan tinggi secara berturut-turut yaitu Provinsi Bali (27,31 persen), Provinsi Bengkulu (24,66 persen) dan Provinsi Sulawesi Selatan (24,48 persen).



Grafik 34. Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan dan Provinsi, 2014-2015

KILM 12. SETENGAH PENGANGGUR (*UNDEREMPLOYMENT*)

Penduduk yang dikategorikan sebagai setengah penganggur adalah mereka yang jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (kurang dari 35 jam dalam seminggu), dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan tambahan.

“Jumlah setengah penganggur di Indonesia mencapai 9,74 juta orang, dan mengalami penurunan dibanding Februari 2015”

Jumlah setengah penganggur di Indonesia berdasarkan Sakernas Agustus 2015, mencapai 9,74 juta orang (Tabel 7), yang terdiri dari 6,08 juta orang berjenis kelamin laki-laki dan sisanya sebanyak 3,66 juta orang adalah perempuan. Sedangkan menurut klasifikasi desa-kota, pada Agustus 2015, jumlah setengah penganggur di daerah perdesaan mencapai dua kali lipat dibandingkan dengan daerah perkotaan. Jumlah setengah penganggur di perdesaan mencapai 6,50 juta orang, sementara di perkotaan hanya sebanyak 3,24 juta orang.

Tabel 7. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Setengah Penganggur (juta), 2014–2015

Setengah Penganggur	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	9,68	10,04	9,74
Laki-laki	6,06	6,07	6,08
Perempuan	3,62	3,97	3,66
Perkotaan	2,99	3,78	3,24
Perdesaan	6,69	6,26	6,50

Pada periode Sakernas Agustus 2015 menunjukkan adanya penurunan jumlah setengah penganggur sebanyak 300 ribu orang dibandingkan Februari 2015. Penurunan jumlah setengah penganggur tersebut terjadi hanya pada perempuan yaitu sebanyak 310 ribu orang.

“Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk bekerja cenderung meningkat dibanding periode-periode sebelumnya”

Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja pada Agustus 2015 sebesar 7,96 persen yang berarti dari 100 orang penduduk yang termasuk

dalam angkatan kerja, terdapat sekitar 8 orang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan mereka masih mencari atau menerima pekerjaan.

Tren persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja selama periode Agustus 2014-Agustus 2015 cenderung berfluktuasi. Dari sebesar 7,94 persen pada Agustus 2014 turun menjadi sebesar 7,83 persen pada Februari 2015 dan naik menjadi 7,96 persen pada Agustus 2015 (Tabel 8).

Hal yang sama juga terjadi pada persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja yang juga cenderung berfluktuatif selama periode Agustus 2014-Agustus 2015. Pada Agustus 2014, dari total penduduk bekerja, sekitar 8,45 persen diantaranya setengah penganggur. Kemudian pada Februari 2015 menurun menjadi sebesar 8,31 persen tetapi naik pada Agustus 2015 menjadi sebesar 8,48 persen.

Tabel 8. Indikator Setengah Penganggur, 2014–2015

Indikator	2014	2015	
	Agustus	Februari	Februari
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase setengah penganggur terhadap total angkatan kerja	7,94	7,83	7,96
Laki-laki	7,99	7,79	7,92
Perempuan	7,87	7,89	8,02
Perkotaan	4,99	5,33	5,07
Perdesaan	10,80	10,90	11,13
Persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja	8,45	8,31	8,48
Laki-laki	8,47	8,26	8,43
Perempuan	8,40	8,38	8,57
Perkotaan	5,37	5,74	5,47
Perdesaan	11,34	11,40	11,70

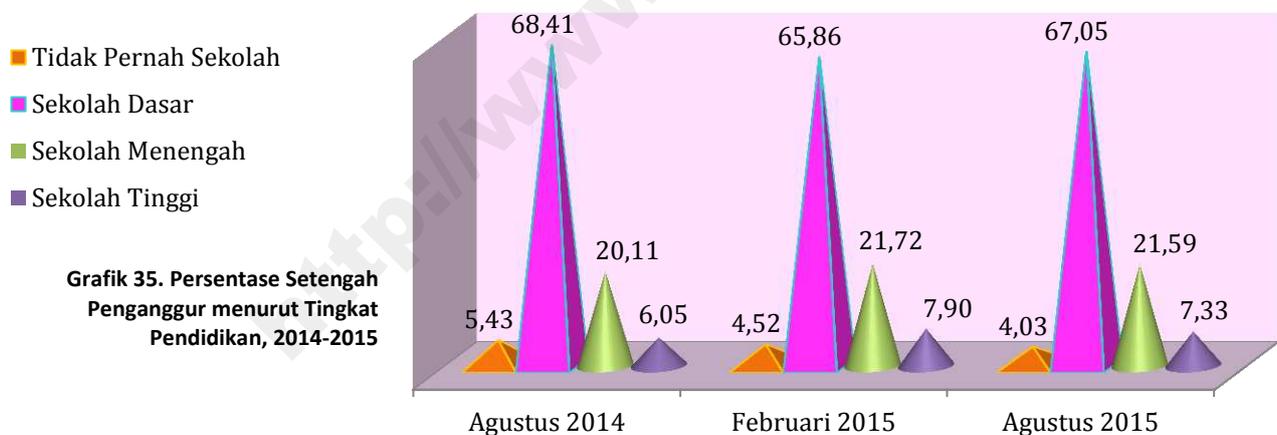
Ditinjau berdasarkan jenis kelamin dibanding keadaan Februari 2015, peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk bekerja terjadi baik pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi peningkatan pada perempuan jauh lebih tinggi daripada laki-laki. Persentase perempuan setengah penganggur terhadap total perempuan bekerja pada Februari 2015 sebesar 8,38 persen naik sebesar 0,19 persen poin menjadi sebesar 8,57 persen pada Agustus 2015. Sedangkan persentase laki-laki setengah penganggur hanya mengalami peningkatan sebesar 0,17 persen poin.

Menilik perbedaan klasifikasi wilayah, selama periode Februari 2015–Agustus 2015 peningkatan persentase setengah penganggur terhadap total penduduk

bekerja terjadi di daerah perdesaan tetapi tidak di perkotaan. Pada Agustus 2015 bila dibandingkan dengan Februari 2015, terjadi peningkatan sebesar 0,30 persen poin di daerah perdesaan, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penurunan sebesar 0,27 persen poin.

“Persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat sekolah dasar 67,05 persen”

Masih merujuk pada hasil Sakernas Agustus 2015, persentase setengah penganggur paling tinggi pada tingkat pendidikan sekolah dasar yaitu sebesar 67,05 persen. Dengan kata lain dari 100 orang setengah penganggur 67 orang diantaranya berpendidikan sekolah dasar. Jika dibandingkan dengan kondisi Februari 2015 terjadi peningkatan persentase setengah penganggur pada tingkat sekolah dasar yaitu sebesar 1,19 persen poin. Peningkatan pada tingkat pendidikan sekolah dasar ini diikuti dengan peningkatan persentase setengah penganggur baik pada jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yaitu masing-masing sebesar 1,53 persen poin dan 0,31 persen poin. Akan tetapi berdasarkan klasifikasi kota-desa peningkatan hanya terjadi di perdesaan sebesar 1,04 persen poin sementara di perkotaan turun sebesar 0,03 persen poin (Tabel 9).



Grafik 35. Persentase Setengah Penganggur menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Tabel 9. Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Tingkat Pendidikan	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak Pernah Sekolah	5,43	4,52	4,03
Laki-laki	3,75	3,29	2,99
Perempuan	8,25	6,39	5,75
Perkotaan	3,21	2,94	2,27
Perdesaan	6,43	5,46	4,90
Sekolah Dasar	68,41	65,86	67,05
Laki-laki	70,44	68,08	69,61
Perempuan	65,02	62,48	62,79
Perkotaan	58,08	58,54	58,51
Perdesaan	73,03	70,28	71,32
Sekolah Menengah	20,11	21,72	21,59
Laki-laki	21,60	23,84	22,45
Perempuan	17,60	18,48	20,16
Perkotaan	27,90	27,15	27,32
Perdesaan	16,62	18,45	18,73
Sekolah Tinggi	6,05	7,90	7,33
Laki-laki	4,21	4,79	4,95
Perempuan	9,13	12,65	11,30
Perkotaan	10,81	11,37	11,91
Perdesaan	3,92	5,81	5,05

KILM 13. TINGKAT KETIDAKAKTIFAN

“Tingkat ketidakaktifan mencapai 34,24 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, tingkat ketidakaktifan di Indonesia mencapai 34,24 persen, artinya dari 100 orang penduduk usia kerja di Indonesia, yang tidak aktif dalam pasar kerja (bukan angkatan kerja) sebanyak 34 orang.

Tingkat ketidakaktifan pada Agustus 2015 meningkat jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2015 maupun Agustus 2014, dengan peningkatan masing-masing sebesar 3,74 persen poin dan 0,84 persen poin. Sejalan dengan dengan peningkatan tingkat ketidakaktifan, jumlah penduduk umur 15 tahun ke atas yang tergolong bukan angkatan kerja juga mengalami peningkatan, sebanyak 7,42 juta orang dari Februari 2015 (56,30 juta orang) ke Agustus 2015 (63,72 juta orang) (Lampiran 20).

Tabel 10. Indikator Ketidakaktifan (persen), 2014–2015

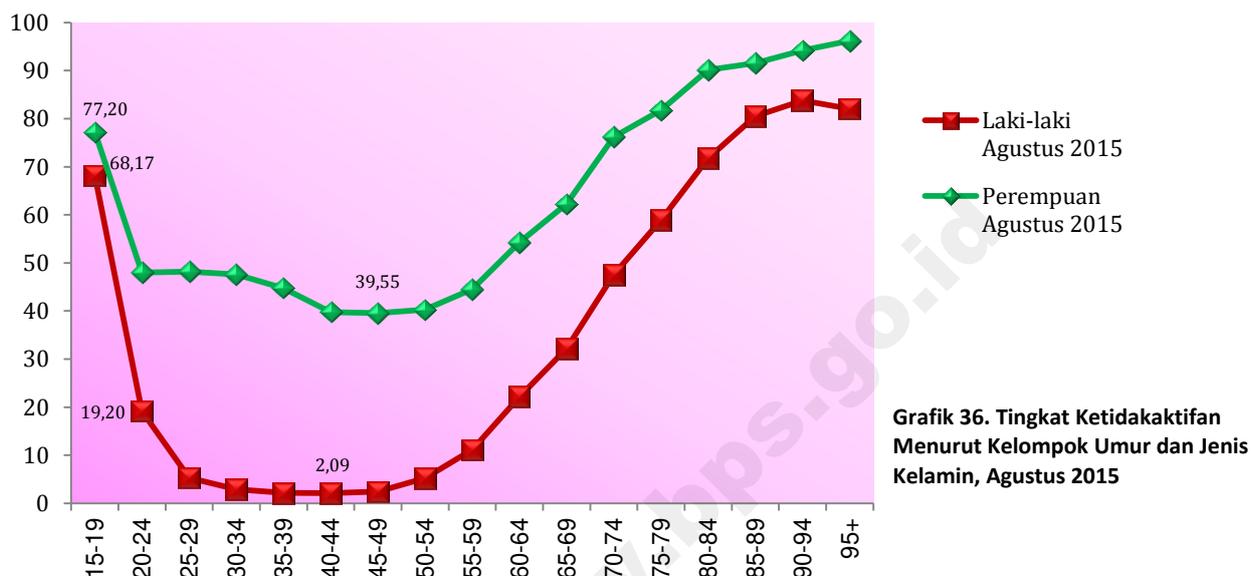
Tingkat ketidakaktifan	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	33,40	30,50	34,24
Laki-laki	16,95	15,42	17,29
Perempuan	49,78	45,52	51,13
Perkotaan	35,53	31,98	36,12
Perdesaan	31,20	28,57	32,05

Apabila dilihat berdasarkan perbedaan jenis kelamin, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan terkait tingkat ketidakaktifan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015 untuk laki-laki, dari seratus orang penduduk usia kerja, yang tidak aktif dalam pasar kerja hanya sejumlah 17 orang, sementara untuk perempuan mencapai sejumlah 51 orang. Apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2015, terjadi peningkatan tingkat ketidakaktifan pada perempuan sebesar 5,61 persen poin, sedangkan pada laki-laki sebesar 1,87 persen poin.

Ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, tingkat ketidakaktifan ternyata lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Agustus 2015 tingkat ketidakaktifan di perkotaan mencapai 36,12 persen, sementara di daerah

perdesaan hanya sebesar 32,05 persen. Tingkat ketidakaktifan di daerah perkotaan pada Agustus 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,14 persen poin bila dibandingkan keadaan Februari 2015. Begitupun di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar 3,48 persen poin, yaitu dari 28,57 persen pada Agustus 2014 menjadi 32,05 persen pada Februari 2015.

“Tingkat ketidakaktifan pada umur muda paling tinggi”



Grafik 36. Tingkat Ketidakaktifan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Agustus 2015

Pola tingkat ketidakaktifan seperti yang terlihat pada Grafik 36 mengindikasikan tingginya tingkat ketidakaktifan pada penduduk umur muda, lalu turun pada umur produktif dan kembali meningkat pada umur-umur tua (pola ini menyerupai bentuk huruf “J”).

Berdasarkan Grafik 36 ini kita juga dapat melihat perbedaan pola tingkat ketidakaktifan menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2015, tingkat ketidakaktifan laki-laki pada kelompok umur (15–19) tahun mencapai 68,17 persen kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai 2,09 persen pada kelompok umur (40–44) tahun, dan kembali meningkat pada kelompok umur (45–49) tahun.

Sementara pada perempuan di kelompok umur (15–19) tahun tingkat ketidakaktifan mencapai 77,20 persen, kemudian terus mengalami penurunan hingga mencapai titik terendah di kelompok umur (45-49) tahun yaitu sebesar 39,55 persen, kembali meningkat pada kelompok umur (50-54) tahun.

BAB 4

INDIKATOR PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

KILM 14. PENCAPAIAN PENDIDIKAN DAN MELEK HURUF

Informasi mengenai tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Tingkat keahlian tenaga kerja merupakan faktor penentu kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja sesuai dengan lima tingkat pendidikan yaitu kurang dari satu tahun, tingkat pradasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier. Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat *International Standard Classification of Education (ISCED)*. Akan tetapi, Sakernas tidak menyediakan data mengenai kemampuan baca-tulis (melek huruf) penduduk yang bekerja, sehingga pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat literasi (melek huruf) hanyalah pendidikan saja.

“Angkatan kerja didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD yaitu sebesar 57,11 persen”

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2015, secara nasional tidak menunjukkan perubahan kontribusi angkatan kerja berdasarkan pendidikan yang signifikan jika dibandingkan dengan Sakernas pada Februari 2015. Angkatan kerja pada Agustus 2015 ini sebagian besar masih didominasi oleh mereka yang hanya tamat sekolah dasar yaitu sebesar 57,11 persen. Angkatan kerja yang menyelesaikan sekolah menengah sebesar 28,19 persen, sementara untuk tamatan sekolah tinggi hanya sebesar 11,07 persen. Kondisi yang kurang baik ini ditunjukkan pula dengan masih adanya angkatan kerja yang tidak pernah sekolah sekitar 3,63 persen.

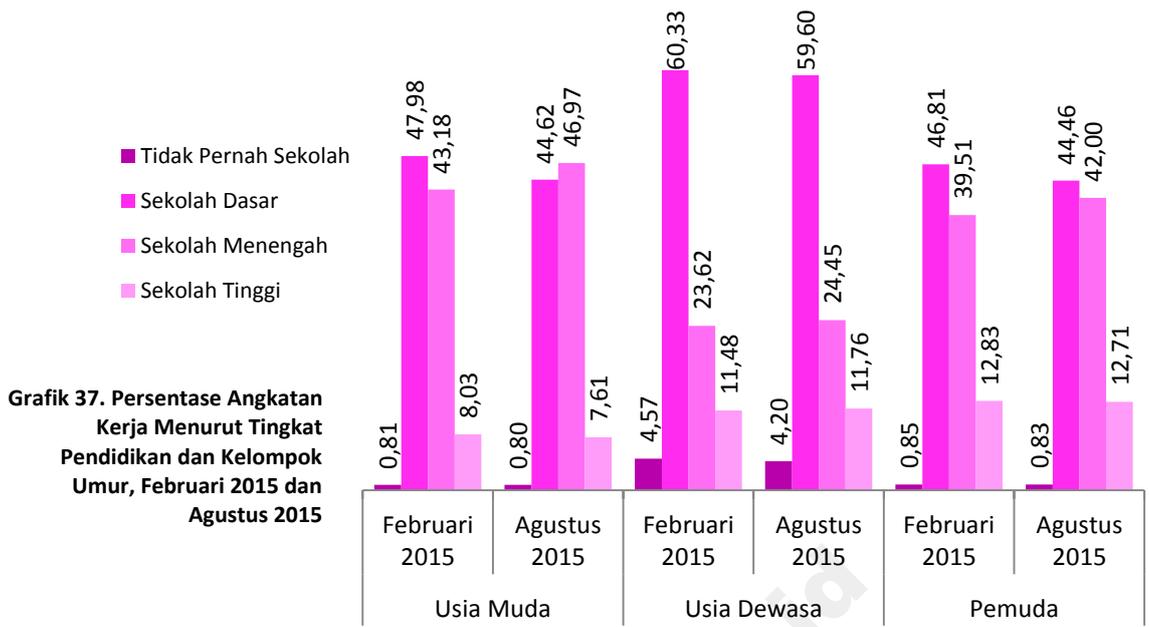
Perbedaan kualitas angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan dilihat dari tingkat pendidikannya memang cukup menarik. Pada Agustus 2015, persentase angkatan kerja perempuan yang tidak pernah sekolah lebih tinggi dari persentase angkatan kerja laki-laki (mencapai lebih dari dua kali lipat). Begitu pula untuk jenjang pendidikan sekolah tinggi persentase perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 13,84 persen dibandingkan 9,43 persen.

Tabel 11. Persentase Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan, 2014–2015

Tingkat Pendidikan	2014		2015	
	Agustus	Februari	Agustus	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Tidak Pernah Sekolah	4,32	3,93	3,63	
Laki-laki	2,97	2,61	2,51	
Perempuan	6,53	5,98	5,52	
Perkotaan	1,91	2,26	1,70	
Perdesaan	6,65	5,99	5,75	
Sekolah Dasar	59,33	58,25	57,11	
Laki-laki	59,73	58,19	57,56	
Perempuan	58,67	58,34	56,34	
Perkotaan	45,92	48,25	44,51	
Perdesaan	72,29	70,58	70,91	
Sekolah Menengah	26,58	26,92	28,19	
Laki-laki	28,93	29,77	30,50	
Perempuan	22,71	22,51	24,30	
Perkotaan	37,10	34,19	37,28	
Perdesaan	16,41	17,96	18,23	
Sekolah Tinggi	9,77	10,90	11,07	
Laki-laki	8,37	9,43	9,43	
Perempuan	12,09	13,17	13,84	
Perkotaan	15,07	15,30	16,51	
Perdesaan	4,65	5,47	5,11	

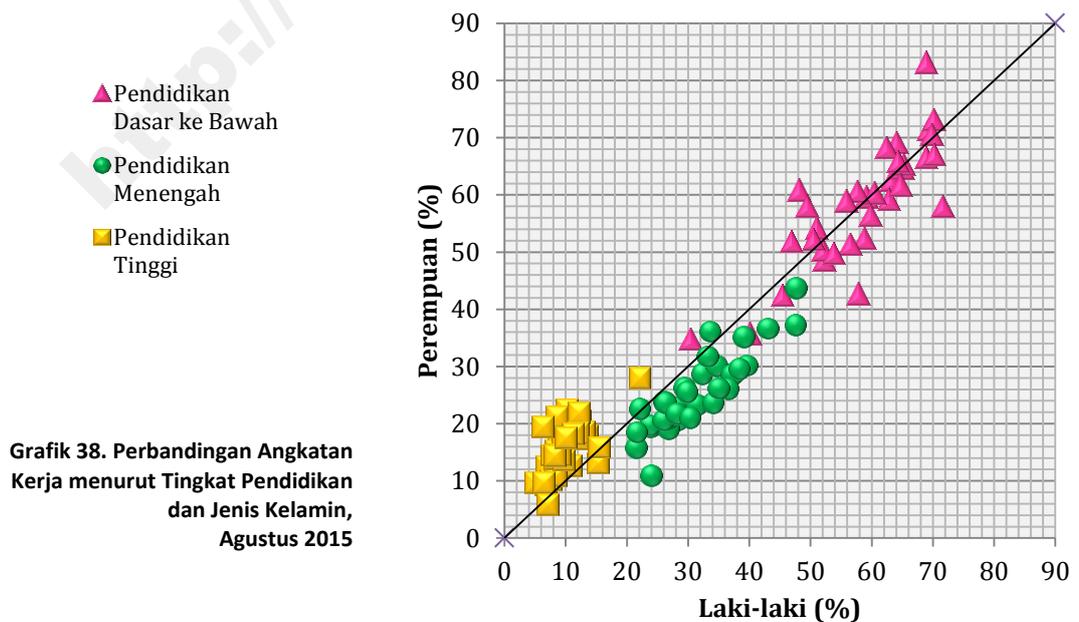
“Masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja usia muda dan pemuda yang tidak pernah sekolah ”

Pola yang sama juga terlihat pada kelompok umur dewasa dan pemuda dimana angkatan kerja juga didominasi oleh tamatan sekolah dasar dan disusul oleh mereka yang tamat sekolah menengah. Hal yang cukup menarik adalah bahwa pada kelompok umur muda dan pemuda, masih terdapat sekitar satu persen angkatan kerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan di bangku sekolah, padahal program wajib belajar telah dicanangkan sejak tahun 1984.



“Angkatan kerja perempuan masih terkonsentrasi pada pendidikan rendah ”

Pada Agustus 2015, persentase angkatan kerja perempuan lebih banyak terkonsentrasi pada jenjang pendidikan rendah (dasar kebawah) dan tinggi, sementara pada laki-laki justru lebih mengelompok pada jenjang pendidikan menengah.



<http://www.bps.go.id>

Penjelasan Teknis

Konsep definisi ketenagakerjaan yang digunakan BPS merujuk pada rekomendasi ILO sebagaimana tercantum dalam buku *“Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Under employment: An ILO Manual on Concepts and Methods”, ILO 1992*. Hal ini dimaksudkan, terutama agar data ketenagakerjaan yang dihasilkan dari berbagai survei di Indonesia dapat dibandingkan secara internasional, tanpa mengesampingkan kondisi ketenagakerjaan spesifik Indonesia.

Pendekatan teori ketenagakerjaan yang digunakan dalam Sakernas adalah Konsep Dasar Angkatan Kerja (*Standard Labor Force Concept*), seperti pada diagram dibawah ini:



Beberapa konsep umum yang digunakan dalam Sakernas yang juga diadopsi untuk penyusunan KILM, meliputi konsep dan definisi mengenai penduduk, umur kerja, angkatan kerja, bukan angkatan kerja, periode referensi, dan kriteria satu jam.

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan konsep dasar ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi penduduk umur kerja dan penduduk bukan umur kerja. Penduduk umur kerja dibedakan atas dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Pengukurannya didasarkan pada periode rujukan (*time reference*), yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu sampai sehari sebelum pencacahan.

Umur kerja adalah batas umur yang ditetapkan untuk pengelompokan penduduk yang aktif secara ekonomi. Indonesia menggunakan batas bawah umur kerja (*economically active population*) 15 tahun (meskipun dalam survei dikumpulkan informasi mulai dari umur 10 tahun) dan tanpa batas atas umur kerja. Di negara lain, penentuan batas bawah dan batas atas umur kerja bervariasi sesuai dengan kebutuhan/situasinya. Sebagai contoh, beberapa negara yang menggunakan batas bawah adalah Mesir (6 tahun), Brazil (10 tahun), Swedia, USA (16 tahun), Kanada (14 dan 15 tahun), India (5 dan 15 tahun), Venezuela (10 dan 15 tahun). Sementara itu, negara-negara yang menggunakan batas atas adalah Denmark, Swedia, Norwegia, Finlandia (74 tahun), Mesir, Malaysia, dan Mexico (65 tahun). Banyak negara seperti Indonesia tidak menggunakan batas atas.

Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti)).

Yang dimaksud dengan bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan, paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak bekerja, misalnya karena cuti, sakit, dan sejenisnya. Konsep bekerja satu jam selama seminggu yang lalu juga digunakan oleh banyak negara, antara lain Pakistan, Filipina, Bulgaria, Hungaria, Polandia, Romania, Federasi Rumur, dan lainnya. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji/pendapatan, termasuk semua tunjangan dan bonus bagi buruh/ karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa, bunga, atau keuntungan, baik berupa uang atau barang bagi pengusaha. Kegiatan bekerja ini mencakup penduduk yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, tugas belajar, dan sejenisnya.

Pengangguran meliputi penduduk yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Yang dimaksud mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan pada suatu periode rujukan. Mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang 'baru', yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas risiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan/pegawai dibayar maupun tak dibayar. Mempersiapkan suatu usaha yang dimaksud adalah apabila 'tindakannya nyata', seperti mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/tempat, mengurus surat izin usaha, dan sebagainya, baik telah maupun sedang dilakukan. Merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa) adalah alasan bagi mereka yang berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan, sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan yang diinginkan. Atau mereka yang merasa karena keadaan situasi/kondisi/iklim/musim menyebabkan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja adalah alasan bagi mereka tidak mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Periode referensi merupakan periode waktu yang ditetapkan untuk membatasi keterangan responden. Dalam survei rumah tangga atau individu, periode referensi yang pendek (*a short recent reference period*) akan meminimumkan kesalahan responden dalam mengingat (*recall*) dan juga mengurangi masalah (statistik) yang timbul oleh karena perpindahan penduduk dan perubahan status aktivitas, pekerjaan, dan karakteristik penduduk lainnya. Standar internasional untuk periode referensi yang pendek adalah satu hari atau satu minggu. Periode referensi satu minggu yang lalu paling banyak diterapkan di negara-negara yang melaksanakan survei angkatan kerja nasional, termasuk Indonesia.

Selain periode referensi seminggu yang lalu, dalam Sakernas juga dikenal kriteria satu jam. Kriteria satu jam secara berturut-turut digunakan dengan pertimbangan untuk mencakup semua jenis pekerjaan yang mungkin ada pada suatu negara, termasuk di dalamnya adalah pekerjaan dengan waktu singkat (*short-time work*), pekerja bebas, *stand-by work*, dan pekerjaan yang tak

beraturan lainnya. Kriteria satu jam juga dikaitkan dengan definisi bekerja dan penganggur yang digunakan, di mana penganggur adalah situasi dari ketiadaan pekerjaan secara total (*lack of work*), dimana apabila batas minimum dari jumlah jam kerja dinaikkan, maka akan mengubah definisi penganggur, yaitu bukan lagi ketiadaan pekerjaan secara total.

Di samping itu, juga untuk memastikan bahwa pada suatu tingkat agregasi tertentu, input tenaga kerja total berkaitan langsung dengan produksi total. Hal ini diperlukan, terutama ketika dilakukan analisis gabungan antara statistik ketenagakerjaan dan statistik produksi.

Berdasarkan argumen teknis, ILO merekomendasikan untuk memperhatikan *the one hour criterion*, yaitu digunakannya konsep/definisi satu jam dalam periode referensi tertentu untuk menentukan seseorang dikategorikan sebagai bekerja (*employed*).

BPS menggunakan konsep/definisi “bekerja paling sedikit 1 jam secara berturut-turut dalam seminggu yang lalu” untuk mengkategorikan seseorang sebagai bekerja (*currently economically active population*), tanpa melihat lapangan usaha, jabatan, maupun status pekerjaannya.

INDIKATOR PASAR TENAGA KERJA

Organisasi Perburuhan Internasional (*International Labour Organization-ILO*) meluncurkan *Key Indicator of Labour Market* (KILM) pada tahun 1999, untuk melengkapi program pengumpulan data secara rutin dan untuk meningkatkan penyebaran data pada elemen kunci dari pasar tenaga kerja dunia.

Terdapat 20 (dua puluh) indikator yang disusun oleh ILO, yang dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

1. Partisipasi di dunia kerja, yang terdiri dari KILM 1, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja;
2. Indikator penduduk yang bekerja, terdiri dari KILM 2 (Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk), KILM 3 (Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama), KILM 4 (Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha), KILM 5 (Pekerja Paruh Waktu), KILM 6 (Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja), dan KILM 7 (Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal);
3. Indikator pengangguran, *underemployment* (setengah penganggur), dan ketidakaktifan, yang terdiri dari KILM 8 (Pengangguran), KILM 9 (Pengangguran pada Kelompok Umur Muda), KILM 10 (Pengangguran Jangka Panjang), KILM 11 (Pengangguran dan Pendidikan), KILM 12 (Setengah Penganggur/*underemployment*), dan KILM 13 (Tingkat Ketidakaktifan);
4. Indikator pendidikan dan melek huruf, yang terdiri dari KILM 14 (Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf);
5. Indikator upah dan biaya tenaga kerja, yang terdiri dari KILM 15 (Indeks Upah Sektor Manufaktur), KILM 16 (Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan), dan KILM 17 (Upah per Jam);
6. Produktivitas Tenaga Kerja yang termuat dalam KILM 18 (Produktivitas Tenaga Kerja);
7. Indikator elastisitas tenaga kerja yang termuat dalam KILM 19 (Elastisitas Tenaga Kerja);
8. Indikator kemiskinan, pekerja miskin, dan distribusi pendapatan yang tertuang dalam KILM 20 (Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan).

KILM 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja yang terlibat aktif di pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan, yang memberikan indikasi ukuran relatif dari pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk terlibat dalam produksi barang dan jasa. Rincian angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur memberikan profil distribusi penduduk yang aktif secara ekonomi. Secara umum, kegunaan indikator ini adalah untuk mengindikasikan besarnya penduduk umur kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah, dan menunjukkan besaran relatif dan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk umur kerja.

Tabel publikasi standar yang dikeluarkan ILO (*KILM 6th ed*) menyajikan estimasi tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dengan standar sebagai berikut: 15+, 15-24, 15-64, 25-54, 25-34, 35-54, 55-64, dan 65 tahun ke atas. Penggunaan kelompok umur ini digunakan di lebih dari 190 negara selama tahun 1980 sampai 2010.

KILM 2. Rasio Penduduk yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*)

Rasio penduduk yang bekerja terhadap jumlah penduduk (*Employment to Population Ratio-EPR*) didefinisikan sebagai proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang berstatus bekerja terhadap penduduk umur kerja. Rasio yang tinggi berarti sebagian besar penduduk suatu negara adalah bekerja, sementara rasio rendah berarti bahwa sebagian besar penduduk tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang berhubungan dengan pasar, karena mereka menganggur atau (lebih mungkin) tidak termasuk dalam angkatan kerja, yang sering disebut sebagai Bukan Angkatan Kerja (BAK).

Rasio ini memberikan informasi tentang kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja, karena di banyak negara indikator ini menghasilkan analisis yang lebih mendalam dibandingkan dengan tingkat pengangguran. Meskipun secara keseluruhan rasio tinggi biasanya dianggap sebagai positif, indikator ini saja tidak cukup untuk menilai tingkat pekerjaan yang layak atau tingkat defisit pekerjaan yang layak. Indikator tambahan diperlukan untuk menilai isu-isu seperti upah/gaji, jam kerja, lapangan kerja sektor informal,

setengah pengangguran, dan kondisi kerja. Bahkan, nilai rasio ini bisa tinggi untuk alasan yang tidak selalu positif misalnya, pilihan pendidikan yang terbatas sehingga kaum muda mengambil pekerjaan yang tersedia daripada tinggal di sekolah untuk membangun sumber daya mereka (memilih bekerja demi melanjutkan sekolah/membiayai sekolah). Untuk alasan ini, sangat disarankan bahwa indikator ini harus ditinjau ulang secara kolektif dalam setiap evaluasi kebijakan tenaga kerja di suatu negara/wilayah.

KILM 3. Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama

Kategorisasi menurut status pekerjaan utama dapat membantu dalam memahami dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat pembangunan suatu negara. Selama bertahun-tahun, dan dengan kemajuan pembangunan, suatu negara biasanya akan mengharapkan untuk dapat melihat pergeseran pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri dan jasa, dengan peningkatan pada jumlah penduduk bekerja yang digaji (buruh/karyawan/pegawai) dan penurunan jumlah pekerja keluarga yang sebelumnya berkontribusi/bekerja di sektor pertanian.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Informasi mengenai status dalam pekerjaan utama yang dikumpulkan dalam Sakernas adalah:

1. Berusaha sendiri;
2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar;
3. Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
4. Buruh/karyawan/pegawai;
5. Pekerja bebas di pertanian;
6. Pekerja bebas di nonpertanian;
7. Pekerja keluarga/tak dibayar.

Dalam publikasi ini, pengelompokan status dalam pekerjaan utama adalah sebagai berikut:

- 1) Penduduk yang bekerja dengan upah/gaji adalah penduduk bekerja dengan status pekerjaan buruh/karyawan/pegawai;
- 2) Penduduk yang bekerja dengan status berusaha, terdiri dari :
 - a. Pengusaha, yaitu penduduk bekerja dengan status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar;
 - b. Berusaha sendiri dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar;
 - c. Pekerja bebas yang terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian;

3) Pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

Selain itu, disajikan juga persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk bekerja. Konsep pekerja rentan mengacu pada publikasi KILM-ILO, yaitu penduduk bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian dan nonpertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar.

KILM 4. Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha

Informasi sektoral biasanya berguna untuk mengidentifikasi pergeseran yang besar dalam ketenagakerjaan dan tingkat pembangunan. Dalam buku teks pembangunan ekonomi, tenaga kerja bergeser dari pertanian dan aktivitas tenaga kerja intensif lainnya ke sektor industri dan akhirnya menuju ke sektor jasa-jasa, dalam prosesnya, penduduk yang bekerja berpindah dari desa ke kota.

Klasifikasi baku yang digunakan dalam penggolongan lapangan pekerjaan/lapangan usaha adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009. Untuk kepentingan penyajian/publikasi, digunakan kategori/sektor sebagai berikut:

- 1) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
- 2) Pertambangan dan penggalian;
- 3) Industri pengolahan;
- 4) Listrik, gas, dan air;
- 5) Bangunan;
- 6) Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel;
- 7) Transportasi, pergudangan, dan komunikasi;
- 8) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan;
- 9) Jasa kemasyarakatan.

Untuk kepentingan analisis, sektor dalam perekonomian dibagi menjadi 3 (tiga) sektor yaitu: **A (Agriculture)**/Sektor Pertanian, **M (Manufacture)**/Sektor Manufaktur dan **S (Services)**/Sektor Jasa-jasa, berdasarkan pada definisi sektor *International Standard Industrial Classification (ISIC) System* (Revisi 2 dan Revisi 3).

KILM 5. Pekerja Paruh Waktu

Jumlah jam kerja berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan orang yang bekerja serta tingkat produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan. Mengukur tingkat dan tren di jam-jam bekerja di masyarakat, untuk berbagai kelompok penduduk bekerja dan untuk penduduk bekerja secara individu, menjadi penting ketika melakukan pemantauan kerja dan kondisi hidup maupun ketika menganalisis perkembangan ekonomi.

Indikator pekerja paruh waktu berfokus pada individu dengan jumlah jam kerja kurang dari pekerjaan penuh-waktu (*full time*), yang merupakan proporsi dari total penduduk yang bekerja. Dalam hal ini, pekerja paruh waktu yang dimaksud adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja penuh-waktu/normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Karena tidak ada definisi yang disepakati secara internasional untuk jumlah minimum jam dalam seminggu yang merupakan pekerjaan penuh-waktu (*full time*), biasanya digunakan batas 35 jam seminggu sebagai jam kerja normal. Beberapa negara yang menggunakan batas 35 jam adalah Republik Korea, Amerika, dan El Salvador¹⁾. Untuk kasus Indonesia, batas yang digunakan adalah kurang dari 35 jam seminggu dan mencari pekerjaan.

KILM 6. Penduduk yang Bekerja Menurut Jam Kerja

KILM ini bertujuan untuk menunjukkan jumlah orang yang dipekerjakan menurut jam bekerja (biasanya atau sebenarnya): kurang dari 25 jam kerja per minggu; antara 25 dan 34 jam; antara 35 dan 39 jam; antara 40 dan 48 jam; antara 49 dan 59 jam; dan 60 jam ke atas, sebagaimana data yang tersedia.

KILM 7. Penduduk yang Bekerja di Sektor Informal

Penduduk yang bekerja di sektor informal terkait perkiraan jumlah orang yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan jumlah orang bekerja. Dalam hal ukuran dan pertumbuhan, sektor informal merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi, sosial, dan politik di sebagian besar negara berkembang, serta beberapa negara maju. Di negara-negara dengan tingkat pertumbuhan penduduk atau urbanisasi yang tinggi, ekonomi informal cenderung tumbuh untuk menyerap sebagian besar tenaga kerja. Konferensi Internasional Statistik Tenaga Kerja (*The International Conference of Labour Statisticians-ICLS*) ke-15 mendefinisikan sektor informal sebagai unit produksi dalam usaha rumah tangga yang dimiliki oleh rumah tangga. Mereka yang bekerja di sektor informal terdiri

¹⁾ Hussmanns, R., Mehran, F., Verma, V. Surveys of economically active population, employment, unemployment and underemployment : An ILO manual in concepts and methods. Geneva, International Labour Office, 1990.

semua orang yang selama periode acuan tertentu yang bekerja pada setidaknya satu unit produksi yang memenuhi konsep sektor informal, terlepas dari status mereka dalam pekerjaan dan apakah itu pekerjaan utama atau pekerjaan sekunder. Resolusi ICLS memperbolehkan beberapa variasi konsep nasional. Akibatnya, informasi untuk indikator ini sering didasarkan pada definisi nasional dan pengukuran ekonomi informal.

Selain itu, pekerjaan informal dicirikan oleh ketiadaan kontrak, perlindungan sosial, hak untuk berbagai jaminan dan tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan pendapatan pajak, yang mungkin tidak sepenuhnya tertangkap dengan fokus hanya pada pekerjaan di sektor informal.

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja sektor informal sebagai "karyawan dengan hubungan kerja yang tidak tercakup dalam perundang-undangan atau dalam praktiknya, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, pajak, pendapatan, perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja tertentu (pemberitahuan pemecatan sebelumnya, pembayaran yang buruk, dibayar tahunan atau izin sakit, dll)". Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk tingkat pekerjaan dan bukan untuk perorangan karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: usaha sendiri informal dan pekerjaan upahan informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, jaminan pekerja atau perlindungan sosial yang dipekerjakan di usaha formal atau informal. Yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi produksi.

BPS melakukan pendekatan khusus dalam menentukan penduduk yang bekerja di sektor formal/informal, yaitu berdasarkan status dalam pekerjaan utama dan jenis pekerjaan/jabatan²⁾.

KILM 8. Pengangguran

²⁾ Lihat lampiran untuk matriks penentuan sektor formal/informal

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau biasanya disebut sebagai tingkat pengangguran menggambarkan proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif mencari dan bersedia untuk bekerja. Ini tidak boleh disalahartikan sebagai kesulitan ekonomi, meskipun korelasi antara tingkat pengangguran dan kemiskinan sering ada dan cenderung memiliki korelasi negatif³⁾. Definisi baku untuk penganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, dan bersedia untuk bekerja.

Bersama dengan rasio penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk (KILM 2), tingkat pengangguran menyediakan indikator situasi pasar tenaga kerja di negara-negara yang mengumpulkan informasi tentang tenaga kerja.

Secara spesifik, penganggur terbuka dalam Sakernas, terdiri atas:

- 1) Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
- 2) Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
- 3) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- 4) Mereka yang tidak bekerja, dan tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran oleh banyak negara digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan. Jika bekerja diartikan sebagai situasi yang diinginkan bagi orang-orang dalam populasi yang secara ekonomi aktif (angkatan kerja), maka pengangguran menjadi situasi yang tidak diinginkan. Namun ada kalanya pengangguran jangka pendek menjadi suatu kondisi yang diinginkan dan diperlukan untuk memastikan penyesuaian (*adjustment*) terhadap fluktuasi ekonomi. Tingkat pengangguran pada kelompok tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan umur, jenis kelamin, dan pendidikan berguna dalam mengidentifikasi kelompok penduduk bekerja dan sektor-sektor yang paling rentan terhadap pengangguran.

Sementara tingkat pengangguran tenaga kerja, dapat dianggap sebagai indikator yang paling informatif yang mencerminkan indikasi pasar umum dan kinerja pasar tenaga kerja dan ekonomi secara keseluruhan, tidak harus ditafsirkan sebagai ukuran kesulitan ekonomi atau kesejahteraan. Bila didasarkan pada standar internasional yang direkomendasikan, tingkat pengangguran hanya memberikan gambaran proporsi angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan

³⁾ Tingkat pengangguran relatif rendah pada orang-orang miskin

tapi bersedia dan secara aktif mencari pekerjaan. Angka ini menggambarkan tentang sumber daya ekonomi penganggur atau anggota keluarga mereka. Penggunaannya harus dibatasi sebagai ukuran pemanfaatan tenaga kerja serta indikasi kegagalan untuk mencari pekerjaan. Tindakan-tindakan lain, termasuk indikator pendapatan yang terkait, akan diperlukan untuk mengevaluasi kesulitan ekonomi.

Tingkat pengangguran secara matematis didefinisikan sebagai hasil bagi dari jumlah pengangguran (untuk negara atau kelompok penduduk bekerja tertentu) dengan jumlah angkatan kerja. Harus ditekankan bahwa denominator/faktor pembagi yang berfungsi sebagai dasar statistik ini adalah tenaga kerja atau penduduk yang aktif secara ekonomi, **bukan** jumlah penduduk. Perbedaan ini tidak selalu dipahami oleh publik. Memang, istilah "angkatan kerja" dan "bekerja" kadang-kadang keliru digunakan secara bergantian. Misalnya, tingkat pengangguran adalah 6 persen, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 6 persen dari penduduk yang aktif secara ekonomi (angkatan kerja) yang saat ini sedang tidak bekerja dan mencari pekerjaan atau bersedia bekerja.

KILM 9. Pengangguran pada Kelompok Umur Muda

Tingkat pengangguran penduduk umur muda memberikan gambaran kepada kita mengenai proporsi angkatan kerja pada kelompok umur muda dengan kondisi: (a) tidak memiliki pekerjaan, (b) secara aktif mencari pekerjaan, dan (c) tersedia untuk bekerja dalam pasar tenaga kerja. Penduduk umur muda yang menganggur merupakan salah satu masalah yang memerlukan penanganan kebijakan khusus yang penting bagi banyak negara, terlepas dari tahap pembangunan. Untuk tujuan indikator ini, istilah "umur muda" mencakup orang yang berumur 15 sampai 24 tahun, sedangkan "orang dewasa" didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 10. Pengangguran Jangka Panjang

Pengangguran jangka panjang merupakan stok tenaga kerja yang tidak dapat dimanfaatkan, merupakan bagian dari angkatan kerja, tetapi tidak memiliki pekerjaan (menganggur) dalam jangka waktu tertentu. Sayangnya, Sakernas tidak mengumpulkan informasi mengenai berapa lama seseorang menganggur. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

KILM 11. Pengangguran dan Pendidikan

Indikator ini melihat hubungan antara pencapaian pendidikan penduduk bekerja dan pengangguran yang memberikan gambaran mengenai perubahan dalam permintaan tenaga kerja. Informasi mengenai tingkat pengangguran berdasarkan pendidikan memiliki implikasi penting bagi penduduk bekerja dan kebijakan pendidikan. Jika diketahui bahwa orang dengan tingkat pendidikan yang rendah memiliki risiko yang lebih tinggi menjadi pengangguran, kebijakan yang mungkin diambil adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka atau menciptakan lebih banyak pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skilled job*) di dalam negeri. Di sisi lain, komposisi pengangguran yang lebih tinggi di kalangan orang-orang dengan pendidikan tinggi bisa menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang profesional dan tingkat tinggi. Tabel yang biasanya disajikan menunjukkan distribusi persentase dari total pengangguran suatu negara sesuai dengan lima tingkat sekolah, tingkat pra-dasar, kurang dari satu tahun, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tersier (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat sekolah). Sebagai catatan, angka yang ditampilkan bisa berupa distribusi dan bisa berupa *rate*.

KILM12. Setengah Penganggur (*Underemployment*)

Mereka yang dikategorikan dalam setengah penganggur adalah mereka yang jumlah jam kerjanya di bawah ambang batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu yang lalu), dengan kondisi:

- 1) Mereka yang dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a. Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya yang sekarang;
 - b. Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
- 2) Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

KILM 13. Tingkat Ketidakaktifan

Tingkat ketidakaktifan adalah ukuran proporsi penduduk umur kerja suatu negara yang tidak terlibat aktif dalam pasar tenaga kerja, baik dengan bekerja atau mencari pekerjaan (bukan angkatan kerja). Tingkat ketidakaktifan ini jika dijumlahkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK-lihat KILM 1) maka hasilnya adalah 100 persen, dengan perkataan lain tingkat ketidakaktifan sama dengan 1 (satu) dikurang TPAK (1-TPAK).

Dalam beberapa situasi, tingkat ketidakaktifan tinggi untuk kelompok populasi tertentu tidak harus selalu dilihat sebagai suatu kondisi "buruk", misalnya tingkat ketidakaktifan yang relatif tinggi untuk wanita umur 25–34 tahun mungkin karena mereka meninggalkan pasar kerja untuk mengurus keluarga dan melaksanakan tanggung jawab seperti melahirkan dan mengasuh anak. Dengan menggunakan data dalam KILM 13, pengguna dapat melihat sejauh mana ibu berkaitan dengan pola tenaga kerja perempuan. Telah lama diakui bahwa aspek-aspek struktur rumah tangga terkait dengan aktivitas pasar tenaga kerja, misalnya kepala rumah tangga perempuan cenderung memiliki tingkat ketidakaktifan yang relatif rendah. Pada pasangan yang menikah, suami biasanya memiliki tingkat ketidakaktifan yang rendah, terutama jika ada anak-anak dalam keluarga. Tingkat ketidakaktifan yang rendah pada wanita bisa berkorelasi dengan tingginya tingkat ketidakaktifan untuk laki-laki, yaitu suami, jika laki-laki sedang menyelesaikan pendidikan atau secara fisik tidak mampu bekerja, sehingga membuat istri sebagai pencari nafkah utama.

KILM 14. Pencapaian Pendidikan dan Melek Huruf

Informasi tentang tingkat pencapaian pendidikan saat ini adalah indikator terbaik yang tersedia untuk melihat tingkat keahlian tenaga kerja. Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu penting untuk menilai kemampuan suatu negara untuk bersaing dengan sukses di pasar dunia dan membuat efisiensi penggunaan kemajuan teknologi yang cepat. Tabel KILM 14 menyajikan informasi mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja dengan lima tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat pra-dasar, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi (dalam publikasi ini hanya dikategorikan dalam empat tingkat pendidikan, yaitu tidak pernah bersekolah, tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi).

Kategori yang digunakan dalam indikator ini secara konseptual berdasarkan tingkat Standar Internasional Klasifikasi Pendidikan (*International Standard Classification of Education-ISCED-97*). Pengelompokan tingkat pendidikan berdasarkan *ISCED-97* adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah bersekolah adalah mereka yang tidak/belum pernah bersekolah sama sekali;
- 2) Sekolah dasar, yaitu mereka yang memiliki pendidikan tidak/belum tamat SD, SD/Ibtidaiyah, Paket A, SMP/Tsanawiyah, SMP Kejuruan, dan Paket B;

- 3) Sekolah menengah, yaitu mereka dengan pendidikan SMA/Aliyah, SMK, dan Paket C;
- 4) Sekolah tinggi, yaitu mereka yang memiliki ijazah Diploma I/II, Diploma III, Diploma IV/Sarjana, dan S2/S3.

Disamping itu, disajikan pula pencapaian pendidikan angkatan kerja menurut kelompok umur sebagai berikut: umur muda (15–24 tahun), pemuda (16–30 tahun⁴⁾), dan "dewasa" yang didefinisikan sebagai orang yang berumur 25 tahun ke atas.

KILM 15. Indeks Upah Sektor Manufaktur

Sektor manufaktur yang dikenal sebagai sektor formal dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kesejahteraan penduduk bekerja melalui indeks upah pada sektor ini. Tetapi, terdapat survei khusus (Survei Upah dan Survei Struktur Upah)—yang bukan merupakan bagian dari Sakernas—yang dilakukan untuk mengumpulkan data terkait dengan indikator ini. Oleh karena itu, indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi KILM ini.

KILM 16. Indikator Upah dan Pendapatan Berdasarkan Jabatan

Salah satu keterbatasan variabel pada Sakernas adalah hanya menanyakan upah/ pendapatan pada status pekerjaan tertentu. Akibatnya, tidak semua penduduk bekerja mempunyai informasi pendapatan/upah. Oleh karena itu, indikator ini juga tidak dapat disajikan pada publikasi ini.

KILM 17. Upah per Jam

Seperti KILM 15 dan 16 mengenai informasi upah, Sakernas tidak memiliki informasi upah per jam. Tidak adanya pertanyaan mengenai informasi upah per jam dikarenakan kebanyakan di Indonesia, orang yang bekerja tidak dibayar berdasarkan jam kerja, tetapi hari kerja. Hanya sedikit sekali lapangan pekerjaan yang membayar orang yang bekerja berdasarkan hitungan jam. Selain itu, dalam Sakernas yang ditanyakan adalah pendapatan sebulan terakhir, sementara untuk jam kerja, ditanyakan jumlah jam kerja seminggu terakhir. Estimasi upah kerja per jam akan sangat berisiko menimbulkan bias statistik. Oleh karena itu, indikator ini tidak dipublikasikan pada publikasi KILM ini.

KILM 18. Produktivitas Tenaga Kerja

⁴⁾ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting untuk melihat sejauh mana faktor produksi L (*Labour/Tenaga Kerja*) berperan dalam proses produksi. Tingkat produktivitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai output yang dihasilkan oleh satu unit tenaga kerja. Semakin tinggi output yang dihasilkan, maka semakin produktif tenaga kerja tersebut, demikian sebaliknya. Indikator ini juga penting untuk melihat sektor mana saja yang memiliki tenaga kerja dengan produktivitas tinggi, dan sektor mana yang tidak. Identifikasi ini memberikan gambaran sektor padat karya (*labour intencive*) dan sektor padat modal (*capital intencive*). Akan tetapi karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan pada Sakernas mengakibatkan indikator ini tidak dapat disajikan pada publikasi kali ini.

KILM 19. Elastisitas Tenaga Kerja

Tingkat elastisitas tenaga kerja memberikan gambaran mengenai banyaknya tenaga kerja yang terserap pada proses produksi untuk menghasilkan nilai tambah tertentu. Dengan kata lain, elastisitas tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja terserap setiap peningkatan satu persen pertumbuhan ekonomi. Untuk melakukan analisis ini, diperlukan data nilai tambah (PDB/PDRB). Analisis ini merupakan analisis lintas sektor, sehingga tidak bisa ditampilkan dalam publikasi ini.

KILM 20. Indikator Kemiskinan, Penduduk Bekerja yang Miskin, dan Distribusi Pendapatan

Sebagaimana indikator elastisitas tenaga kerja, indikator kemiskinan, penduduk bekerja yang miskin, dan distribusi pendapatan juga memerlukan beberapa variabel tambahan yang tidak ditanyakan pada Sakernas. Selain itu, data lintas sektor juga penting untuk melengkapi analisis ini. Indikator ini tidak dapat disajikan karena keterbatasan variabel yang dikumpulkan dalam Sakernas.

Lampiran

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 663	1 704	3 367	1 683	1 724	3 407	1 700	1 740	3 441
Sumatera Utara	4 612	4 739	9 351	4 652	4 780	9 432	4 686	4 812	9 499
Sumatera Barat	1 757	1 820	3 577	1 773	1 836	3 610	1 787	1 847	3 634
Riau	2 190	2 067	4 257	2 222	2 098	4 320	2 254	2 130	4 384
Jambi	1 225	1 170	2 395	1 238	1 182	2 420	1 253	1 197	2 450
Sumatera Selatan	2 859	2 784	5 644	2 886	2 810	5 696	2 909	2 832	5 741
Bengkulu	671	647	1 318	678	654	1 332	685	661	1 346
Lampung	2 955	2 804	5 759	2 979	2 826	5 805	2 997	2 845	5 842
Kep Bangka Belitung	508	465	973	515	471	986	522	477	998
Kepulauan Riau	680	652	1 332	691	662	1 353	700	671	1 371
DKI Jakarta	3 804	3 798	7 601	3 819	3 824	7 643	3 832	3 839	7 671
Jawa Barat	16 906	16 559	33 465	17 082	16 717	33 799	17 229	16 889	34 117
Jawa Tengah	12 348	12 834	25 182	12 427	12 913	25 339	12 501	12 991	25 492
DI Yogyakarta	1 393	1 455	2 848	1 404	1 466	2 870	1 411	1 472	2 883
Jawa Timur	14 435	15 143	29 579	14 515	15 224	29 739	14 592	15 293	29 885
Banten	4 258	4 103	8 362	4 313	4 155	8 468	4 365	4 207	8 572
Bali	1 546	1 546	3 093	1 559	1 559	3 118	1 571	1 570	3 141
Nusa Tenggara Barat	1 580	1 755	3 335	1 594	1 770	3 364	1 607	1 783	3 390
Nusa Tenggara Timur	1 593	1 668	3 261	1 611	1 687	3 298	1 628	1 704	3 332
Kalimantan Barat	1 689	1 629	3 318	1 706	1 646	3 352	1 721	1 662	3 383
Kalimantan Tengah	916	825	1 740	928	836	1 763	942	847	1 790
Kalimantan Selatan	1 409	1 386	2 795	1 425	1 401	2 825	1 438	1 412	2 850
Kalimantan Timur	1 499	1 326	2 825	1 286	1 146	2 432	1 304	1 163	2 468
Kalimantan Utara	-	-	-	235	201	436	240	206	446
Sulawesi Utara	900	868	1 768	908	874	1 782	914	880	1 794
Sulawesi Tengah	1 026	985	2 011	1 037	995	2 032	1 046	1 004	2 050
Sulawesi Selatan	2 867	3 122	5 990	2 890	3 146	6 035	2 914	3 168	6 082
Sulawesi Tenggara	807	817	1 623	817	827	1 644	828	837	1 665
Gorontalo	395	400	796	400	405	805	404	409	814
Sulawesi Barat	425	431	856	430	436	867	436	442	877
Maluku	552	552	1 104	558	558	1 116	564	564	1 128
Maluku Utara	385	369	754	390	374	763	394	379	773
Papua Barat	312	272	583	316	276	593	321	281	602
Papua	1 136	994	2 129	1 150	1 007	2 157	1 167	1 022	2 189
Indonesia	91 302	91 691	182 992	92 114	92 485	184 600	92 864	93 237	186 101

Lampiran 2. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015

Kelompok Umur	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	182,99	184,60	186,10
Laki-laki	91,30	92,11	92,86
Perempuan	91,69	92,49	93,24
Perkotaan	92,93	104,17	100,17
Perdesaan	90,07	80,43	85,93
(15–64)	169,70	171,02	172,29
Laki-laki	85,32	85,98	86,61
Perempuan	84,38	85,04	85,68
Perkotaan	86,84	97,13	93,37
Perdesaan	82,86	73,89	78,92
(15–24)	43,47	43,49	43,58
Laki-laki	22,05	22,08	22,14
Perempuan	21,42	21,41	21,44
Perkotaan	22,50	24,93	23,83
Perdesaan	20,98	18,56	19,74
(25–54)	108,15	108,91	109,64
Laki-laki	54,12	54,49	54,85
Perempuan	54,03	54,41	54,79
Perkotaan	55,61	62,11	59,70
Perdesaan	52,54	46,80	49,94
(25–34)	41,24	41,22	41,29
Laki-laki	20,59	20,60	20,64
Perempuan	20,64	20,62	20,65
Perkotaan	21,69	23,95	22,94
Perdesaan	19,54	17,27	18,35
(35–54)	66,91	67,69	68,35
Laki-laki	33,53	33,89	34,21
Perempuan	33,39	33,79	34,15
Perkotaan	33,91	38,15	36,77
Perdesaan	33,00	29,53	31,59
(55–64)	18,07	18,63	19,07
Laki-laki	9,14	9,40	9,61
Perempuan	8,93	9,22	9,46
Perkotaan	8,73	10,09	9,83
Perdesaan	9,34	8,54	9,24
65 Tahun ke atas	13,29	13,58	13,81
Laki-laki	5,98	6,13	6,26
Perempuan	7,31	7,44	7,55
Perkotaan	6,09	7,04	6,80
Perdesaan	7,21	6,53	7,01

Lampiran 3. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 344	779	2 123	1 363	898	2 261	1 379	804	2 183
Sumatera Utara	3 838	2 434	6 272	3 874	2 719	6 593	3 861	2 530	6 391
Sumatera Barat	1 410	922	2 332	1 457	1 023	2 481	1 423	923	2 346
Riau	1 822	873	2 695	1 896	1 078	2 974	1 875	896	2 771
Jambi	1 027	544	1 571	1 049	643	1 692	1 061	560	1 621
Sumatera Selatan	2 412	1 473	3 886	2 478	1 540	4 018	2 440	1 494	3 935
Bengkulu	554	346	900	584	391	975	582	369	951
Lampung	2 523	1 335	3 858	2 565	1 496	4 061	2 564	1 268	3 832
Kep. Bangka Belitung	433	204	637	440	252	692	441	224	666
Kepulauan Riau	586	292	878	600	295	895	606	286	892
DKI Jakarta	3 193	1 871	5 063	3 327	2 222	5 548	3 164	1 928	5 092
Jawa Barat	14 001	7 005	21 006	14 477	7 856	22 333	14 044	6 543	20 586
Jawa Tengah	10 240	7 307	17 547	10 562	7 731	18 293	10 298	7 001	17 299
DI Yogyakarta	1 127	896	2 023	1 178	920	2 098	1 128	844	1 971
Jawa Timur	12 098	8 052	20 150	12 288	8 404	20 692	12 256	8 019	20 275
Banten	3 547	1 791	5 338	3 646	2 051	5 697	3 582	1 753	5 335
Bali	1 277	1 040	2 317	1 336	1 123	2 459	1 316	1 056	2 372
Nusa Tenggara Barat	1 277	944	2 222	1 315	1 096	2 411	1 311	945	2 256
Nusa Tenggara Timur	1 274	973	2 247	1 309	1 097	2 406	1 312	996	2 308
Kalimantan Barat	1 414	907	2 320	1 430	941	2 370	1 444	913	2 357
Kalimantan Tengah	781	412	1 193	806	482	1 288	819	454	1 272
Kalimantan Selatan	1 203	738	1 941	1 240	828	2 068	1 227	760	1 987
Kalimantan Timur	1 251	561	1 811	1 088	561	1 649	1 091	448	1 539
Kalimantan Utara	-	-	-	200	87	287	199	84	283
Sulawesi Utara	718	343	1 061	752	429	1 180	745	354	1 099
Sulawesi Tengah	869	474	1 343	893	533	1 427	893	491	1 384
Sulawesi Selatan	2 301	1 415	3 716	2 350	1 405	3 756	2 303	1 404	3 706
Sulawesi Tenggara	663	423	1 086	690	478	1 168	687	451	1 138
Gorontalo	321	179	500	329	205	534	330	188	518
Sulawesi Barat	362	247	608	376	272	648	375	242	617
Maluku	420	252	672	428	283	711	441	286	727
Maluku Utara	310	171	482	322	197	519	330	184	514
Papua Barat	254	144	398	257	151	408	261	153	414
Papua	975	701	1 675	1 008	701	1 710	1 023	719	1 742
Indonesia	75 826	46 047	121 873	77 912	50 390	128 302	76 811	45 569	122 380

Lampiran 4. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015

Kelompok Umur	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Umur 15 Tahun ke atas	182,99	184,60	186,10
Laki-laki	91,30	92,11	92,86
Perempuan	91,69	92,49	93,24
Perkotaan	92,93	104,17	100,17
Perdesaan	90,07	80,43	85,93
Umur Muda (15–24)	43,47	43,49	43,58
Laki-laki	22,05	22,08	22,14
Perempuan	21,42	21,41	21,44
Perkotaan	22,50	24,93	23,83
Perdesaan	20,98	18,56	19,74
Umur Dewasa (25+)	139,52	141,11	142,53
Laki-laki	69,25	70,03	70,72
Perempuan	70,27	71,08	71,80
Perkotaan	70,43	79,24	76,33
Perdesaan	69,09	61,87	66,19
Umur 15 Tahun ke atas yang Bekerja	114,63	120,85	114,82
Laki-laki	71,46	73,42	72,15
Perempuan	43,16	47,42	42,67
Perkotaan	55,64	65,88	59,31
Perdesaan	58,98	54,97	55,51
Umur Muda (15–24) yang Bekerja	15,66	17,70	15,75
Laki-laki	9,58	10,73	9,61
Perempuan	6,08	6,97	6,14
Perkotaan	7,77	9,89	8,24
Perdesaan	7,89	7,81	7,51
Umur Dewasa (25+) yang Bekerja	98,97	103,15	99,07
Laki-laki	61,88	62,70	62,54
Perempuan	37,09	40,45	36,53
Perkotaan	47,88	55,99	51,07
Perdesaan	51,09	47,16	48,00

Lampiran 5. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (juta), 2014–2015

Kelompok Umur	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
15 Tahun ke atas	121,87	128,30	122,38
Laki-laki	75,83	77,91	76,81
Perempuan	46,05	50,39	45,57
Perkotaan	59,91	70,85	63,99
Perdesaan	61,97	57,45	58,39
(15–64)	116,78	122,67	117,12
Laki-laki	72,60	74,43	73,47
Perempuan	44,18	48,24	43,65
Perkotaan	58,05	68,41	61,82
Perdesaan	58,72	54,26	55,30
(15–24)	20,13	21,66	20,34
Laki-laki	12,24	13,16	12,36
Perempuan	7,89	8,50	7,99
Perkotaan	10,25	12,45	10,91
Perdesaan	9,88	9,22	9,43
(25–54)	84,19	87,60	83,82
Laki-laki	52,60	53,15	53,02
Perempuan	31,60	34,45	30,80
Perkotaan	42,43	49,25	44,88
Perdesaan	41,76	38,35	38,94
(25–34)	31,00	32,01	30,54
Laki-laki	19,87	19,90	19,79
Perempuan	11,13	12,11	10,75
Perkotaan	16,31	18,60	17,03
Perdesaan	14,69	13,41	13,50
(35–54)	53,19	55,59	53,29
Laki-laki	32,72	33,26	33,24
Perempuan	20,46	22,34	20,05
Perkotaan	26,12	30,65	27,85
Perdesaan	27,07	24,94	25,44
(55–64)	12,46	13,41	12,95
Laki-laki	7,76	8,12	8,09
Perempuan	4,70	5,29	4,86
Perkotaan	5,37	6,72	6,03
Perdesaan	7,09	6,69	6,92
65 Tahun ke atas	5,09	5,63	5,26
Laki-laki	3,23	3,48	3,34
Perempuan	1,87	2,15	1,92
Perkotaan	1,85	2,44	2,16
Perdesaan	3,24	3,19	3,10

Lampiran 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kelompok Umur (persen), 2014–2015

Kelompok Umur	2014	2015	
	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)
Total	66,60	69,50	65,76
Laki-laki	83,05	84,58	82,71
Perempuan	50,22	54,48	48,87
Perkotaan	64,47	68,02	63,88
Perdesaan	68,80	71,43	67,95
(15–64)	68,81	71,73	67,98
Laki-laki	85,09	86,57	84,84
Perempuan	52,36	56,72	50,94
Perkotaan	66,85	70,44	66,21
Perdesaan	70,87	73,43	70,06
(15–24)	46,30	49,81	46,69
Laki-laki	55,51	59,60	55,81
Perempuan	36,82	39,71	37,26
Perkotaan	45,58	49,92	45,79
Perdesaan	47,08	49,67	47,77
(25–54)	77,85	80,44	76,45
Laki-laki	97,18	97,54	96,66
Perempuan	58,48	63,31	56,22
Perkotaan	76,30	79,30	75,18
Perdesaan	79,48	81,95	77,98
(25–34)	75,18	77,65	73,96
Laki-laki	96,49	96,57	95,84
Perempuan	53,93	58,74	52,08
Perkotaan	75,18	77,65	74,27
Perdesaan	75,19	77,65	73,57
(35–54)	79,49	82,14	77,96
Laki-laki	97,60	98,12	97,16
Perempuan	61,29	66,10	58,71
Perkotaan	77,02	80,34	75,74
Perdesaan	82,02	84,46	80,53
(55–64)	68,93	71,97	67,91
Laki-laki	84,87	86,33	84,20
Perempuan	52,61	57,34	51,36
Perkotaan	61,49	66,57	61,30
Perdesaan	75,88	78,36	74,95
65 Tahun ke atas	38,33	41,48	38,09
Laki-laki	53,99	56,73	53,33
Perempuan	25,51	28,91	25,47
Perkotaan	30,44	34,64	31,81
Perdesaan	44,99	48,85	44,18

Lampiran 7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	80,80	45,74	63,06	80,99	52,10	66,37	81,10	46,19	63,44
Sumatera Utara	83,23	51,35	67,07	83,27	56,88	69,90	82,38	52,58	67,28
Sumatera Barat	80,25	50,65	65,19	82,19	55,73	68,73	79,63	49,97	64,56
Riau	83,23	42,21	63,31	85,33	51,39	68,85	83,20	42,08	63,22
Jambi	83,85	46,46	65,59	84,76	54,39	69,92	84,65	46,77	66,14
Sumatera Selatan	84,37	52,91	68,85	85,86	54,81	70,54	83,89	52,76	68,53
Bengkulu	82,59	53,46	68,29	86,13	59,86	73,24	85,02	55,78	70,67
Lampung	85,37	47,62	66,99	86,10	52,93	69,95	85,56	44,57	65,60
Kep. Bangka Belitung	85,09	43,97	65,45	85,55	53,42	70,20	84,62	47,10	66,71
Kepulauan Riau	86,18	44,83	65,95	86,82	44,60	66,16	86,63	42,58	65,07
DKI Jakarta	83,94	49,26	66,61	87,10	58,11	72,60	82,58	50,22	66,39
Jawa Barat	82,82	42,30	62,77	84,75	47,00	66,08	81,51	38,74	60,34
Jawa Tengah	82,93	56,93	69,68	84,99	59,87	72,19	82,38	53,89	67,86
DI Yogyakarta	80,93	61,60	71,05	83,95	62,72	73,10	79,95	57,30	68,38
Jawa Timur	83,81	53,17	68,12	84,66	55,20	69,58	83,99	52,43	67,84
Banten	83,30	43,65	63,84	84,54	49,36	67,28	82,06	41,67	62,24
Bali	82,55	67,26	74,91	85,67	72,05	78,86	83,77	67,24	75,51
Nusa Tenggara Barat	80,87	53,81	66,63	82,50	61,91	71,66	81,59	52,98	66,54
Nusa Tenggara Timur	80,00	58,33	68,91	81,24	65,04	72,95	80,58	58,43	69,25
Kalimantan Barat	83,71	55,65	69,93	83,80	57,17	70,73	83,92	54,93	69,68
Kalimantan Tengah	85,30	49,97	68,56	86,87	57,71	73,05	86,90	53,55	71,11
Kalimantan Selatan	85,41	53,25	69,46	87,04	59,15	73,21	85,29	53,87	69,73
Kalimantan Timur	83,42	42,26	64,10	84,63	48,93	67,81	83,64	38,56	62,39
Kalimantan Utara	-	-	-	85,05	43,10	65,70	82,90	40,75	63,45
Sulawesi Utara	79,76	39,47	59,99	82,81	49,04	66,24	81,54	40,26	61,28
Sulawesi Tengah	84,66	48,11	66,76	86,14	53,60	70,21	85,38	48,89	67,51
Sulawesi Selatan	80,23	45,33	62,04	81,34	44,68	62,23	79,01	44,31	60,94
Sulawesi Tenggara	82,16	51,76	66,87	84,43	57,82	71,04	82,92	53,93	68,35
Gorontalo	81,25	44,66	62,84	82,36	50,58	66,37	81,73	45,80	63,65
Sulawesi Barat	85,15	57,18	71,06	87,38	62,28	74,74	85,94	54,80	70,27
Maluku	76,19	45,66	60,92	76,66	50,77	63,71	78,16	50,77	64,47
Maluku Utara	80,63	46,42	63,88	82,69	52,68	67,99	83,58	48,56	66,43
Papua Barat	81,47	53,18	68,30	81,14	54,70	68,81	81,25	54,31	68,68
Papua	85,83	70,49	78,67	87,67	69,66	79,26	87,66	70,33	79,57
Indonesia	83,05	50,22	66,60	84,58	54,48	69,50	82,71	48,87	65,76

Lampiran 8. Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (ribu), 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 240	692	1 932	1 264	823	2 087	1 263	704	1 966
Sumatera Utara	3 631	2 251	5 881	3 660	2 512	6 171	3 626	2 336	5 962
Sumatera Barat	1 323	857	2 180	1 386	946	2 332	1 328	856	2 185
Riau	1 720	798	2 518	1 773	1 002	2 774	1 760	794	2 554
Jambi	984	507	1 491	1 020	626	1 646	1 018	532	1 550
Sumatera Selatan	2 278	1 415	3 693	2 341	1 474	3 816	2 297	1 399	3 696
Bengkulu	538	331	869	571	372	944	557	348	904
Lampung	2 420	1 254	3 673	2 496	1 425	3 921	2 452	1 183	3 635
Kep. Bangka Belitung	413	191	604	424	245	669	418	206	624
Kepulauan Riau	553	266	820	552	262	814	569	267	837
DKI Jakarta	2 941	1 694	4 634	3 068	2 016	5 085	2 925	1 799	4 724
Jawa Barat	12 871	6 360	19 231	13 278	7 179	20 457	12 865	5 926	18 791
Jawa Tengah	9 672	6 879	16 551	10 023	7 299	17 322	9 725	6 710	16 435
DI Yogyakarta	1 083	873	1 956	1 117	896	2 013	1 086	805	1 891
Jawa Timur	11 577	7 729	19 307	11 734	8 066	19 800	11 707	7 661	19 368
Banten	3 227	1 627	4 854	3 313	1 895	5 208	3 246	1 579	4 825
Bali	1 249	1 024	2 273	1 317	1 108	2 425	1 287	1 038	2 325
Nusa Tenggara Barat	1 195	899	2 094	1 244	1 047	2 291	1 223	904	2 128
Nusa Tenggara Timur	1 233	941	2 174	1 275	1 055	2 331	1 270	949	2 219
Kalimantan Barat	1 356	870	2 227	1 349	908	2 257	1 363	873	2 236
Kalimantan Tengah	756	399	1 154	779	468	1 248	784	431	1 215
Kalimantan Selatan	1 156	712	1 867	1 178	791	1 968	1 166	723	1 890
Kalimantan Timur	1 167	511	1 677	1 015	516	1 531	1 016	408	1 424
Kalimantan Utara	-	-	-	192	78	270	189	78	267
Sulawesi Utara	675	306	981	703	374	1 078	692	308	1 000
Sulawesi Tengah	842	452	1 293	865	519	1 384	863	465	1 327
Sulawesi Selatan	2 202	1 325	3 527	2 201	1 337	3 538	2 174	1 311	3 485
Sulawesi Tenggara	636	402	1 037	668	457	1 126	657	418	1 075
Gorontalo	309	170	479	320	197	518	317	177	494
Sulawesi Barat	358	238	596	370	266	636	366	230	596
Maluku	382	220	602	408	255	663	405	250	655
Maluku Utara	297	159	456	306	184	490	314	169	483
Papua Barat	242	136	378	244	145	389	243	137	380
Papua	940	678	1 617	969	677	1 646	980	693	1 672
Indonesia	71 463	43 165	114 628	73 425	47 422	120 847	72 151	42 669	114 819

**Lampiran 9. Rasio Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Terhadap Jumlah Penduduk (EPR)
Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014–2015**

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	74,52	40,64	57,38	75,11	47,71	61,25	74,26	40,42	57,14
Sumatera Utara	78,73	47,49	62,90	78,68	52,54	65,43	77,37	48,55	62,77
Sumatera Barat	75,29	47,10	60,95	78,14	51,55	64,61	74,31	46,37	60,11
Riau	78,56	38,62	59,16	79,77	47,75	64,22	78,08	37,30	58,27
Jambi	80,32	43,34	62,25	82,36	52,99	68,01	81,26	44,44	63,27
Sumatera Selatan	79,67	50,81	65,43	81,13	52,46	66,99	78,96	49,39	64,37
Bengkulu	80,21	51,10	65,92	84,29	56,98	70,89	81,25	52,63	67,20
Lampung	81,87	44,71	63,78	83,78	50,43	67,55	81,82	41,59	62,23
Kep. Bangka Belitung	81,22	41,17	62,09	82,35	52,00	67,85	80,17	43,19	62,51
Kepulauan Riau	81,36	40,85	61,53	79,90	39,59	60,18	81,34	39,85	61,03
DKI Jakarta	77,31	44,60	60,97	80,33	52,73	66,53	76,32	46,88	61,59
Jawa Barat	76,13	38,41	57,47	77,73	42,94	60,52	74,67	35,09	55,08
Jawa Tengah	78,32	53,60	65,72	80,66	56,52	68,36	77,79	51,65	64,47
DI Yogyakarta	77,79	59,97	68,69	79,56	61,09	70,13	76,98	54,70	65,60
Jawa Timur	80,20	51,04	65,27	80,84	52,99	66,58	80,23	50,09	64,81
Banten	75,78	39,66	58,05	76,83	45,60	61,51	74,38	37,54	56,30
Bali	80,74	66,22	73,48	84,46	71,10	77,78	81,91	66,10	74,01
Nusa Tenggara Barat	75,68	51,20	62,80	78,02	59,15	68,09	76,10	50,73	62,76
Nusa Tenggara Timur	77,42	56,40	66,67	79,19	62,55	70,67	78,01	55,70	66,60
Kalimantan Barat	80,33	53,40	67,10	79,11	55,16	67,35	79,20	52,51	66,09
Kalimantan Tengah	82,53	48,36	66,34	84,00	56,05	70,75	83,18	50,87	67,88
Kalimantan Selatan	82,05	51,35	66,82	82,66	56,47	69,68	81,09	51,23	66,30
Kalimantan Timur	77,82	38,51	59,37	78,94	45,00	62,95	77,90	35,06	57,71
Kalimantan Utara	-	-	-	81,61	38,87	61,90	78,50	38,07	59,85
Sulawesi Utara	74,95	35,25	55,47	77,50	42,81	60,48	75,72	35,02	55,75
Sulawesi Tengah	82,01	45,86	64,31	83,47	52,11	68,11	82,47	46,27	64,74
Sulawesi Selatan	76,81	42,42	58,88	76,17	42,49	58,61	74,61	41,39	57,31
Sulawesi Tenggara	78,78	49,21	63,91	81,79	55,31	68,47	79,38	49,89	64,56
Gorontalo	78,09	42,55	60,21	80,14	48,74	64,34	78,46	43,14	60,69
Sulawesi Barat	84,16	55,22	69,58	85,93	61,03	73,39	84,02	52,02	67,91
Maluku	69,17	39,87	54,52	73,09	45,77	59,43	71,76	44,37	58,07
Maluku Utara	77,09	43,20	60,50	78,54	49,29	64,21	79,50	44,61	62,41
Papua Barat	77,63	50,23	64,87	77,14	52,48	65,64	75,80	48,65	63,13
Papua	82,77	68,17	75,96	84,28	67,21	76,31	83,95	67,78	76,40
Indonesia	78,27	47,08	62,64	79,71	51,28	65,46	77,69	45,76	61,70

Lampiran 10. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015

Provinsi	Penduduk Bekerja dengan Upah/Gaji			Pengusaha			Berusaha Sendiri + Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Tak Dibayar		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	35,35	39,42	35,04	4,50	5,19	4,45	37,60	33,47	34,90
Sumatera Utara	38,95	37,43	36,81	3,55	2,67	3,05	34,01	34,12	34,40
Sumatera Barat	31,11	31,79	31,91	4,38	5,13	3,67	41,64	36,97	38,77
Riau	40,87	44,15	46,29	4,69	4,19	5,07	33,95	30,13	28,84
Jambi	33,29	40,26	37,40	4,15	4,24	3,95	39,11	34,07	35,36
Sumatera Selatan	34,61	33,98	35,41	2,85	2,54	3,27	37,13	37,10	35,13
Bengkulu	30,91	28,15	28,06	3,30	3,12	3,12	39,61	38,52	39,01
Lampung	26,22	26,68	25,43	3,11	3,16	3,75	39,36	38,77	37,66
Kep. Bangka Belitung	43,21	43,60	41,60	5,75	6,03	4,27	31,63	35,33	33,34
Kepulauan Riau	63,87	68,48	68,49	5,25	2,69	3,42	23,62	20,87	21,27
DKI Jakarta	67,77	68,03	68,16	4,72	4,67	4,80	20,70	19,10	19,66
Jawa Barat	42,45	44,70	46,24	3,54	3,22	3,37	31,73	30,05	28,64
Jawa Tengah	31,72	35,13	34,72	3,86	3,29	3,56	36,53	34,87	34,16
DI Yogyakarta	43,22	41,94	45,31	3,90	3,92	3,48	30,51	30,06	29,58
Jawa Timur	30,99	32,66	32,94	3,93	4,03	3,87	35,61	33,60	33,78
Banten	57,26	58,95	58,58	3,18	4,41	2,88	23,53	24,49	22,91
Bali	43,35	43,64	42,95	4,33	3,69	4,25	30,07	32,38	29,19
Nusa Tenggara Barat	23,39	20,56	24,03	2,49	2,58	2,77	40,59	43,52	38,69
Nusa Tenggara Timur	19,59	20,42	19,80	1,50	1,88	1,61	46,92	40,15	44,64
Kalimantan Barat	31,26	33,38	31,27	3,32	2,74	3,17	35,37	37,62	37,68
Kalimantan Tengah	37,13	38,83	42,26	3,51	3,84	3,30	38,61	34,65	33,49
Kalimantan Selatan	34,04	32,25	38,07	2,93	2,68	3,41	39,61	39,74	35,86
Kalimantan Timur	52,14	58,94	56,04	3,79	2,05	4,30	29,95	27,11	26,00
Kalimantan Utara	-	51,37	52,00	-	3,43	4,82	-	31,84	31,16
Sulawesi Utara	38,78	34,22	36,41	3,43	4,42	4,04	36,19	38,80	34,45
Sulawesi Tengah	28,98	26,73	28,73	4,29	4,07	4,64	40,20	39,70	40,77
Sulawesi Selatan	32,67	33,07	33,45	3,78	3,49	3,50	39,22	40,92	38,59
Sulawesi Tenggara	28,36	30,13	27,31	3,78	3,90	3,17	39,84	40,21	39,30
Gorontalo	30,01	30,36	33,26	3,41	3,73	3,88	40,61	40,60	39,50
Sulawesi Barat	24,81	22,11	23,45	2,01	2,32	2,87	40,99	45,00	42,51
Maluku	32,45	33,14	30,08	1,15	1,45	1,90	44,63	46,12	42,59
Maluku Utara	26,95	28,66	28,02	3,36	3,03	3,38	43,37	42,44	40,39
Papua Barat	35,65	37,99	36,91	2,76	1,63	2,54	37,07	35,08	37,64
Papua	16,50	21,57	17,56	0,82	1,00	0,95	41,93	42,13	42,91
Indonesia	36,97	38,58	38,70	3,65	3,48	3,54	34,69	33,47	32,85

Lampiran 10 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Status Pekerjaan Utama, 2014–2015 (lanjutan)

Provinsi	Pekerja Bebas			Pekerja Keluarga			Pekerja Rentan ^{*)}		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	6,89	7,50	9,53	15,67	14,43	16,08	60,15	55,39	60,50
Sumatera Utara	6,01	8,65	8,47	17,47	17,12	17,27	57,50	59,90	60,14
Sumatera Barat	9,93	10,42	11,91	12,94	15,69	13,73	64,51	63,08	64,41
Riau	7,53	8,47	9,81	12,95	13,06	9,99	54,44	51,67	48,64
Jambi	6,66	6,02	8,41	16,80	15,41	14,87	62,56	55,50	58,65
Sumatera Selatan	4,48	6,07	5,43	20,93	20,30	20,75	62,54	63,47	61,31
Bengkulu	6,37	7,95	8,82	19,80	22,27	20,99	65,79	68,73	68,81
Lampung	11,87	12,25	13,68	19,45	19,14	19,49	70,67	70,16	70,83
Kep. Bangka Belitung	6,92	3,71	7,40	12,49	11,33	13,38	51,04	50,37	54,13
Kepulauan Riau	2,82	3,60	2,71	4,43	4,36	4,12	30,88	28,83	28,10
DKI Jakarta	2,25	2,60	2,65	4,56	5,60	4,74	27,51	27,30	27,04
Jawa Barat	14,18	13,18	14,64	8,10	8,84	7,11	54,01	52,08	50,39
Jawa Tengah	13,18	13,01	14,21	14,71	13,69	13,35	64,42	61,58	61,72
DI Yogyakarta	7,62	9,46	9,72	14,75	14,61	11,92	52,88	54,13	51,21
Jawa Timur	13,03	13,09	13,73	16,45	16,63	15,68	65,08	63,32	63,19
Banten	9,92	6,15	9,46	6,12	6,01	6,17	39,57	36,64	38,54
Bali	8,94	6,45	9,85	13,31	13,85	13,75	52,32	52,67	52,80
Nusa Tenggara Barat	17,33	14,79	19,91	16,20	18,55	14,60	74,13	76,86	73,20
Nusa Tenggara Timur	3,06	3,79	3,05	28,94	33,76	30,90	78,91	77,70	78,60
Kalimantan Barat	4,97	6,43	5,49	25,09	19,83	22,40	65,42	63,88	65,56
Kalimantan Tengah	3,48	4,33	4,82	17,27	18,34	16,13	59,36	57,32	54,44
Kalimantan Selatan	6,32	4,97	7,30	17,11	20,36	15,37	63,04	65,08	58,52
Kalimantan Timur	3,99	2,90	6,31	10,12	9,00	7,35	44,07	39,01	39,66
Kalimantan Utara	-	6,58	2,64	-	6,79	9,38	-	45,21	43,18
Sulawesi Utara	13,51	11,55	16,36	8,10	11,02	8,74	57,79	61,36	59,55
Sulawesi Tengah	7,38	9,44	7,69	19,14	20,06	18,16	66,72	69,20	66,63
Sulawesi Selatan	5,55	4,62	5,51	18,78	17,90	18,95	63,55	63,44	63,05
Sulawesi Tenggara	5,42	3,33	5,78	22,59	22,44	24,43	67,86	65,97	69,52
Gorontalo	12,26	9,18	12,08	13,71	16,12	11,28	66,58	65,90	62,86
Sulawesi Barat	6,59	7,15	6,16	25,59	23,42	25,00	73,18	75,58	73,68
Maluku	3,08	3,85	3,78	18,69	15,44	21,65	66,40	65,41	68,02
Maluku Utara	5,37	6,13	6,23	20,95	19,73	21,98	69,69	68,30	68,60
Papua Barat	3,49	4,73	3,42	21,03	20,57	19,50	61,59	60,38	60,55
Papua	1,60	1,17	1,44	39,15	34,12	37,14	82,67	77,43	81,49
Indonesia	10,03	9,83	10,92	14,66	14,64	13,99	59,38	57,94	57,76

Keterangan: ^{*)} Pekerja rentan mencakup berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga

Lampiran 11 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa	Pertanian	Manufaktur	Jasa-jasa
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	44,09	12,27	43,64	41,20	14,55	44,25	44,83	12,73	42,44
Sumatera Utara	42,52	15,09	42,38	40,24	15,63	44,13	41,30	14,22	44,49
Sumatera Barat	37,55	14,32	48,13	39,00	14,92	46,08	39,20	13,69	47,11
Riau	44,28	13,87	41,85	46,09	11,18	42,72	42,61	13,41	43,99
Jambi	49,38	10,23	40,40	49,88	13,60	36,53	52,86	10,07	37,07
Sumatera Selatan	53,37	10,77	35,87	49,83	13,24	36,93	54,74	10,97	34,29
Bengkulu	50,62	9,39	39,99	46,48	12,26	41,26	54,21	10,03	35,76
Lampung	48,87	13,47	37,66	47,12	15,81	37,07	48,78	16,20	35,02
Kep. Bangka Belitung	31,41	28,74	39,85	28,64	24,24	47,12	36,63	22,96	40,40
Kepulauan Riau	10,21	33,87	55,92	14,56	32,03	53,42	11,03	35,00	53,97
DKI Jakarta	0,58	19,82	79,59	0,77	19,66	79,58	0,42	19,89	79,68
Jawa Barat	19,87	29,07	51,06	20,37	29,04	50,59	16,47	31,09	52,44
Jawa Tengah	31,26	27,54	41,20	31,11	27,94	40,96	28,66	30,15	41,19
DI Yogyakarta	25,41	22,32	52,27	25,10	26,50	48,40	23,08	23,77	53,15
Jawa Timur	37,61	21,83	40,56	36,42	22,15	41,42	36,57	22,54	40,89
Banten	12,46	33,83	53,71	13,35	31,80	54,85	13,02	31,90	55,09
Bali	23,26	23,75	53,00	23,48	24,23	52,29	22,40	21,48	56,12
Nusa Tenggara Barat	43,13	15,86	41,01	44,56	16,33	39,11	39,01	18,52	42,47
Nusa Tenggara Timur	60,77	12,40	26,83	63,30	7,53	29,17	61,65	10,52	27,82
Kalimantan Barat	57,76	13,04	29,21	51,30	12,60	36,10	57,81	10,42	31,77
Kalimantan Tengah	53,11	13,06	33,83	42,76	19,36	37,88	46,32	15,18	38,50
Kalimantan Selatan	39,81	15,91	44,28	39,55	15,66	44,79	36,01	16,16	47,83
Kalimantan Timur	27,84	22,78	49,38	20,49	19,05	60,46	22,50	22,86	54,65
Kalimantan Utara	-	-	-	38,74	15,50	45,76	34,65	15,18	50,17
Sulawesi Utara	32,73	17,82	49,46	34,48	12,65	52,87	31,93	17,42	50,65
Sulawesi Tengah	47,68	11,90	40,42	50,68	10,97	38,35	50,03	11,59	38,37
Sulawesi Selatan	41,81	12,48	45,71	40,97	13,61	45,42	41,73	13,86	44,41
Sulawesi Tenggara	42,62	13,83	43,55	39,23	14,28	46,49	45,52	14,07	40,41
Gorontalo	39,24	17,01	43,75	33,79	14,54	51,66	34,66	16,30	49,04
Sulawesi Barat	56,84	10,69	32,47	56,18	12,60	31,22	58,53	12,20	29,27
Maluku	48,09	8,79	43,12	40,86	10,51	48,64	46,79	9,52	43,69
Maluku Utara	52,51	9,48	38,02	49,99	9,92	40,09	50,23	11,13	38,64
Papua Barat	45,28	12,37	42,35	43,27	12,59	44,14	42,11	10,57	47,32
Papua	70,59	4,59	24,82	68,76	6,19	25,05	73,93	4,59	21,47
Indonesia	34,00	21,16	44,84	33,20	21,37	45,43	32,88	21,84	45,28

Lampiran 12 Indikator Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Pekerja Paruh Waktu Menurut Provinsi, 2014–2015

Provinsi	Pekerja Paruh Waktu (ribu)			Tingkat Pekerja Paruh Waktu (persen)			Share Perempuan pada Pekerja Paruh Waktu (persen)		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	570	532	512	29,49	25,51	26,03	51,54	61,65	54,56
Sumatera Utara	1 371	1 417	1 370	23,30	22,96	22,98	56,22	57,70	56,85
Sumatera Barat	548	554	491	25,15	23,75	22,48	54,29	57,38	56,29
Riau	695	756	639	27,61	27,24	25,00	44,44	48,79	44,61
Jambi	535	522	501	35,87	31,71	32,31	44,12	49,82	45,07
Sumatera Selatan	1 166	927	1 024	31,59	24,29	27,69	49,33	52,85	53,80
Bengkulu	225	216	229	25,95	22,92	25,27	53,63	55,62	55,52
Lampung	1 098	1 090	1 082	29,91	27,80	29,77	50,07	50,95	46,56
Kep. Bangka Belitung	127	119	116	21,04	17,77	18,52	50,66	54,99	59,58
Kepulauan Riau	86	105	90	10,51	12,85	10,74	50,86	43,17	54,43
DKI Jakarta	345	553	387	7,44	10,88	8,18	61,12	56,00	62,15
Jawa Barat	3 245	2 870	2 792	16,88	14,03	14,86	54,16	56,97	51,64
Jawa Tengah	3 713	3 732	3 443	22,44	21,55	20,95	58,53	59,20	59,66
DI Yogyakarta	398	372	352	20,35	18,50	18,64	63,04	59,01	58,63
Jawa Timur	4 807	4 779	4 615	24,90	24,14	23,83	57,05	58,39	59,28
Banten	602	684	573	12,40	13,13	11,88	56,23	55,77	56,87
Bali	456	491	418	20,04	20,23	17,97	60,68	60,35	61,23
Nusa Tenggara Barat	404	423	439	19,28	18,48	20,63	56,74	64,80	59,28
Nusa Tenggara Timur	814	763	852	37,44	32,73	38,40	56,44	61,45	55,64
Kalimantan Barat	655	619	593	29,40	27,42	26,53	57,86	56,08	56,40
Kalimantan Tengah	334	241	283	28,89	19,33	23,31	50,63	61,37	53,58
Kalimantan Selatan	571	553	512	30,59	28,09	27,10	53,26	59,68	55,50
Kalimantan Timur	297	251	207	17,69	16,38	14,54	47,89	56,76	47,99
Kalimantan Utara	-	42	42	-	15,65	15,55	-	58,14	45,91
Sulawesi Utara	191	221	169	19,44	20,48	16,88	42,03	51,33	44,25
Sulawesi Tengah	369	383	343	28,54	27,66	25,83	49,64	53,59	50,23
Sulawesi Selatan	1 014	928	969	28,75	26,23	27,80	50,02	52,76	48,94
Sulawesi Tenggara	309	275	309	29,80	24,46	28,76	57,58	59,48	57,75
Gorontalo	93	109	100	19,37	20,97	20,20	56,61	50,98	51,81
Sulawesi Barat	245	276	234	41,15	43,42	39,29	50,32	49,22	50,35
Maluku	145	154	145	24,10	23,27	22,11	55,19	56,72	61,90
Maluku Utara	124	103	123	27,22	20,95	25,53	56,10	61,63	54,32
Papua Barat	86	76	80	22,77	19,64	20,91	57,89	56,39	51,24
Papua	449	499	542	27,73	30,29	32,38	54,63	47,73	51,56
Indonesia	26 087	25 634	24 574	22,76	21,21	21,40	54,67	56,72	55,24

**Lampiran 13 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Jenis Kelamin, Daerah Tempat Tinggal, dan Jumlah Jam Kerja, 2014–2015**

Jumlah Jam Kerja	2014		2015	
	(1)	Agustus (2)	Februari (3)	Agustus (4)
Total		100,00	100,00	100,00
0 jam *		2,41	2,10	1,72
1–14 jam		5,83	6,24	5,63
15–24 jam		11,97	10,89	11,37
25–34 jam		13,40	12,39	12,89
35–39 jam		9,66	10,35	9,86
40–48 jam		30,76	30,34	32,22
49–59 jam		14,78	15,30	14,81
60 jam ke atas		11,19	12,39	11,51
Laki-Laki		100,00	100,00	100,00
0 jam *		2,58	2,25	1,85
1–14 jam		3,66	4,00	3,43
15–24 jam		9,22	8,39	8,72
25–34 jam		12,14	10,99	11,53
35–39 jam		9,14	8,84	9,32
40–48 jam		34,69	34,77	36,24
49–59 jam		17,21	18,09	17,11
60 jam ke atas		11,36	12,67	11,80
Perempuan		100,00	100,00	100,00
0 jam *		2,13	1,87	1,50
1–14 jam		9,43	9,71	9,36
15–24 jam		16,52	14,77	15,85
25–34 jam		15,50	14,57	15,17
35–39 jam		10,50	12,68	10,79
40–48 jam		24,25	23,48	25,41
49–59 jam		10,76	10,98	10,92
60 jam ke atas		10,91	11,94	11,01
Perkotaan		100,00	100,00	100,00
0 jam *		2,17	2,00	1,41
1–14 jam		3,73	4,48	3,66
15–24 jam		7,04	7,46	6,94
25–34 jam		8,67	8,81	8,60
35–39 jam		8,06	9,18	8,57
40–48 jam		39,23	36,68	40,31
49–59 jam		15,98	16,08	15,61
60 jam ke atas		15,12	15,31	14,90
Perdesaan		100,00	100,00	100,00
0 jam *		2,64	2,22	2,05
1–14 jam		7,81	8,34	7,73
15–24 jam		16,62	15,02	16,10
25–34 jam		17,87	16,69	17,46
35–39 jam		11,16	11,75	11,25
40–48 jam		22,77	22,74	23,57
49–59 jam		13,64	14,36	13,96
60 jam ke atas		7,49	8,88	7,88

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014-2015

Provinsi	0 jam*			1-14 jam			15-24 jam		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	3,81	2,62	1,66	8,62	7,87	6,65	18,35	13,60	16,28
Sumatera Utara	2,02	1,77	1,24	5,52	5,73	5,21	12,46	11,76	13,09
Sumatera Barat	3,20	3,22	2,36	7,57	8,19	6,77	14,35	15,02	12,59
Riau	2,79	2,11	1,82	6,70	8,01	6,73	12,98	15,28	14,45
Jambi	2,83	1,56	1,79	7,17	5,97	5,32	19,49	18,32	16,86
Sumatera Selatan	2,48	1,79	2,44	5,25	5,69	4,42	18,00	13,81	15,55
Bengkulu	3,10	2,07	2,93	6,43	8,02	5,64	13,70	11,74	15,60
Lampung	2,25	2,85	2,37	6,54	7,27	7,37	16,42	14,34	15,25
Kep Bangka Belitung	3,27	2,34	1,61	4,54	4,71	3,47	11,82	9,76	10,13
Kepulauan Riau	2,00	1,40	1,58	2,65	4,57	2,03	5,41	5,40	5,81
DKI Jakarta	1,56	1,13	0,86	2,13	4,48	2,52	3,57	4,53	3,51
Jawa Barat	2,31	1,64	1,46	3,76	4,11	4,20	9,59	8,06	8,86
Jawa Tengah	2,97	2,46	2,12	6,07	5,79	5,56	11,03	10,41	10,36
DI Yogyakarta	2,35	1,37	1,12	7,46	5,79	5,99	8,36	8,41	8,07
Jawa Timur	1,82	1,71	1,24	6,84	7,24	6,74	12,47	11,66	12,22
Banten	2,09	2,27	1,38	4,12	4,05	3,24	7,47	6,82	6,70
Bali	1,93	1,99	1,70	4,31	5,03	3,82	7,88	7,88	6,98
Nusa Tenggara Barat	2,79	3,15	3,13	9,04	9,85	8,33	15,25	13,25	14,82
Nusa Tenggara Timur	3,77	2,13	2,16	11,22	8,51	11,05	17,84	15,66	20,31
Kalimantan Barat	2,15	2,40	0,84	5,14	6,54	4,91	18,04	15,37	14,75
Kalimantan Tengah	2,11	3,17	1,81	5,56	6,18	5,93	15,34	11,22	12,23
Kalimantan Selatan	2,63	2,55	2,79	6,82	7,59	7,42	14,32	14,18	12,74
Kalimantan Timur	2,01	2,17	1,38	3,81	4,29	2,79	8,70	8,34	6,78
Kalimantan Utara	-	6,03	1,99	-	2,95	2,57	-	9,83	6,70
Sulawesi Utara	2,33	1,43	1,85	4,14	5,42	4,05	11,45	10,19	10,68
Sulawesi Tengah	4,19	3,68	3,05	8,62	9,24	7,79	13,61	15,44	13,78
Sulawesi Selatan	2,75	3,05	2,58	9,05	10,59	9,28	13,57	13,03	14,03
Sulawesi Tenggara	3,51	3,57	2,49	9,37	8,63	9,17	15,34	11,73	13,66
Gorontalo	3,69	4,05	2,76	5,32	8,41	5,94	11,22	9,36	10,91
Sulawesi Barat	3,95	3,55	3,86	15,45	16,18	15,93	19,91	17,33	19,41
Maluku	3,30	2,93	1,66	4,95	6,62	4,44	16,01	13,40	13,08
Maluku Utara	3,09	1,99	1,79	7,80	6,97	7,48	14,29	14,67	15,41
Papua Barat	3,20	3,36	2,66	4,52	5,53	3,39	13,12	9,98	12,17
Papua	0,48	1,49	0,78	3,16	7,99	3,37	15,01	12,15	13,64
Indonesia	2,41	2,10	1,72	5,83	6,24	5,63	11,97	10,89	11,37

*0 jam: Sementara tidak bekerja

Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014-2015
(lanjutan)

Provinsi	25-34 jam			35-39 jam			40-48 jam		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Aceh	17,65	16,55	17,96	11,45	12,94	13,60	21,10	24,34	23,74
Sumatera Utara	13,60	14,70	14,82	11,14	12,28	11,58	32,70	27,07	30,82
Sumatera Barat	14,99	14,15	14,53	10,26	10,61	10,61	24,32	24,05	26,29
Riau	15,57	13,44	13,63	9,36	12,46	9,86	27,34	23,51	26,81
Jambi	18,83	19,06	20,19	13,44	13,23	12,72	20,51	23,17	24,62
Sumatera Selatan	18,74	15,03	18,16	10,67	12,41	11,56	22,40	24,87	27,04
Bengkulu	15,93	13,31	17,05	12,06	14,50	13,01	26,04	25,84	24,92
Lampung	14,39	14,37	15,33	10,56	9,84	10,76	24,98	25,85	25,03
Kep. Bangka Belitung	12,59	10,85	13,47	11,03	13,58	10,45	33,30	33,67	36,44
Kepulauan Riau	5,73	6,43	6,43	5,52	8,20	7,22	42,92	46,66	43,73
DKI Jakarta	4,34	4,99	4,60	3,74	5,51	5,59	51,71	48,03	48,96
Jawa Barat	11,64	9,41	10,11	8,41	9,26	8,26	36,17	35,55	38,90
Jawa Tengah	12,50	12,17	11,55	9,08	9,27	9,22	30,34	31,44	32,66
DI Yogyakarta	9,61	9,14	8,78	9,33	9,90	9,05	34,87	36,21	36,97
Jawa Timur	14,27	13,49	13,29	9,53	9,86	9,13	28,00	27,61	30,17
Banten	8,83	7,64	8,43	7,15	9,80	7,79	45,07	44,94	47,26
Bali	10,39	10,20	9,81	8,87	8,35	8,31	30,62	28,25	31,64
Nusa Tenggara Barat	15,79	14,80	15,81	11,27	11,85	10,54	20,85	19,95	22,15
Nusa Tenggara Timur	19,83	18,71	19,90	13,26	14,53	12,87	22,39	25,64	20,88
Kalimantan Barat	16,19	14,85	17,26	11,38	13,08	11,95	28,59	26,28	30,09
Kalimantan Tengah	16,61	11,48	14,47	11,70	11,69	11,79	24,26	24,59	28,12
Kalimantan Selatan	16,92	15,46	15,21	11,67	12,14	11,78	24,78	24,25	25,46
Kalimantan Timur	11,11	9,42	10,87	10,63	10,55	10,37	27,54	27,76	33,43
Kalimantan Utara	-	10,40	11,73	-	10,75	14,98	-	25,95	28,21
Sulawesi Utara	12,23	14,08	11,45	10,24	12,54	10,61	36,21	33,67	38,23
Sulawesi Tengah	16,33	15,36	15,51	12,22	12,56	11,52	23,14	21,06	24,23
Sulawesi Selatan	14,19	12,74	14,17	10,07	8,89	11,39	26,26	25,87	24,81
Sulawesi Tenggara	16,54	13,99	16,36	11,08	12,28	10,60	21,17	20,91	21,04
Gorontalo	12,44	10,68	11,57	10,38	9,62	11,69	22,65	20,76	21,24
Sulawesi Barat	17,10	19,73	16,77	10,69	12,30	10,34	16,12	14,05	17,28
Maluku	16,29	15,13	15,63	13,42	12,64	12,78	21,09	22,52	26,13
Maluku Utara	18,57	14,98	17,98	14,64	14,53	14,25	25,18	25,06	23,41
Papua Barat	17,05	16,06	17,31	12,47	13,09	13,00	27,89	29,36	27,90
Papua	24,60	25,19	27,05	19,86	17,65	21,67	25,81	23,26	23,55
Indonesia	13,40	12,39	12,89	9,66	10,35	9,86	30,76	30,34	32,22

**Lampiran 14 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Jumlah Jam Kerja, 2014-2015
(lanjutan)**

Provinsi	49-59 jam			60 jam ke atas		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Aceh	11,14	13,81	12,24	7,88	8,27	7,87
Sumatera Utara	11,92	14,48	11,68	10,64	12,22	11,56
Sumatera Barat	14,98	14,60	15,15	10,34	10,17	11,69
Riau	13,79	12,79	13,99	11,47	12,40	12,72
Jambi	11,62	11,48	11,72	6,11	7,20	6,78
Sumatera Selatan	12,86	14,04	12,37	9,60	12,35	8,47
Bengkulu	13,51	16,05	13,12	9,21	8,46	7,72
Lampung	17,34	17,10	17,11	7,53	8,37	6,78
Kep. Bangka Belitung	14,58	17,18	15,42	8,87	7,92	9,01
Kepulauan Riau	18,72	15,90	19,12	17,05	11,44	14,09
DKI Jakarta	14,22	15,12	13,32	18,71	16,20	20,63
Jawa Barat	14,46	15,79	14,45	13,65	16,18	13,77
Jawa Tengah	17,70	17,16	17,75	10,32	11,29	10,78
DI Yogyakarta	16,95	18,68	18,99	11,06	10,51	11,03
Jawa Timur	16,25	16,22	15,89	10,83	12,20	11,33
Banten	12,84	13,05	12,68	12,44	11,42	12,52
Bali	21,18	20,84	22,95	14,81	17,46	14,79
Nusa Tenggara Barat	15,92	16,75	15,80	9,10	10,41	9,42
Nusa Tenggara Timur	6,11	8,86	7,10	5,58	5,98	5,74
Kalimantan Barat	11,70	12,85	12,02	6,81	8,64	8,18
Kalimantan Tengah	14,58	15,79	14,17	9,84	15,88	11,47
Kalimantan Selatan	13,24	13,30	14,77	9,61	10,54	9,83
Kalimantan Timur	16,66	16,53	17,04	19,53	20,94	17,35
Kalimantan Utara	-	18,82	17,41	-	15,29	16,40
Sulawesi Utara	11,89	9,63	11,15	11,50	13,03	11,97
Sulawesi Tengah	12,91	12,44	14,30	8,98	10,23	9,82
Sulawesi Selatan	14,40	14,41	14,19	9,70	11,42	9,55
Sulawesi Tenggara	14,13	16,29	16,24	8,85	12,60	10,44
Gorontalo	20,29	19,94	18,30	14,00	17,17	17,58
Sulawesi Barat	11,78	10,79	11,05	5,01	6,07	5,36
Maluku	12,76	11,99	12,99	12,16	14,75	13,30
Maluku Utara	9,28	10,67	11,65	7,15	11,13	8,03
Papua Barat	10,23	13,14	11,75	11,52	9,48	11,81
Papua	5,06	6,55	5,02	6,02	5,73	4,92
Indonesia	14,78	15,30	14,81	11,19	12,39	11,51

**Lampiran 15 Persentase Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja
Menurut Provinsi dan Sektor Formal/Informal, 2014-2015**

Provinsi	Formal			Informal		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	44,21	48,72	43,26	55,79	51,28	56,74
Sumatera Utara	47,34	45,42	44,65	52,66	54,58	55,35
Sumatera Barat	42,85	44,92	42,28	57,15	55,08	57,72
Riau	50,38	52,19	56,07	49,62	47,81	43,93
Jambi	42,20	48,45	45,47	57,80	51,55	54,53
Sumatera Selatan	41,76	41,25	42,67	58,24	58,75	57,33
Bengkulu	38,83	37,35	35,46	61,17	62,65	64,54
Lampung	34,73	35,76	35,10	65,27	64,24	64,90
Kep. Bangka Belitung	54,49	55,06	51,27	45,51	44,94	48,73
Kepulauan Riau	73,35	74,07	75,77	26,65	25,93	24,23
DKI Jakarta	78,40	78,33	78,51	21,60	21,67	21,49
Jawa Barat	53,20	54,48	56,20	46,80	45,52	43,80
Jawa Tengah	43,22	45,26	45,93	56,78	54,74	54,07
DI Yogyakarta	53,94	53,55	55,08	46,06	46,45	44,92
Jawa Timur	41,63	43,34	43,59	58,37	56,66	56,41
Banten	65,64	68,69	66,54	34,36	31,31	33,46
Bali	55,61	56,39	55,92	44,39	43,61	44,08
Nusa Tenggara Barat	31,49	29,71	34,33	68,51	70,29	65,67
Nusa Tenggara Timur	24,89	25,17	25,30	75,11	74,83	74,70
Kalimantan Barat	37,74	39,89	37,82	62,26	60,11	62,18
Kalimantan Tengah	44,76	48,64	50,74	55,24	51,36	49,26
Kalimantan Selatan	43,07	43,09	48,01	56,93	56,91	51,99
Kalimantan Timur	61,21	66,11	65,23	38,79	33,89	34,77
Kalimantan Utara	-	57,75	60,86	-	42,25	39,14
Sulawesi Utara	45,78	43,64	45,10	54,22	56,36	54,90
Sulawesi Tengah	38,87	36,98	39,28	61,13	63,02	60,72
Sulawesi Selatan	42,45	43,30	42,75	57,55	56,70	57,25
Sulawesi Tenggara	38,93	41,97	36,62	61,07	58,03	63,38
Gorontalo	39,73	42,42	42,52	60,27	57,58	57,48
Sulawesi Barat	32,36	30,33	31,22	67,64	69,67	68,78
Maluku	36,95	38,84	36,45	63,05	61,16	63,55
Maluku Utara	34,41	36,01	36,15	65,59	63,99	63,85
Papua Barat	43,27	45,48	44,37	56,73	54,52	55,63
Papua	19,27	24,51	20,04	80,73	75,49	79,96
Indonesia	46,76	48,15	48,28	53,24	51,85	51,72

Lampiran 16 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014-2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	7,78	11,16	9,02	7,27	8,42	7,73	8,44	12,49	9,93
Sumatera Utara	5,41	7,52	6,23	5,52	7,63	6,39	6,08	7,67	6,71
Sumatera Barat	6,18	7,00	6,50	4,92	7,51	5,99	6,68	7,21	6,89
Riau	5,62	8,52	6,56	6,51	7,08	6,72	6,15	11,36	7,83
Jambi	4,21	6,73	5,08	2,83	2,57	2,73	4,00	4,98	4,34
Sumatera Selatan	5,57	3,97	4,96	5,50	4,28	5,03	5,88	6,39	6,07
Bengkulu	2,88	4,42	3,47	2,14	4,81	3,21	4,44	5,65	4,91
Lampung	4,09	6,10	4,79	2,69	4,71	3,44	4,37	6,68	5,14
Kep Bangka Belitung	4,56	6,37	5,14	3,74	2,66	3,35	5,27	8,31	6,29
Kepulauan Riau	5,60	8,87	6,69	7,98	11,23	9,05	6,10	6,41	6,20
DKI Jakarta	7,90	9,45	8,47	7,77	9,25	8,36	7,57	6,67	7,23
Jawa Barat	8,07	9,21	8,45	8,28	8,62	8,40	8,39	9,42	8,72
Jawa Tengah	5,55	5,86	5,68	5,10	5,59	5,31	5,56	4,16	4,99
DI Yogyakarta	3,88	2,65	3,33	5,23	2,59	4,07	3,72	4,54	4,07
Jawa Timur	4,31	4,01	4,19	4,51	4,02	4,31	4,48	4,46	4,47
Banten	9,02	9,15	9,07	9,13	7,61	8,58	9,37	9,92	9,55
Bali	2,19	1,55	1,90	1,41	1,31	1,37	2,22	1,70	1,99
Nusa Tenggara Barat	6,41	4,85	5,75	5,43	4,45	4,98	6,73	4,24	5,69
Nusa Tenggara Timur	3,23	3,30	3,26	2,53	3,83	3,12	3,19	4,68	3,83
Kalimantan Barat	4,04	4,04	4,04	5,60	3,52	4,78	5,62	4,40	5,15
Kalimantan Tengah	3,25	3,24	3,24	3,30	2,87	3,14	4,28	5,01	4,54
Kalimantan Selatan	3,94	3,56	3,80	5,03	4,54	4,83	4,93	4,90	4,92
Kalimantan Timur	6,71	8,87	7,38	6,72	8,04	7,17	6,86	9,07	7,50
Kalimantan Utara	-	-	-	4,04	9,82	5,79	5,31	6,56	5,68
Sulawesi Utara	6,03	10,71	7,54	6,41	12,69	8,69	7,13	13,02	9,03
Sulawesi Tengah	3,13	4,68	3,68	3,10	2,79	2,99	3,41	5,36	4,10
Sulawesi Selatan	4,26	6,41	5,08	6,36	4,90	5,81	5,57	6,58	5,95
Sulawesi Tenggara	4,11	4,93	4,43	3,12	4,34	3,62	4,27	7,49	5,55
Gorontalo	3,89	4,72	4,18	2,70	3,63	3,06	3,99	5,82	4,65
Sulawesi Barat	1,16	3,43	2,08	1,66	2,01	1,81	2,24	5,07	3,35
Maluku	9,20	12,69	10,51	4,65	9,85	6,72	8,18	12,61	9,93
Maluku Utara	4,39	6,93	5,29	5,02	6,43	5,56	4,89	8,13	6,05
Papua Barat	4,71	5,55	5,02	4,93	4,07	4,61	6,71	10,42	8,08
Papua	3,56	3,28	3,44	3,87	3,51	3,72	4,24	3,63	3,99
Indonesia	5,75	6,26	5,94	5,76	5,89	5,81	6,07	6,37	6,18

**Lampiran 17 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan (persen),
2014-2015**

Provinsi	Pendidikan Dasar ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	5,91	4,40	4,63	14,07	11,83	17,32	9,95	11,18	10,99
Sumatera Utara	4,02	4,80	3,51	9,03	8,06	10,14	8,68	9,19	9,93
Sumatera Barat	4,64	3,08	3,25	9,89	9,69	12,63	7,69	10,63	8,99
Riau	4,31	3,30	5,47	9,35	10,82	11,14	10,84	12,03	9,51
Jambi	2,81	1,59	1,88	9,43	5,60	9,07	8,44	1,98	7,20
Sumatera Selatan	2,61	2,59	3,46	10,78	10,72	12,46	6,16	6,04	6,35
Bengkulu	1,90	0,96	2,30	6,15	4,45	8,28	5,31	10,31	9,72
Lampung	2,95	2,10	2,72	9,66	6,07	11,15	5,85	6,56	6,90
Kep. Bangka Belitung	3,60	2,35	3,98	8,44	5,40	11,10	6,66	3,71	6,92
Kepulauan Riau	4,80	4,87	4,84	9,20	12,94	7,82	3,11	8,92	4,73
DKI Jakarta	10,10	10,46	4,80	8,70	8,69	10,00	5,31	4,51	5,46
Jawa Barat	6,55	7,62	6,70	14,27	11,59	14,07	4,78	4,92	5,99
Jawa Tengah	4,74	5,45	3,10	9,67	5,53	10,64	3,42	3,31	6,06
DI Yogyakarta	1,42	2,00	2,15	5,65	6,21	6,21	4,48	7,02	5,26
Jawa Timur	2,71	3,16	2,23	8,73	7,38	9,94	3,74	4,58	5,58
Banten	7,98	8,78	8,50	12,35	10,39	13,00	4,85	3,96	4,92
Bali	0,90	1,03	0,82	3,09	1,90	3,15	2,89	1,43	3,79
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,71	3,93	12,45	7,97	9,47	6,69	8,18	7,88
Nusa Tenggara Timur	1,58	1,35	1,48	7,67	6,65	9,74	8,49	8,78	9,64
Kalimantan Barat	2,58	4,11	3,54	8,56	6,47	9,58	5,78	5,58	7,00
Kalimantan Tengah	2,09	2,05	3,05	6,22	4,25	8,50	4,37	7,23	4,53
Kalimantan Selatan	2,54	3,72	3,28	7,60	6,55	8,46	4,11	8,88	6,86
Kalimantan Timur	5,21	6,15	5,83	10,95	9,94	10,59	5,87	3,82	3,83
Kalimantan Utara	-	4,20	3,84	-	8,23	9,12	-	8,02	4,60
Sulawesi Utara	4,26	4,96	4,90	11,71	14,06	15,48	10,32	10,20	8,73
Sulawesi Tengah	2,15	2,02	2,35	7,05	4,53	8,50	5,70	5,36	4,09
Sulawesi Selatan	2,36	3,61	2,40	9,08	10,90	12,04	9,58	5,98	9,19
Sulawesi Tenggara	1,77	1,77	2,60	8,94	4,27	10,45	7,01	7,94	8,50
Gorontalo	2,31	1,60	1,81	10,36	7,31	12,73	7,19	4,02	5,51
Sulawesi Barat	1,93	0,82	1,96	2,71	3,83	6,30	1,99	6,35	6,65
Maluku	3,25	2,37	2,99	19,89	8,93	18,11	16,35	17,16	14,92
Maluku Utara	2,22	3,13	2,64	10,26	8,54	11,05	8,57	10,40	9,39
Papua Barat	1,76	2,12	2,17	8,05	7,24	16,44	11,36	8,98	10,95
Papua	1,77	1,16	1,81	8,44	10,08	11,34	9,88	8,44	7,85
Indonesia	4,20	4,64	3,77	10,17	8,50	11,16	5,78	5,86	6,68

Lampiran 18 Persentase Pengangguran Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Provinsi	Pendidikan Dasar Kebawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	35,86	30,66	23,68	48,56	46,15	60,02	15,58	23,18	16,30
Sumatera Utara	35,65	41,10	26,86	51,44	45,08	56,82	12,91	13,82	16,31
Sumatera Barat	42,54	29,84	26,56	43,30	45,27	56,67	14,16	24,89	16,77
Riau	38,37	27,81	38,31	45,31	51,01	47,12	16,32	21,18	14,57
Jambi	35,47	36,30	27,19	47,54	56,48	54,93	16,98	7,22	17,89
Sumatera Selatan	34,54	33,44	37,02	53,16	56,38	53,58	12,30	10,19	9,40
Bengkulu	33,11	17,71	27,75	48,72	36,97	47,59	18,16	45,32	24,66
Lampung	41,93	41,26	36,10	48,39	43,13	55,06	9,67	15,61	8,84
Kep. Bangka Belitung	45,22	43,15	38,94	42,12	45,24	50,06	12,66	11,61	11,00
Kepulauan Riau	28,65	23,12	30,16	65,60	66,54	58,42	5,75	10,34	11,42
DKI Jakarta	41,68	44,65	21,26	45,16	42,98	60,35	13,16	12,37	18,39
Jawa Barat	50,35	57,04	46,40	44,82	36,87	45,94	4,83	6,09	7,66
Jawa Tengah	60,47	74,46	43,63	35,43	20,82	46,91	4,10	4,72	9,46
DI Yogyakarta	21,52	26,19	25,86	57,22	50,94	54,28	21,26	22,86	19,86
Jawa Timur	44,91	48,91	33,01	48,32	41,72	56,27	6,77	9,37	10,72
Banten	48,70	52,18	46,31	45,11	40,73	46,62	6,18	7,09	7,07
Bali	24,95	40,64	22,22	54,01	44,61	50,47	21,04	14,74	27,31
Nusa Tenggara Barat	41,09	52,41	44,75	47,02	33,23	39,22	11,89	14,35	16,03
Nusa Tenggara Timur	35,69	30,33	27,60	41,34	42,91	48,45	22,97	26,76	23,95
Kalimantan Barat	46,20	59,21	48,21	43,40	31,44	41,27	10,40	9,36	10,52
Kalimantan Tengah	43,72	41,87	43,84	43,81	34,75	45,98	12,47	23,38	10,17
Kalimantan Selatan	46,19	52,76	43,26	44,14	29,53	41,08	9,67	17,71	15,66
Kalimantan Timur	36,60	42,75	34,61	54,11	49,59	58,09	9,29	7,66	7,30
Kalimantan Utara	-	43,42	35,51	-	41,13	52,58	-	15,45	11,91
Sulawesi Utara	30,42	30,61	28,74	53,95	54,82	59,00	15,64	14,57	12,26
Sulawesi Tengah	38,39	43,83	36,52	44,18	37,88	52,56	17,43	18,29	10,92
Sulawesi Selatan	28,26	36,83	23,62	42,72	47,24	51,90	29,02	15,93	24,48
Sulawesi Tenggara	23,60	25,88	27,60	54,81	33,94	50,05	21,59	40,18	22,35
Gorontalo	40,24	35,25	25,95	42,74	48,68	60,99	17,02	16,07	13,06
Sulawesi Barat	66,26	34,06	40,45	23,79	34,76	38,43	9,95	31,17	21,12
Maluku	16,42	17,67	15,39	59,70	48,85	63,68	23,88	33,49	20,94
Maluku Utara	24,82	33,33	24,86	54,44	44,38	55,42	20,74	22,29	19,71
Papua Barat	19,53	26,41	14,11	47,87	39,70	64,68	32,59	33,89	21,21
Papua	39,18	21,58	33,93	43,38	56,02	53,11	17,43	22,40	12,96
Indonesia	45,01	49,61	37,11	45,48	39,39	50,92	9,51	11,00	11,97

Lampiran 19 Persentase Setengah Penganggur Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Provinsi	Pendidikan Dasar Kewah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus	Agustus	Februari	Agustus
	2014	2015	2015	2014	2015	2015	2014	2015	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	56,71	53,56	53,54	31,53	31,58	34,73	11,75	14,86	11,73
Sumatera Utara	55,31	52,48	54,15	36,47	37,73	37,65	8,22	9,79	8,20
Sumatera Barat	65,86	67,04	64,47	23,07	19,51	26,95	11,07	13,46	8,58
Riau	63,14	65,02	66,30	29,78	24,04	27,42	7,07	10,94	6,28
Jambi	65,61	57,56	68,12	25,79	31,57	25,06	8,60	10,86	6,81
Sumatera Selatan	71,75	67,01	69,00	22,43	26,45	24,29	5,83	6,55	6,71
Bengkulu	62,80	53,76	61,17	28,71	31,30	31,97	8,50	14,94	6,87
Lampung	70,79	61,23	70,58	22,02	28,70	24,55	7,19	10,07	4,87
Kep. Bangka Belitung	70,14	66,98	70,12	24,00	22,81	26,37	5,85	10,22	3,51
Kepulauan Riau	58,26	61,83	57,04	35,99	26,31	39,72	5,75	11,86	3,24
DKI Jakarta	46,21	34,14	36,87	33,18	52,34	41,03	20,61	13,52	22,09
Jawa Barat	82,94	76,63	79,71	12,96	15,81	13,55	4,10	7,56	6,74
Jawa Tengah	80,51	82,27	79,49	15,93	13,22	15,12	3,56	4,52	5,38
DI Yogyakarta	51,02	53,87	48,38	38,21	33,77	32,07	10,78	12,37	19,55
Jawa Timur	80,22	78,52	76,83	15,44	15,23	17,12	4,35	6,26	6,05
Banten	75,74	79,95	77,79	18,08	16,39	15,71	6,18	3,66	6,50
Bali	58,75	60,90	60,51	32,98	33,57	29,97	8,27	5,54	9,53
Nusa Tenggara Barat	74,81	74,81	70,66	19,40	17,31	19,19	5,79	7,87	10,14
Nusa Tenggara Timur	74,21	73,59	71,63	20,06	22,31	22,47	5,73	4,10	5,90
Kalimantan Barat	80,39	68,49	78,06	15,35	24,08	17,10	4,26	7,44	4,83
Kalimantan Tengah	69,47	64,58	70,29	22,69	29,06	24,29	7,84	6,36	5,43
Kalimantan Selatan	76,63	76,75	70,55	17,42	14,61	22,96	5,96	8,64	6,49
Kalimantan Timur	66,12	57,29	61,88	26,77	38,06	29,15	7,11	4,64	8,97
Kalimantan Utara	-	68,44	60,54	-	27,73	34,33	-	3,83	5,13
Sulawesi Utara	64,31	57,34	62,27	30,96	34,53	32,68	4,73	8,13	5,04
Sulawesi Tengah	73,44	71,47	66,66	21,63	22,50	24,00	4,93	6,03	9,34
Sulawesi Selatan	60,45	58,98	62,01	25,05	27,94	24,58	14,50	13,09	13,40
Sulawesi Tenggara	59,35	53,00	54,20	30,52	32,68	32,45	10,13	14,31	13,36
Gorontalo	81,46	75,74	72,73	14,86	16,93	20,59	3,69	7,32	6,68
Sulawesi Barat	58,00	57,78	60,44	32,82	33,33	27,54	9,18	8,89	12,02
Maluku	61,71	53,25	56,32	31,26	36,52	36,98	7,03	10,24	6,70
Maluku Utara	62,79	62,93	63,13	30,61	30,63	30,18	6,59	6,44	6,69
Papua Barat	64,91	59,78	59,95	27,78	31,30	26,62	7,32	8,92	13,43
Papua	88,25	80,91	83,87	10,41	14,70	14,24	1,34	4,39	1,88
Indonesia	73,85	70,38	71,08	20,11	21,72	21,59	6,05	7,90	7,33

Lampiran 20 Penduduk Umur 15 Tahun Ke Atas yang Termasuk Bukan Angkatan Kerja Menurut Provinsi (ribu), 2014–2015

Provinsi	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1 244	1 146	1 258
Sumatera Utara	3 079	2 839	3 108
Sumatera Barat	1 245	1 129	1 288
Riau	1 562	1 346	1 612
Jambi	824	728	830
Sumatera Selatan	1 758	1 678	1 807
Bengkulu	418	356	395
Lampung	1 901	1 744	2 010
Kep. Bangka Belitung	336	294	332
Kepulauan Riau	454	458	479
DKI Jakarta	2 538	2 095	2 578
Jawa Barat	12 459	11 466	13 531
Jawa Tengah	7 635	7 047	8 194
DI Yogyakarta	824	772	912
Jawa Timur	9 429	9 046	9 610
Banten	3 024	2 771	3 237
Bali	776	659	769
Nusa Tenggara Barat	1 113	953	1 134
Nusa Tenggara Timur	1 014	892	1 025
Kalimantan Barat	998	981	1 026
Kalimantan Tengah	547	475	517
Kalimantan Selatan	853	757	863
Kalimantan Timur	1 014	783	928
Kalimantan Utara	-	150	163
Sulawesi Utara	707	602	694
Sulawesi Tengah	668	605	666
Sulawesi Selatan	2 274	2 280	2 376
Sulawesi Tenggara	538	476	527
Gorontalo	296	271	296
Sulawesi Barat	248	219	261
Maluku	431	405	401
Maluku Utara	272	244	260
Papua Barat	185	185	189
Papua	454	447	447
Indonesia	61 119	56 298	63 721

Lampiran 21 Tingkat Ketidaktifan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (persen), 2014-2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	19,20	54,26	36,94	19,01	47,90	33,63	18,90	53,81	36,56
Sumatera Utara	16,77	48,65	32,93	16,73	43,12	30,10	17,62	47,42	32,72
Sumatera Barat	19,75	49,35	34,81	17,81	44,27	31,27	20,37	50,03	35,44
Riau	16,77	57,79	36,69	14,67	48,61	31,15	16,80	57,92	36,78
Jambi	16,15	53,54	34,41	15,24	45,61	30,08	15,35	53,23	33,86
Sumatera Selatan	15,63	47,09	31,15	14,14	45,19	29,46	16,11	47,24	31,47
Bengkulu	17,41	46,54	31,71	13,87	40,14	26,76	14,98	44,22	29,33
Lampung	14,63	52,38	33,01	13,90	47,07	30,05	14,44	55,43	34,40
Kep. Bangka Belitung	14,91	56,03	34,55	14,45	46,58	29,80	15,38	52,90	33,29
Kepulauan Riau	13,82	55,17	34,05	13,18	55,40	33,84	13,37	57,42	34,93
DKI Jakarta	16,06	50,74	33,39	12,90	41,89	27,40	17,42	49,78	33,61
Jawa Barat	17,18	57,70	37,23	15,25	53,00	33,92	18,49	61,26	39,66
Jawa Tengah	17,07	43,07	30,32	15,01	40,13	27,81	17,62	46,11	32,14
DI Yogyakarta	19,07	38,40	28,95	16,05	37,28	26,90	20,05	42,70	31,62
Jawa Timur	16,19	46,83	31,88	15,34	44,80	30,42	16,01	47,57	32,16
Banten	16,70	56,35	36,16	15,46	50,64	32,72	17,94	58,33	37,76
Bali	17,45	32,74	25,09	14,33	27,95	21,14	16,23	32,76	24,49
Nusa Tenggara Barat	19,13	46,19	33,37	17,50	38,09	28,34	18,41	47,02	33,46
Nusa Tenggara Timur	20,00	41,67	31,09	18,76	34,96	27,05	19,42	41,57	30,75
Kalimantan Barat	16,29	44,35	30,07	16,20	42,83	29,27	16,08	45,07	30,32
Kalimantan Tengah	14,70	50,03	31,44	13,13	42,29	26,95	13,10	46,45	28,89
Kalimantan Selatan	14,59	46,75	30,54	12,96	40,85	26,79	14,71	46,13	30,27
Kalimantan Timur	16,58	57,74	35,90	15,37	51,07	32,19	16,36	61,44	37,61
Kalimantan Utara	-	-	-	14,95	56,90	34,30	17,10	59,25	36,55
Sulawesi Utara	20,24	60,53	40,01	17,19	50,96	33,76	18,46	59,74	38,72
Sulawesi Tengah	15,34	51,89	33,24	13,86	46,40	29,79	14,62	51,11	32,49
Sulawesi Selatan	19,77	54,67	37,96	18,66	55,32	37,77	20,99	55,69	39,06
Sulawesi Tenggara	17,84	48,24	33,13	15,57	42,18	28,96	17,08	46,07	31,65
Gorontalo	18,75	55,34	37,16	17,64	49,42	33,63	18,27	54,20	36,35
Sulawesi Barat	14,85	42,82	28,94	12,62	37,72	25,26	14,06	45,20	29,73
Maluku	23,81	54,34	39,08	23,34	49,23	36,29	21,84	49,23	35,53
Maluku Utara	19,37	53,58	36,12	17,31	47,32	32,01	16,42	51,44	33,57
Papua Barat	18,53	46,82	31,70	18,86	45,30	31,19	18,75	45,69	31,32
Papua	14,17	29,51	21,33	12,33	30,34	20,74	12,34	29,67	20,43
Indonesia	16,95	49,78	33,40	15,42	45,52	30,50	17,29	51,13	34,24

Lampiran 22 Persentase Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Tingkat Pendidikan, 2014-2015

Provinsi	Pendidikan Dasar Ke Bawah			Pendidikan Menengah			Pendidikan Tinggi		
	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015	Agustus 2014	Februari 2015	Agustus 2015
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	54,75	53,82	50,85	31,13	30,15	34,41	14,12	16,03	14,73
Sumatera Utara	55,25	54,66	51,40	35,48	35,72	37,59	9,27	9,61	11,02
Sumatera Barat	59,55	57,97	56,27	28,47	27,99	30,89	11,97	14,03	12,84
Riau	58,33	56,51	54,85	31,80	31,66	33,14	9,87	11,83	12,00
Jambi	64,18	62,45	62,93	25,60	27,58	26,28	10,22	9,97	10,78
Sumatera Selatan	65,61	65,04	64,91	24,49	26,48	26,11	9,91	8,48	8,98
Bengkulu	60,61	59,26	59,30	27,52	26,65	28,24	11,87	14,10	12,46
Lampung	68,09	67,43	68,06	24,00	24,40	25,36	7,91	8,17	6,58
Kep. Bangka Belitung	64,58	61,47	61,62	25,66	28,04	28,38	9,77	10,49	10,01
Kepulauan Riau	39,97	42,98	38,67	47,69	46,53	46,35	12,35	10,49	14,98
DKI Jakarta	34,98	35,70	32,04	44,01	41,36	43,63	21,01	22,94	24,33
Jawa Barat	64,92	62,88	60,39	26,53	26,72	28,47	8,54	10,40	11,14
Jawa Tengah	72,40	72,49	70,19	20,80	19,96	22,01	6,81	7,56	7,80
DI Yogyakarta	50,42	53,33	49,04	33,77	33,41	35,59	15,82	13,26	15,38
Jawa Timur	69,25	66,79	66,08	23,18	24,38	25,32	7,57	8,82	8,60
Banten	55,31	50,98	52,03	33,12	33,64	34,25	11,56	15,38	13,72
Bali	52,82	53,78	53,77	33,29	32,11	31,88	13,88	14,12	14,35
Nusa Tenggara Barat	68,07	70,47	64,85	21,71	20,78	23,57	10,22	8,75	11,57
Nusa Tenggara Timur	73,64	70,34	71,42	17,54	20,14	19,06	8,82	9,52	9,52
Kalimantan Barat	72,27	68,79	70,08	20,47	23,21	22,18	7,26	8,00	7,74
Kalimantan Tengah	67,92	64,17	65,26	22,82	25,67	24,55	9,26	10,16	10,19
Kalimantan Selatan	68,98	68,59	64,89	22,08	21,77	23,88	8,95	9,64	11,23
Kalimantan Timur	51,84	49,87	44,56	36,48	35,77	41,15	11,68	14,36	14,29
Kalimantan Utara	-	59,91	52,58	-	28,93	32,73	-	11,16	14,69
Sulawesi Utara	53,84	53,69	52,91	34,73	33,89	34,42	11,43	12,42	12,67
Sulawesi Tengah	65,71	64,82	63,66	23,04	24,99	25,37	11,25	10,19	10,96
Sulawesi Selatan	60,70	59,32	58,48	23,91	25,19	25,65	15,39	15,49	15,86
Sulawesi Tenggara	59,20	52,90	58,83	27,16	28,78	26,58	13,64	18,32	14,59
Gorontalo	72,84	67,40	66,68	17,26	20,36	22,30	9,90	12,24	11,03
Sulawesi Barat	71,32	74,75	68,95	18,27	16,39	20,42	10,41	8,86	10,64
Maluku	53,12	50,09	51,16	31,54	36,79	34,90	15,34	13,12	13,93
Maluku Utara	59,10	59,21	56,97	28,09	28,89	30,33	12,81	11,91	12,70
Papua Barat	55,78	57,32	52,59	29,83	25,27	31,77	14,39	17,41	15,64
Papua	76,22	69,44	74,75	17,71	20,69	18,67	6,07	9,87	6,58
Indonesia	63,65	62,18	60,74	26,58	26,92	28,19	9,77	10,90	11,07

**Lampiran 23 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin
(rupiah), 2014-2015**

Lapangan Usaha	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 402 699	925 513	1 293 505	1 294 772	847 582	1 195 354	1 436 589	928 885	1 336 361
2	3 474 547	2 942 757	3 448 002	3 578 284	1 453 346	3 409 696	3 872 536	2 517 529	3 788 685
3	1 927 994	1 403 925	1 737 621	1 809 063	1 288 604	1 621 450	1 987 911	1 659 978	1 869 267
4	2 639 697	2 279 074	2 609 639	2 341 149	2 895 814	2 408 970	2 691 569	2 586 389	2 683 298
5	1 842 929	2 287 079	1 862 171	1 838 107	6 832 622	2 071 807	1 863 944	3 086 550	1 912 301
6	1 696 287	1 367 794	1 567 419	1 757 402	1 367 474	1 612 073	1 762 174	1 514 322	1 665 513
7	2 336 269	2 373 005	2 340 062	2 801 113	3 422 077	2 868 441	2 279 680	2 955 590	2 354 051
8	2 811 474	2 730 049	2 787 567	2 935 842	2 786 232	2 891 453	2 925 798	3 126 545	2 986 321
9	2 480 644	1 805 146	2 160 627	2 516 192	1 855 327	2 187 924	2 619 203	1 991 937	2 317 363
Total	2 115 072	1 644 458	1 952 589	2 132 279	1 705 548	1 981 725	2 178 407	1 863 399	2 069 803

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalan
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

**Lampiran 24 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai
Menurut Lapangan Usaha dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014-2015**

Lapangan Usaha	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	1 407 011	1 260 602	1 293 505	1 228 003	1 178 841	1 195 354	1 501 914	1 278 445	1 336 36
2	4 821 528	2 173 551	3 448 002	4 798 405	2 078 741	3 409 696	5 123 186	2 304 921	3 788 68
3	1 867 934	1 327 201	1 737 621	1 694 153	1 364 800	1 621 450	2 032 748	1 314 637	1 869 26
4	2 815 446	1 998 499	2 609 639	2 570 791	1 702 898	2 408 970	2 990 572	1 763 718	2 683 29
5	2 047 982	1 491 818	1 862 171	2 328 792	1 531 041	2 071 807	2 144 054	1 437 672	1 912 30
6	1 673 473	1 096 871	1 567 419	1 711 545	1 171 826	1 612 073	1 789 613	1 082 132	1 665 51
7	2 565 399	1 636 000	2 340 062	3 145 564	1 852 034	2 868 441	2 559 672	1 623 623	2 354 05
8	2 976 694	1 689 214	2 787 567	3 060 280	1 730 314	2 891 453	3 186 624	1 685 086	2 986 32
9	2 318 348	1 803 007	2 160 627	2 342 996	1 806 271	2 187 924	2 487 615	1 881 931	2 317 36
Total	2 141 850	1 514 434	1 952 589	2 153 567	1 528 212	1 981 725	2 283 739	1 527 018	2 069 80

Keterangan lapangan usaha:

- 1) Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2) Pertambangan dan Penggalian
- 3) Industri
- 4) Listrik, Gas, dan Air
- 5) Konstruksi
- 6) Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 7) Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 8) Lembaga Keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

Lampiran 25 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin (rupiah),
2014-2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	1 774 938	1 714 430	1 753 751	1 767 835	1 699 469	1 744 567	1 773 896	1 787 016	1 778 391
Sumatera Utara	1 833 122	1 509 880	1 730 339	1 893 043	1 473 549	1 741 630	1 922 696	1 623 571	1 824 198
Sumatera Barat	1 959 921	1 703 652	1 861 014	1 981 611	1 766 586	1 899 477	2 027 064	1 847 869	1 956 370
Riau	2 206 692	1 778 790	2 089 740	2 232 999	1 833 777	2 099 410	2 359 510	1 757 006	2 176 955
Jambi	1 892 222	1 740 027	1 844 704	1 911 628	1 750 627	1 860 039	2 064 673	1 665 541	1 937 969
Sumatera Selatan	1 900 868	1 667 763	1 820 905	1 874 605	1 681 602	1 807 585	2 020 600	1 763 070	1 935 432
Bengkulu	2 019 242	1 660 036	1 888 086	2 060 574	1 704 084	1 931 307	2 158 843	1 779 482	2 014 786
Lampung	1 797 969	1 496 871	1 695 552	1 752 187	1 644 717	1 714 314	1 903 514	1 708 063	1 843 739
Kep. Bangka Belitung	2 089 795	1 642 200	1 963 690	2 093 789	1 663 905	1 956 133	2 174 227	1 863 983	2 079 250
Kepulauan Riau	3 711 878	2 616 902	3 371 942	3 714 374	2 730 488	3 411 132	3 673 222	2 939 167	3 454 731
DKI Jakarta	3 146 622	2 483 226	2 906 219	3 151 995	2 537 948	2 918 226	3 310 971	2 615 452	3 048 357
Jawa Barat	2 062 306	1 707 562	1 950 345	2 078 954	1 846 392	2 004 484	1 978 158	2 335 743	2 088 518
Jawa Tengah	1 596 315	1 129 938	1 408 241	1 651 437	1 159 054	1 454 952	1 713 335	1 351 208	1 566 152
DI Yogyakarta	1 904 565	1 460 626	1 724 646	1 846 538	1 596 780	1 745 684	1 948 779	1 616 417	1 822 676
Jawa Timur	1 746 745	1 278 808	1 574 956	1 775 956	1 329 469	1 612 501	1 853 865	1 361 941	1 676 798
Banten	2 533 041	2 104 649	2 396 002	2 550 687	2 078 821	2 392 637	2 676 074	2 264 734	2 545 706
Bali	2 073 797	1 655 067	1 908 186	2 088 703	1 687 440	1 930 920	2 210 083	1 660 316	1 999 473
Nusa Tenggara Barat	2 041 830	1 456 986	1 829 422	2 001 895	1 456 292	1 795 693	2 048 074	1 557 874	1 872 931
Nusa Tenggara Timur	1 885 578	1 678 921	1 808 374	1 896 464	1 745 037	1 845 059	1 983 616	1 743 378	1 894 673
Kalimantan Barat	2 054 414	1 719 178	1 954 650	2 106 746	1 676 563	1 978 910	2 179 926	1 829 452	2 070 443
Kalimantan Tengah	2 192 645	1 861 323	2 094 590	2 234 853	1 896 528	2 137 820	2 365 116	1 853 790	2 215 984
Kalimantan Selatan	2 359 900	1 708 269	2 160 629	2 325 198	1 907 553	2 184 686	2 346 102	2 007 191	2 238 112
Kalimantan Timur	3 088 267	2 009 649	2 819 213	3 177 061	1 959 716	2 825 155	3 320 101	1 927 883	2 955 113
Kalimantan Utara	-	-	-	2 710 932	2 208 367	2 559 358	2 802 757	2 462 232	2 704 530
Sulawesi Utara	2 178 380	2 097 990	2 150 512	2 107 747	2 294 974	2 179 352	2 282 651	2 277 019	2 280 557
Sulawesi Tengah	1 987 608	1 781 225	1 910 130	2 143 027	1 599 744	1 955 729	2 098 129	1 732 078	1 966 771
Sulawesi Selatan	2 199 648	1 603 702	1 978 161	2 238 195	1 647 864	2 021 331	2 221 299	1 823 944	2 068 032
Sulawesi Tenggara	2 129 013	1 831 009	2 026 599	2 175 540	1 875 055	2 063 540	2 306 027	2 037 046	2 209 883
Gorontalo	1 837 800	1 538 448	1 704 388	1 846 076	1 584 140	1 734 347	1 850 558	1 827 964	1 840 827
Sulawesi Barat	2 263 345	1 681 491	2 062 204	2 180 422	1 808 641	2 054 723	2 221 546	1 909 725	2 105 908
Maluku	2 496 777	2 021 515	2 328 409	2 439 363	1 964 723	2 279 362	2 507 328	2 277 195	2 425 067
Maluku Utara	2 369 924	1 926 792	2 204 898	2 225 818	2 193 644	2 215 427	2 274 432	2 164 012	2 237 840
Papua Barat	2 891 122	2 289 808	2 730 795	2 851 515	2 446 418	2 750 392	2 844 364	2 613 781	2 782 078
Papua	3 287 953	2 730 793	3 149 950	3 307 942	2 662 819	3 114 182	3 398 416	2 479 195	3 178 644
Indonesia	2 115 072	1 644 458	1 952 589	2 132 279	1 705 548	1 981 725	2 178 407	1 863 399	2 069 803

Lampiran 26 Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah (rupiah), 2014-2015

Provinsi	Agustus 2014			Februari 2015			Agustus 2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	2 134 934	1 501 691	1 753 751	2 164 164	1 419 514	1 744 567	2 197 496	1 443 444	1 778 391
Sumatera Utara	1 840 177	1 504 465	1 730 339	1 869 940	1 461 401	1 741 630	1 942 017	1 560 169	1 824 198
Sumatera Barat	2 060 423	1 619 396	1 861 014	2 079 544	1 606 761	1 899 477	2 086 542	1 737 457	1 956 370
Riau	2 436 621	1 720 053	2 089 740	2 468 194	1 729 974	2 099 410	2 622 215	1 735 694	2 176 955
Jambi	2 360 359	1 505 281	1 844 704	2 302 149	1 530 004	1 860 039	2 447 966	1 578 000	1 937 969
Sumatera Selatan	2 232 270	1 367 454	1 820 905	2 233 849	1 364 217	1 807 585	2 423 994	1 372 361	1 935 432
Bengkulu	2 194 059	1 572 735	1 888 086	2 421 966	1 603 505	1 931 307	2 340 912	1 646 184	2 014 786
Lampung	2 047 625	1 397 977	1 695 552	2 100 446	1 400 244	1 714 314	2 158 980	1 561 471	1 843 739
Kep. Bangka Belitung	2 113 480	1 735 120	1 963 690	2 022 025	1 854 746	1 956 133	2 095 268	2 048 777	2 079 250
Kepulauan Riau	3 499 831	1 910 495	3 371 942	3 515 417	1 951 075	3 411 132	3 531 497	2 623 064	3 454 731
DKI Jakarta	2 906 219	.	2 906 219	2 918 226	-	2 918 226	3 048 357	.	3 048 357
Jawa Barat	2 069 232	1 420 737	1 950 345	2 080 971	1 448 856	2 004 484	2 254 861	1 164 738	2 088 518
Jawa Tengah	1 473 894	1 292 029	1 408 241	1 515 115	1 339 436	1 454 952	1 648 741	1 412 185	1 566 152
DI Yogyakarta	1 807 434	1 409 563	1 724 646	1 814 425	1 421 971	1 745 684	1 924 408	1 352 344	1 822 676
Jawa Timur	1 721 697	1 242 788	1 574 956	1 762 135	1 239 833	1 612 501	1 859 892	1 236 448	1 676 798
Banten	2 538 521	1 638 351	2 396 002	2 496 198	1 593 671	2 392 637	2 742 079	1 376 496	2 545 706
Bali	2 019 804	1 625 230	1 908 186	2 004 655	1 636 722	1 930 920	2 156 022	1 469 364	1 999 473
Nusa Tenggara Barat	1 985 042	1 564 155	1 829 422	2 006 668	1 414 494	1 795 693	2 145 332	1 424 524	1 872 931
Nusa Tenggara Timur	2 197 832	1 479 006	1 808 374	2 193 411	1 510 352	1 845 059	2 220 524	1 570 935	1 894 673
Kalimantan Barat	2 166 662	1 754 767	1 954 650	2 187 974	1 778 527	1 978 910	2 244 474	1 900 385	2 070 443
Kalimantan Tengah	2 274 953	1 968 557	2 094 590	2 304 037	1 985 779	2 137 820	2 533 614	1 965 576	2 215 984
Kalimantan Selatan	2 200 492	2 112 316	2 160 629	2 221 909	2 132 007	2 184 686	2 438 399	1 944 909	2 238 112
Kalimantan Timur	3 093 978	2 202 371	2 819 213	3 049 206	2 136 431	2 825 155	3 120 894	2 434 708	2 955 113
Kalimantan Utara	-	-	-	2 545 435	2 589 378	2 559 358	2 730 019	2 652 362	2 704 530
Sulawesi Utara	2 271 457	1 936 899	2 150 512	2 284 288	1 993 497	2 179 352	2 410 496	2 023 961	2 280 557
Sulawesi Tengah	2 314 770	1 541 486	1 910 130	2 321 177	1 579 492	1 955 729	2 176 824	1 760 845	1 966 771
Sulawesi Selatan	2 269 105	1 562 297	1 978 161	2 287 734	1 606 162	2 021 331	2 370 809	1 579 544	2 068 032
Sulawesi Tenggara	2 303 727	1 769 268	2 026 599	2 372 376	1 767 376	2 063 540	2 484 581	1 903 004	2 209 883
Gorontalo	1 993 771	1 332 281	1 704 388	1 993 329	1 351 318	1 734 347	2 150 592	1 485 382	1 840 827
Sulawesi Barat	2 090 169	2 046 373	2 062 204	2 103 143	2 025 734	2 054 723	2 178 306	2 065 005	2 105 908
Maluku	2 655 739	1 732 405	2 328 409	2 669 544	1 839 322	2 279 362	2 695 540	2 036 190	2 425 067
Maluku Utara	2 329 754	2 079 512	2 204 898	2 346 757	2 105 506	2 215 427	2 366 599	2 127 703	2 237 840
Papua Barat	2 695 281	2 754 945	2 730 795	2 743 797	2 756 444	2 750 392	2 775 855	2 788 652	2 782 078
Papua	3 335 429	2 750 479	3 149 950	3 337 007	2 762 486	3 114 182	3 370 081	2 836 367	3 178 644
Indonesia	2 141 850	1 514 434	1 952 589	2 153 567	1 528 212	1 981 725	2 283 739	1 527 018	2 069 803

Batasan Kegiatan Informal

Lampiran 27 Tabulasi Silang Batasan Kegiatan Formal/Informal Berdasarkan
Status Pekerjaan dan Jenis Pekerjaan Utama

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Berusaha Dibantu Buruh tidak Tetap/Buruh tak Dibayar	F	F	F	F	F	INF	F	F	F	INF
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Buruh/Karyawan/Pegawai	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
Pekerja Bebas di Pertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Bebas di Nonpertanian	F	F	F	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF
Pekerja Keluarga/tak Dibayar	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF	INF

Keterangan: F = Formal

INF = Informal

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax : (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsHQ@bps.go.id

